



**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI  
HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI SUMATERA MELALUI  
BELANJA MODAL SEBAGAI *VARIABEL INTERVENING***

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

Oleh :

**HATRESMA MEISUCI TASYA**

**C1A020073**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JAMBI**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hatresma Meisuci Tasya  
Nomor Mahasiswa : C1A020073  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera melalui Belanja Modal sebagai *Variabel Intervening*

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi ini adalah karya asli penulis, selama proses penulisan tidak melakukan kegiatan plagiat karya ilmiah orang lain, semua petikan yang saya ajukan dalam skripsi ini sesungguhnya ada dan disiapkan dengan kaidah penulisan ilmiah.
2. Bila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana poin pertama, maka saya siap menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 20 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Hatresma Meisuci Tasya

C1A020073

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

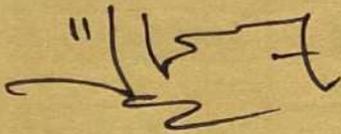
Dengan ini Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi menyatakan bahwa Skripsi ini yang di susun oleh :

Nama : Hatresma MeiSuci Tasya  
NIM : C1A020073  
Prodi : Ekonomi Pembangunan  
Judul : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku untuk diuji pada Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi pada tanggal yang tertera dibawah ini.

Jambi, 20 Maret 2025

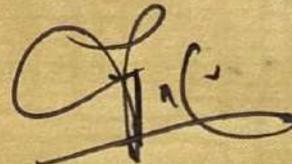
Pembimbing I



Selamat Rahmadi, S.E., M.Si.

NIP. 196905181994031003

Pembimbing II

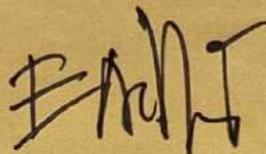


H. Parmadi, S.E., M.E.

NIP. 196805061993031003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Hj. Erni Achmad, S.E., M.Si.

NIP. 196801241993032001

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Komprehensif dan Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada :

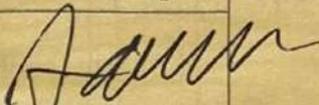
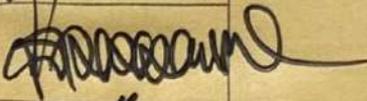
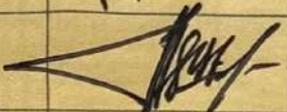
Hari : Selasa

Tanggal : 11 Maret 2025

Jam : 08.00 s/d 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian 1 Gedung Dekanat Lantai 1 FEB

### TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. H. Zamzami, S.E., M.S.	
Penguji Utama	Dr. Zainul Bahri, S.E., M.E.	
Sekretaris Penguji	Dwi Hastuti, S.E., M.Sc.	
Anggota Penguji	Selamet Rahmadi, S.E., M.Si.	
Anggota Penguji	H. Parmadi, S.E., M.E.	

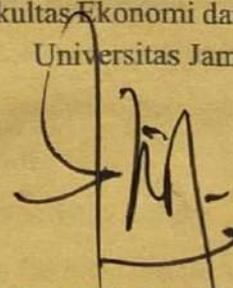
Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jambi



Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si.  
NIP. 196603011990032002

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jambi



Dr. Rafiqi, M.A.  
NIP. 197802282005011003

## KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Esa, Pencipta seluruh alam semesta yang menyempurnakan setiap ciptaan-Nya, serta Pengatur segala takdir. Dengan hidayah, rahmat, dan inayah-Nya, penulis berhasil menuntaskan penyusunan penulisan skripsi berjudul "**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Sumatera Melalui Belanja Modal Sebagai *Variabel Intervening***" ini yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, yang sudah menyebarkan ajaran Islam yang benar dan sempurna bagi umat manusia beserta seluruh makhluk. Penulis sadar akan sepenuhnya bilamana penyusunan skripsi ini tak lepas dari kerja keras yang didukung oleh bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dan doa dari banyak pihak. Terkhusus kedua orang tua tercinta dan terkasih Bapak Hadi Kusron dan Ibu Maryatul Qiftiah terimakasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, setiap senyum yang menguatkan serta memberikan kasih sayang dan dukungan tanpa henti baik secara materil maupun non materil. Semoga ini menjadi suatu kebanggaan bagi Bapak dan Ibu. Serta keluarga besar terkhusus nyai Cikning, adik Afika Zuhroh Kusron, datuk H. M. Taher L., Papa H. Khairul Suhairi, S.E., M.M., Oom Kombes. Pol. Robert A. Sormin, Oom Herjoni Edison, S.Kom., serta tante-tante dan saudara saudari tercinta terimakasih atas semangat, candaan hangat, rasa kebersamaan yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi serta menjadi pelipur lelah di tengah perjalanan ini.

Atas dasar ini, melalui penuh keikhlasan beserta ketulusan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Ibu Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

3. Bapak Dr. Rafiqi, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Erni Achmad, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
5. Ibu Dra. Rahma Nurjanah, M.E. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan arahan selama masa perkuliahan.
6. Bapak Selamat Rahmadi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 dan Bapak Parmadi, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 terimakasih atas kesediaannya memberikan waktu, arahan, dan masukan serta motivasi yang berharga banyak membantu penulis selama penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi terkhusus Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah menyalurkan ilmunya selama masa perkuliahan dengan ikhlas dan sepenuh hati.
8. Seluruh teman-teman terbaik saya yang telah terlibat terkhusus Difa, Nana, Indah, Adel, Ema, Anggita, Holifa, Vivi, Nirmalha, Fajar Andrea, Wahyudi, Harun, Pebrian, serta teman-teman lainnya terima kasih banyak atas dukungan dan bantuannya selama penulis memulai skripsi ini. Tanpa teman-teman yang selalu memberikan semangat dan saran, proses ini pasti akan lebih berat. penulis benar-benar bersyukur memiliki kalian di sekitar.

Jambi, 18 Februari 2025

Hatresma Meisuci Tasya

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) terhadap Belanja Modal di provinsi-provinsi Sumatera, serta pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening. Data yang digunakan mencakup laju pertumbuhan variabel dalam APBD dan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama 17 tahun (2006–2023) yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis jalur dengan aplikasi AMOS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap BM, dengan P Value  $< 0,15$ , yang mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan alokasi belanja modal. Sebaliknya, DBHP dan DBHBP tidak berpengaruh signifikan terhadap BM, dengan P Value  $> 0,15$ , disebabkan oleh ketergantungan pada sumber pendanaan lain dan pengelolaan anggaran yang kurang efektif. Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PDRB di sebagian besar provinsi, yang disebabkan oleh pengelolaan BM yang tidak efektif. Meskipun PAD berpengaruh terhadap PDRB, kontribusinya masih terbatas, sedangkan DBHP dan DBHBP tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PDRB. Melalui analisis jalur dengan uji Sobel, ditemukan bahwa PAD, DBHP, dan DBHBP tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hasil ini menunjukkan perlunya optimalisasi pengelolaan PAD, serta pemanfaatan DBHP dan DBHBP secara strategis untuk mendukung belanja modal produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Sumatera.

**Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi**

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the influence of Regional Original Income (PAD), Tax Profit Sharing Funds (DBHP), and Non-Tax Profit Sharing Funds (DBHBP) on Capital Expenditures in Sumatra provinces, as well as the influence of these variables on Economic Growth (GRDP) through Capital Expenditures as an intervening variable. The data used includes variable growth rates in the APBD and GRDP at current prices (ADHB) for 17 years (2006–2023) obtained from the Director General of Financial Balance for Regional Governments of the Republic of Indonesia and the Central Statistics Agency of the Republic of Indonesia. Data analysis was carried out using the path analysis method with the AMOS application.*

*The research results show that PAD has a significant influence on BM, with P Value < 0.15, which indicates that increasing PAD can increase capital expenditure allocation. On the other hand, DBHP and DBHBP do not have a significant effect on BM, with P Value > 0.15, due to dependence on other funding sources and less effective budget management. Capital expenditure does not show a significant influence on GRDP in most provinces, which is caused by ineffective BM management. Even though PAD has an effect on GRDP, its contribution is still limited, while DBHP and DBHBP do not show a significant influence on GRDP. Through path analysis with the Sobel test, it was found that PAD, DBHP, and DBHBP did not have a significant effect on economic growth through capital expenditure. These results show the need to optimize PAD management, as well as strategic use of DBHP and DBHBP to support productive capital expenditure that can encourage long-term economic growth in Sumatra.*

**Keywords: Original Regional Income, Tax Profit Sharing Funds, Non-Tax Profit Sharing Funds, Capital Expenditures, Economic Growth**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Akademis.....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Kerangka Teoritis .....	11
2.1.1 Konsep Keuangan Daerah.....	11
2.1.2. Konsep dan Teori Penerimaan dan Pengeluaran Negara.....	12
2.1.3 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)....	15
2.1.4 Variabel Intervening .....	26
2.1.5 Konsep Belanja Daerah.....	26

2.1.6 Konsep dan Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	28
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya .....	30
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	37
2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	37
2.3.2 Hubungan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	37
2.3.3 Hubungan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	37
2.3.4 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal ...	38
2.3.5 Hubungan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal .....	38
2.3.6 Hubungan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal .....	38
2.3.7 Hubungan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	39
2.4 Kerangka Pemikiran.....	39
2.5 Hipotesis .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.1.1 Jenis Data .....	42
3.1.2 Sumber Data.....	42
3.2 Metode Analisis .....	42
3.2.1 Uji Asumsi Klasik .....	43
3.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda .....	44
3.2.3 Uji Hipotesis.....	44
3.2.4 Koefisien Determinasi (R-Square).....	46
3.2.5 Uji Asumsi Klasik .....	46

3.2.6 Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ) .....	47
3.2.7 Uji Hipotesis.....	50
3.2.8 Koefisien Determinasi (R-Square).....	51
3.2.9 Uji Sobel.....	52
3.3 Operasional Variabel.....	53
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Keadaan Penduduk Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera .....	55
4.2 Kondisi Perekonomian Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera .....	58
4.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Sumatera	66
4.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi di Pulau Sumatera.	69
4.5 Perkembangan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi di Pulau Sumatera .....	71
4.6 Perkembangan Belanja Modal Provinsi di Pulau Sumatera .....	73
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi di Sumatera	75
5.1.1 Uji Asumsi Klasik .....	75
5.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda .....	81
5.1.3 Uji Hipotesis.....	90
5.1.4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	102
5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera.....	105
5.2.1 Uji Asumsi Klasik .....	105
5.2.2 Analisis Jalur .....	112
5.2.3 Uji Hipotesis.....	139

5.2.4 Uji Koefisien Determinasi.....	162
5.2.5 Uji Sobel.....	168
5.3 Analisis Ekonomi .....	173
5.3.1 Analisis Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal.....	173
5.3.2 Analisis Pengaruh DBHP Terhadap Belanja Modal .....	176
5.3.3 Analisis Pengaruh DBHBP terhadap Belanja Modal .....	179
5.3.4 Analisis Pengaruh PAD terhadap PDRB .....	182
5.3.5 Analisis Pengaruh DBHP terhadap PDRB .....	184
5.3.6 Analisis Pengaruh DBHBP terhadap PDRB .....	187
5.3.7 Analisis Pengaruh BM terhadap PDRB .....	190
5.4 Implikasi Kebijakan Hasil Penelitian.....	194
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>198</b>
6.1 Kesimpulan .....	198
6.2 Saran .....	199
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>201</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>205</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju PDRB Provinsi di Sumatera.....	2
Tabel 1.2 Jumlah PAD Provinsi di Sumatera .....	5
Tabel 1.3 Jumlah Dana Bagi Hasil Provinsi di Sumatera .....	6
Tabel 1.4 Jumlah Belanja Modal Provinsi di Sumatera .....	7
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	30
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023 .....	57
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023 .....	60
Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023.....	61
Tabel 4.4 Realisasi Pengeluaran Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023.....	64
Tabel 4.5 Realisasi PAD di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023 .....	68
Tabel 4.6 Realisasi DBHP di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023 .....	70
Tabel 4.7 Realisasi DBHBP di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023.....	72
Tabel 4.8 Realisasi Belanja Modal di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023 .....	74
Tabel 5.1 Hasil Uji Normalitas Provinsi Aceh .....	75
Tabel 5.2 Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Utara .....	75
Tabel 5.3 Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Barat .....	76
Tabel 5.4 Hasil Uji Normalitas Provinsi Riau.....	76
Tabel 5.5 Hasil Uji Normalitas Provinsi Jambi.....	76
Tabel 5.6 Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Selatan .....	77
Tabel 5.7 Hasil Uji Normalitas Provinsi Bengkulu.....	77
Tabel 5.8 Hasil Uji Normalitas Provinsi Lampung .....	77
Tabel 5.9 Hasil Uji Normalitas Provinsi Kep. Bangka Belitung.....	78
Tabel 5.10 Hasil Uji Normalitas Provinsi Kep. Riau .....	78
Tabel 5.11 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Aceh .....	79
Tabel 5.12 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Utara .....	79
Tabel 5.13 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Barat.....	79
Tabel 5.14 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Riau .....	79
Tabel 5.15 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Jambi .....	80

Tabel 5.16 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Selatan.....	80
Tabel 5.17 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Bengkulu .....	80
Tabel 5.18 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Lampung .....	81
Tabel 5.19 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Kep. Bangka Belitung.....	81
Tabel 5.20 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Kep. Riau .....	81
Tabel 5.21 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Aceh .....	82
Tabel 5.22 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Sumatera Utara .....	83
Tabel 5.23 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Sumatera Barat.....	83
Tabel 5.24 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Riau.....	84
Tabel 5.25 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Jambi.....	85
Tabel 5. 26 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Sumatera Selatan .	86
Tabel 5.27 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Bengkulu.....	87
Tabel 5.28 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Lampung .....	87
Tabel 5.29 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	88
Tabel 5.30 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Kep. Riau .....	89
Tabel 5.31 Hasil Uji F Provinsi Aceh.....	90
Tabel 5.32 Hasil Uji F Provinsi Sumatera Utara.....	91
Tabel 5.33 Hasil Uji F Provinsi Sumatera Barat .....	91
Tabel 5.34 Hasil Uji F Provinsi Riau .....	92
Tabel 5.35 Hasil Uji F Provinsi Jambi .....	93
Tabel 5.36 Hasil Uji F Provinsi Sumatera Selatan .....	93
Tabel 5.37 Hasil Uji F Provinsi Bengkulu .....	94
Tabel 5.38 Hasil Uji F Provinsi Lampung .....	95
Tabel 5.39 Hasil Uji F Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	95
Tabel 5.40 Hasil Uji F Provinsi Kep. Riau.....	96
Tabel 5.41 Hasil Uji t Provinsi Aceh.....	97
Tabel 5.42 Hasil Uji t Provinsi Sumatera Utara .....	97
Tabel 5.43 Hasil Uji t Provinsi Sumatera Barat .....	98
Tabel 5.44 Hasil Uji t Provinsi Riau .....	98
Tabel 5.45 Hasil Uji t Provinsi Jambi .....	99

Tabel 5.46 Hasil Uji t Provinsi Sumatera Selatan .....	99
Tabel 5.47 Hasil Uji t Provinsi Bengkulu .....	100
Tabel 5.48 Hasil Uji t Provinsi Lampung.....	100
Tabel 5.49 Hasil Uji t Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	101
Tabel 5.50 Hasil Uji t Provinsi Kep. Riau.....	101
Tabel 5.51 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Aceh .....	102
Tabel 5.52 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Sumatera Utara .....	102
Tabel 5.53 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Sumatera Barat .....	103
Tabel 5.54 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Riau.....	103
Tabel 5.55 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Jambi.....	103
Tabel 5.56 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Sumatera Selatan ....	104
Tabel 5.57 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Bengkulu.....	104
Tabel 5.58 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Lampung.....	104
Tabel 5.59 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	105
Tabel 5.60 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Kep. Riau.....	105
Tabel 5.61 Hasil Uji Normalitas Provinsi Aceh .....	106
Tabel 5.62 Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Utara .....	106
Tabel 5.63 Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Barat .....	106
Tabel 5.64 Hasil Uji Normalitas Provinsi Riau.....	107
Tabel 5.65 Hasil Uji Normalitas Provinsi Jambi.....	107
Tabel 5.66 Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Selatan .....	107
Tabel 5.67 Hasil Uji Normalitas Provinsi Bengkulu.....	108
Tabel 5.68 Hasil Uji Normalitas Provinsi Lampung .....	108
Tabel 5.69 Hasil Uji Normalitas Provinsi Kep. Bangka Belitung.....	108
Tabel 5.70 Hasil Uji Normalitas Provinsi Kep. Riau .....	109
Tabel 5.71 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Aceh .....	109
Tabel 5.72 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Utara .....	109
Tabel 5.73 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Barat.....	110
Tabel 5.74 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Riau .....	110
Tabel 5.75 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Jambi .....	110

Tabel 5.76 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Selatan.....	111
Tabel 5.77 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Bengkulu .....	111
Tabel 5.78 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Lampung .....	111
Tabel 5.79 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Kep. Bangka Belitung.....	111
Tabel 5.80 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Kep. Riau .....	112
Tabel 5.81 Hasil Analisis Jalur Provinsi Aceh .....	112
Tabel 5.82 Direct Effect Provinsi Aceh.....	114
Tabel 5.83 Indirect Effects Provinsi Aceh.....	114
Tabel 5.84 Total Effects Provinsi Aceh .....	115
Tabel 5.85 Hasil Analisis Jalur Provinsi Sumatera Utara .....	115
Tabel 5.86 Direct Effect Provinsi Sumatera Utara .....	117
Tabel 5.87 Indirect Effects Provinsi Sumatera Utara.....	117
Tabel 5.88 Total Effects Provinsi Sumatera Utara .....	117
Tabel 5.89 Hasil Analisis Jalur Provinsi Sumatera Barat.....	118
Tabel 5.90 Direct Effect Provinsi Sumatera Barat .....	119
Tabel 5.91 Indirect Effects Provinsi Sumatera Barat .....	120
Tabel 5.92 Total Effects Provinsi Sumatera Barat .....	120
Tabel 5.93 Hasil Analisis Jalur Provinsi Riau.....	120
Tabel 5.94 Direct Effect Provinsi Riau .....	122
Tabel 5.95 Indirect Effects Provinsi Riau .....	122
Tabel 5.96 Total Effects Provinsi Riau.....	123
Tabel 5.97 Hasil Analisis Jalur Provinsi Jambi.....	123
Tabel 5.98 Direct Effect Provinsi Jambi .....	124
Tabel 5.99 Indirect Effects Provinsi Jambi .....	125
Tabel 5.100 Total Effects Provinsi Jambi.....	125
Tabel 5.101 Hasil Analisis Jalur Provinsi Sumatera Selatan.....	126
Tabel 5.102 Direct Effect Provinsi Sumatera Selatan .....	127
Tabel 5.103 Indirect Effects Provinsi Sumatera Selatan .....	128
Tabel 5.104 Total Effects Provinsi Sumatera Selatan .....	128
Tabel 5.105 Hasil Analisis Jalur Provinsi Bengkulu.....	128
Tabel 5.106 Direct Effect Provinsi Bengkulu .....	130

Tabel 5. 107 Indirect Effects Provinsi Bengkulu .....	130
Tabel 5.108 Total Effects Provinsi Bengkulu.....	131
Tabel 5.109 Hasil Analisis Jalur Provinsi Lampung .....	131
Tabel 5.110 Direct Effect Provinsi Lampung.....	132
Tabel 5.111 Indirect Effects Provinsi Lampung.....	133
Tabel 5.112 Total Effects Provinsi Lampung .....	133
Tabel 5.113 Hasil Analisis Jalur Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	134
Tabel 5. 114 Direct Effect Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	135
Tabel 5. 115 Indirect Effects Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	136
Tabel 5.116 Total Effects Provinsi Kep. Bangka Belitung.....	136
Tabel 5.117 Hasil Analisis Jalur Provinsi Kep. Riau .....	136
Tabel 5.118 Direct Effect Provinsi Kep. Riau.....	138
Tabel 5.119 Indirect Effects Provinsi Kep. Riau.....	138
Tabel 5.120 Total Effects Provinsi Kep. Riau .....	139
Tabel 5.121 Hasil Uji F Provinsi Aceh.....	139
Tabel 5.122 Hasil Uji F Provinsi Sumatera Utara.....	140
Tabel 5.123 Hasil Uji F Provinsi Sumatera Barat .....	141
Tabel 5.124 Hasil Uji F Provinsi Riau .....	143
Tabel 5.125 Hasil Uji F Provinsi Jambi .....	144
Tabel 5.126 Hasil Uji F Provinsi Sumatera Selatan .....	145
Tabel 5.127 Hasil Uji F Provinsi Bengkulu .....	146
Tabel 5.128 Hasil Uji F Provinsi Lampung .....	147
Tabel 5.129 Hasil Uji F Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	148
Tabel 5.130 Hasil Uji F Provinsi Kep. Riau.....	149
Tabel 5.131 Hasil Uji t Provinsi Aceh.....	151
Tabel 5.132 Hasil Uji t Provinsi Sumatera Utara.....	152
Tabel 5.133 Hasil Uji t Provinsi Sumatera Barat .....	153
Tabel 5.134 Hasil Uji t Provinsi Riau .....	154
Tabel 5.135 Hasil Uji t Provinsi Jambi .....	155
Tabel 5.136 Hasil Uji t Provinsi Sumatera Selatan .....	156
Tabel 5.137 Hasil Uji t Provinsi Bengkulu .....	158

Tabel 5.138 Hasil Uji t Provinsi Lampung.....	159
Tabel 5.139 Hasil Uji t Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	160
Tabel 5.140 Hasil Uji t Provinsi Kep.Riau.....	161
Tabel 5.141 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Aceh.....	163
Tabel 5.142 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Sumatera Utara .....	163
Tabel 5.143 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Sumatera Barat .....	164
Tabel 5.144 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Riau.....	164
Tabel 5.145 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Jambi.....	165
Tabel 5.146 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Sumatera Selatan ..	165
Tabel 5.147 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Bengkulu.....	166
Tabel 5.148 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Lampung.....	166
Tabel 5.149 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	167
Tabel 5.150 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Kep. Riau.....	167
Tabel 5.151 Hasil Uji Sobel Provinsi Aceh.....	168
Tabel 5.152 Hasil Uji Sobel Provinsi Sumatera Utara .....	169
Tabel 5.153 Hasil Uji Sobel Provinsi Sumatera Barat .....	169
Tabel 5.154 Hasil Uji Sobel Provinsi Riau .....	170
Tabel 5.155 Hasil Uji Sobel Provinsi Jambi .....	170
Tabel 5.156 Hasil Uji Sobel Provinsi Sumatera Selatan .....	171
Tabel 5.157 Hasil Uji Sobel Provinsi Bengkulu .....	171
Tabel 5.158 Hasil Uji Sobel Provinsi Lampung.....	172
Tabel 5.159 Hasil Uji Sobel Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	172
Tabel 5.160 Hasil Uji Sobel Provinsi Kep. Riau.....	173

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner .....	14
Gambar 2 Skematika Kerangka Pemikiran .....	41
Gambar 3 Persamaan Struktural 1.....	48
Gambar 4 Persamaan Struktural 2.....	49
Gambar 5 Model Diagram Analisis Jalur (Path Analysis) .....	49
Gambar 6 Konsep Uji Sobel .....	52
Gambar 7 Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Aceh .....	82
Gambar 8 Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Sumatera Utara ....	83
Gambar 9 Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Sumatera Barat ....	84
Gambar 10 Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Riau.....	84
Gambar 11 Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Jambi.....	85
Gambar 12 Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Sumatera Selatan	86
Gambar 13 Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Bengkulu.....	87
Gambar 14 Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Lampung.....	88
Gambar 15 Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Kep. Bangka Belitung.....	89
Gambar 16 Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Kep. Riau .....	89
Gambar 17 Model Analisis Jalur Provinsi Aceh .....	113
Gambar 18 Model Analisis Jalur Provinsi Sumatera Utara .....	115
Gambar 19 Model Analisis Jalur Provinsi Sumatera Barat.....	118
Gambar 20 Model Analisis Jalur Provinsi Riau.....	121
Gambar 21 Model Analisis Jalur Provinsi Jambi.....	123
Gambar 22 Model Analisis Jalur Provinsi Sumatera Selatan .....	126
Gambar 23 Model Analisis Jalur Provinsi Bengkulu.....	129
Gambar 24 Model Analisis Jalur Provinsi Lampung .....	131
Gambar 25 Model Analisis Jalur Provinsi Kep. Bangka Belitung.....	134
Gambar 26 Model Analisis Jalur Provinsi Kepulauan Riau.....	137

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan sumber peningkatan taraf hidup penduduk dan proses utama yang dapat membawa perekonomian menuju tahap yang lebih maju (Boediono, 2017). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Peranan sektor-sektor ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dirasa semakin penting. Melalui proses pertumbuhan ekonomi akan tercermin kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh suatu bangsa atau penduduk suatu daerah dalam periode tertentu (Masloman, 2018).

Menurut Wardani et al (2024), pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator dari keberhasilan proses pembangunan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, tentunya akan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis laju pertumbuhan ekonomi guna memahami dinamika perubahan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu. Laju pertumbuhan ini mencerminkan seberapa cepat perekonomian berkembang dan menjadi tolak ukur utama dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan yang diterapkan.

Laju pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah merupakan tolak ukur utama dalam menilai tingkat pembangunan dan kesejahteraan suatu daerah. Dalam konteks Indonesia, provinsi-provinsi yang terletak di Pulau Sumatera mempunyai peran penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian negara. Menurut Muzakki et al (2025), ada banyak prospek ekonomi di Pulau Sumatra, salah satu pulau terbesar di Indonesia. Faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah sumber daya alamnya, yang meliputi mineral, perkebunan, dan hasil hutan. Meskipun demikian, berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi tren pertumbuhan ekonomi Sumatera yang kompleks.

Dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dan kebijakan strategis guna mendorong pertumbuhan

ekonomi di Pulau Sumatera serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Mengenai pemerintahan daerah, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . Pembagian dana yang adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan permasalahan yang dibahas dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini mulai berlaku pada tahun 2004. Salah satu bentuk desentralisasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan perekonomian dari tahun ke tahun adalah desentralisasi dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan otonomi daerah.

Mengukur kemajuan perekonomian memerlukan instrumen pengukuran yang tepat, berupa ukuran pertumbuhan ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode satu tahun tertentu, yang diukur berdasarkan harga, sesuai dengan pernyataan Putri (2015). Angka PDRB dapat berbeda jika dibandingkan antar wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan persentase perubahan PDRB, bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya, menurut data yang disajikan.

**Tabel 1.1** Laju PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi di Sumatera

Provinsi	Laju PDRB (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	5.32	1.32	11.18	13.75	7.93
SUMATERA UTARA	8.09	1.18	6.01	11.08	10.03
SUMATERA BARAT	6.87	-1.84	4.63	12.75	9.60
RIAU	1.29	-4.91	15.31	18.19	3.52
JAMBI	4.48	-5.80	13.27	19.12	6.15
SUMATERA SELATAN	8.46	-0.14	8.59	19.53	6.62
BENGKULU	8.63	1.61	8.59	13.20	7.15
LAMPUNG	8.09	-2.12	5.15	11.57	8.39
KEP. BANGKA BELITUNG	3.70	-0.41	13.83	10.86	7.70
KEP. RIAU	7.63	-5.22	8.47	12.05	7.46

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2024), Data Diolah*

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan indikator penting bagi kesejahteraan sosial suatu daerah. Di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang beragam di berbagai provinsi. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, mencerminkan dampak pandemi COVID-19, upaya pemulihan, dan dinamika ekonomi regional. Pada tahun 2019, sebelum pandemi, seluruh provinsi mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, investasi yang meningkat, belanja pemerintah yang stabil, dan ekspor yang masih tinggi. Provinsi dengan pertumbuhan tertinggi adalah Bengkulu (8,63%), diikuti Sumatera Selatan (8,46%) dan Sumatera Utara (8,09%). Namun, pandemi tahun 2020 memukul keras seluruh provinsi, dengan sebagian besar mengalami kontraksi tajam. Provinsi seperti Jambi (-5,80%), Riau (-4,91%), dan Kepulauan Riau (-5,22%) mengalami penurunan terburuk. Hanya beberapa provinsi, seperti Bengkulu (1,61%) dan Aceh (1,32%), yang berhasil mempertahankan pertumbuhan positif, meskipun melambat.

Tahun 2021 menjadi awal pemulihan ekonomi, dengan semua provinsi kembali mencatat pertumbuhan positif. Riau (15,31%) dan Kepulauan Bangka Belitung (13,83%) menjadi yang tertinggi, didukung oleh sektor industri dan ekspor. Pemulihan terus berlanjut pada 2022, di mana pertumbuhan yang sangat kuat terjadi di Jambi (19,12%) dan Sumatera Selatan (19,53%), menunjukkan pemulihan ekonomi yang pesat. Pada 2023, terjadi stabilisasi pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi. Meskipun pertumbuhan melambat dibandingkan 2022, banyak provinsi berhasil mencapai atau melampaui tingkat pertumbuhan sebelum pandemi. Sumatera Utara (10,03%) dan Sumatera Barat (9,60%) menjadi contoh provinsi dengan pertumbuhan yang solid, sementara Riau (3,52%) mengalami penurunan tajam dari tahun sebelumnya.

Salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak efektif. APBN adalah usulan anggaran tahunan pemerintah Indonesia yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan, bertujuan untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Indonesia. Namun, ketidakjelasan penerimaan dana dari pemerintah pusat dan efisiensi APBN yang rendah turut menyumbang pada ketidakpastian ekonomi. Setelah dialokasikan, dana tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian lokal, ketahanan suatu daerah berbeda-beda.

Pemulihan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH) berbasis pajak, dan DBH bukan pajak. Menurut Devi & Tjahjono (2023), PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selain itu, PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Menurut Undang- Undang nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi hasil (DBH) merupakan dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan kepada angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Pembagian DBH ini melihat dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Jika daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah maka akan mendapatkan porsi yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. DBH diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, dengan memperhatikan potensi daerah produksi. DBH pajak dan DBH bukan pajak merupakan transfer dari pemerintah pusat yang penting untuk mendukung belanja modal daerah.

Belanja modal yang merupakan bagian dari belanja daerah mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian dalam pengalokasiannya anggaran belanja modal digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pengadaan aset tetap di suatu daerah (Fuady & Weriantoni, 2023). Menelaah interaksi antara PAD, DBH pajak, DBH bukan pajak, dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika perekonomian di tingkat daerah.

**Tabel 1.2** Jumlah PAD Provinsi di Sumatera

Provinsi	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
ACEH	2.570,78	2.505,89	2.917,15	2.987,19
SUMATERA UTARA	5.531,24	6.402,71	7.258,02	7.225,69
SUMATERA BARAT	2.255,07	2.551,90	2.851,97	2.471,22
RIAU	3.333,18	4.050,47	4.696,77	5.866,45
JAMBI	1.535,18	1.843,43	2.163,59	1.900,66
SUMATERA SELATAN	3.375,10	3.865,46	4.930,95	5.199,84
BENGKULU	712,35	984,42	1.088,42	1.033,85
LAMPUNG	2.842,29	3.249,67	3.678,30	3.766,19
KEP. BANGKA BELITUNG	683,43	895,76	1.090,48	949,85
KEP. RIAU	1.195,64	1.375,77	1.675,73	1.806,97

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024*

Tabel 1.2 menunjukkan data realisasi PAD dari beberapa provinsi di Sumatera selama 2020-2023 menunjukkan variasi yang signifikan, mencerminkan kondisi ekonomi lokal dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya. Provinsi Aceh mencatat peningkatan PAD dari 2.570,78 miliar rupiah pada 2020 menjadi 2.987,19 miliar rupiah pada 2023, dengan sedikit penurunan pada 2021. Sumatera Utara menunjukkan peningkatan konsisten dari 5.531,24 miliar rupiah pada 2020 menjadi 7.225,69 miliar rupiah pada 2023. Sumatera Barat mengalami kenaikan hingga 2022 namun turun pada 2023. Riau mencatat pertumbuhan signifikan dari 3.333,18 miliar rupiah pada 2020 menjadi 5.866,45 miliar rupiah pada 2023. Hal ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pascapandemi, optimalisasi pemungutan pajak, serta investasi infrastruktur dan sektor unggulan. Digitalisasi sistem pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan dukungan pemerintah pusat juga berperan dalam mendorong kenaikan PAD.

Jambi menunjukkan peningkatan pada 2021 dan 2022, tetapi turun pada 2023. Sumatera Selatan terus meningkat dari 3.375,10 miliar rupiah pada 2020 menjadi 5.199,84 miliar rupiah pada 2023. Provinsi Bengkulu dan Kepulauan

Bangka Belitung mencatat peningkatan moderat dengan beberapa fluktuasi. Lampung mengalami peningkatan stabil dari 2.842,29 miliar rupiah pada 2020 menjadi 3.766,19 miliar rupiah pada 2023, sementara Kepulauan Riau konsisten meningkat dari 1.195,64 miliar rupiah pada 2020 menjadi 1.806,97 miliar rupiah pada 2023.

Secara keseluruhan, banyak provinsi di Sumatera mengalami peningkatan PAD, menunjukkan keberhasilan optimalisasi sumber daya daerah. Namun, terdapat disparitas dalam tingkat pertumbuhan PAD antar provinsi. Sejumlah variabel mempengaruhi perubahan PAD, termasuk perekonomian nasional dan regional, kebijakan fiskal, serta sumber daya dan potensi masing-masing provinsi.

**Tabel 1.3** Jumlah Dana Bagi Hasil Provinsi di Sumatera

Provinsi	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Milyar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
ACEH	571,38	231,73	427,86	461,6
SUMATERA UTARA	473,8	803,63	809,15	581,37
SUMATERA BARAT	146,66	187,72	200,04	180,03
RIAU	1.841,21	1.942,42	1.879,97	1.615,51
JAMBI	445,13	488,34	671,46	507,96
SUMATERA SELATAN	1.955,90	1.936,83	2.652,59	2.480,24
BENGKULU	72,99	90,74	124,47	134,17
LAMPUNG	161,69	228,98	276,42	209,98
KEP. BANGKA BELITUNG	129,01	244,59	529,42	325,13
KEP. RIAU	460,88	466,88	733,27	693,27

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024*

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan DBH pajak dan bukan pajak, seperti terlihat padadata realisasi DBH dari beberapa provinsi di Sumatera selama 2020-2023. Provinsi Riau dan Sumatera Selatan yang memiliki tingkat realisasi DBH relatif tinggi berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi apabila dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kontribusi besar dari sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perkebunan (kelapa sawit dan karet), pertambangan, serta minyak dan gas bumi. Kenaikan realisasi DBH terjadi akibat peningkatan harga komoditas

global, meningkatnya produksi dan ekspor, serta efektivitas dalam pemungutan pajak dan retribusi dari sektor-sektor tersebut. Jika dikelola dengan baik, dana ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi infrastruktur, pengembangan industri hilir, dan penguatan sektor produktif lainnya. Sebaliknya, Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung yang mengalami penurunan realisasi DBH akan menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan belanja modal.

Berdasarkan data, realisasi DBH Provinsi Riau mencapai Rp.1.841,21 miliar pada tahun 2020 dan masih berada pada level yang tinggi hingga tahun 2023, sedangkan jumlah realisasi DBH Sumsel mencapai Rp.1.955,9 miliar pada tahun 2020 dan Rp.2 triliun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan angka yang tinggi sebesar 480,24 miliar rupiah. Realisasi DBH yang menurun dari Rp.146,66 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.180,03 miliar pada tahun 2023 menunjukkan adanya potensi tantangan perekonomian negara. Secara umum, daerah dengan tingkat realisasi DBH yang lebih tinggi memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Peningkatan realisasi pajak dan DBH bukan pajak memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan belanja modal. Belanja modal yang tepat berkontribusi pada perbaikan infrastruktur dan penguatan basis perekonomian daerah.

**Tabel 1.4** Jumlah Belanja Modal Provinsi di Sumatera

Provinsi	Realisasi Belanja Modal (Milyar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
ACEH	1.755,47	2.199,33	2.868,71	1.676,03
SUMATERA UTARA	1.497,94	1.141,20	1.776,12	2.629,55
SUMATERA BARAT	736,89	666,35	941,07	952,72
RIAU	919,25	1.018,46	1.508,53	2.082,95
JAMBI	642,7	449,69	906,8	1.031,00
SUMATERA SELATAN	1.664,70	1.836,83	1.536,37	1.239,94
BENGKULU	417,1	324,34	417,02	586,89
LAMPUNG	752,53	849,69	1.025,33	1.207,38
KEP. BANGKA BELITUNG	436,5	428,65	354,01	566,22
KEP. RIAU	586,61	338,33	552,16	618,88

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024*

Berdasarkan data belanja modal Sumatera, realisasi belanja modal Sumatera bervariasi pada tahun 2020 hingga 2023. Beberapa provinsi seperti Riau dan Jambi, mengalami peningkatan belanja modal dari tahun ke tahun. Provinsi Riau mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp.919,25 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.2.829,5 miliar pada tahun 2023, sedangkan Provinsi Jambi meningkat dari Rp.642,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.1.031,00 miliar pada tahun 2023. Peningkatan belanja modal yang dimaksud terutama mencakup investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, belanja modal juga dapat mencakup pengadaan peralatan dan sarana pendukung layanan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun fluktuasi atau penurunan juga terjadi di provinsi lain, seperti Aceh dan Sumatera Selatan. Misalnya di Aceh, jumlahnya meningkat dari Rp.1.755,47 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.2.868,71 miliar pada tahun 2022, namun kemudian menurun tajam menjadi Rp.1.676,03 miliar. Di Provinsi Sumatera Selatan, belanja modal juga mengalami penurunan pada tahun 2020 dari Rp. 1.664,7 miliar dan pada tahun 2023 menjadi 1.239,94 miliar rupiah.

Ada perbedaan besar dalam belanja modal antar Provinsi. Misalnya saja Aceh dan Sumatera Selatan yang memiliki belanja modal tertinggi pada tahun 2020, masing-masing sebesar Rp.1.755,47 miliar dan Rp.1.664,7 miliar. Sedangkan penanaman modal terendah terdapat di Pulau Bengkulu dan Kepulauan Bangkabelitung, masing-masing sebesar Rp.417,1 miliar dan Rp.436,5 miliar. Belanja modal dapat menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan belanja modal yang tepat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan infrastruktur dan memperkuat basis perekonomian daerah.

Salah satu elemen penting dalam perancangan dan implementasi kebijakan pembangunan adalah belanja modal. Belanja modal mencakup investasi pemerintah pada infrastruktur dan proyek pembangunan jangka panjang. Melalui belanja modal, pemerintah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, produktivitas, dan

daya saing daerah, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil perpajakan, dan dana bagi hasil bukan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Sumatera melalui belanja modal. Sehubungan dengan hal tersebut maka judul penelitian ini adalah ‘‘Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening’’.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

- 1) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi di Sumatera?
- 2) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak melalui Belanja Modal sebagai variabel *Intervening* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi di Sumatera.
- 2) Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak melalui Belanja Modal sebagai variabel *Intervening* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bahwa hasilnya akan memberikan pemahaman teoritis dan praktis yang berharga.

## 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai hal ini di kalangan akademisi dan organisasi dengan mengkaji pengaruh pendapatan daerah, dana bagi hasil perpajakan, dan dana bagi hasil bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera. Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana belanja modal berfungsi sebagai mediator antara kedua faktor tersebut. Dari hasil penelitian ini, perusahaan-perusahaan tersebut akan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Dapat menjadi referensi bagi bidang keilmuan terkait merupakan salah satu manfaatnya.

## 2. Manfaat Praktis

Mengkaji dampak pendapatan daerah, dana bagi hasil perpajakan, dan dana bagi hasil bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera menjadi tujuan utama penelitian ini. Variabel intervening yang dapat mencapai hal tersebut adalah belanja modal. Penekanan utama di sini adalah pemeriksaan terhadap keterkaitan antara tiga dana bagi hasil yang berbeda. Selain itu, buku ini berfungsi sebagai sumber daya bagi pembaca yang mempunyai minat terhadap subjek ini dan ingin mendalaminya lebih dalam. Sebab, hal tersebut berfungsi sebagai acuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teoritis**

##### **2.1.1 Konsep Keuangan Daerah**

Pemerataan sumber daya ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, dan terjaganya stabilitas perekonomian merupakan komponen keuangan daerah. Komponen-komponen ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Keuangan daerah tidak mungkin dipisahkan dari keuangan negara karena merupakan komponen integral dari belanja negara. Pentingnya keuangan daerah semakin meningkat karena terbatasnya ketersediaan pembiayaan bersubsidi dan dukungan bagi daerah. Mengingat rumitnya permasalahan di wilayah ini, penting bagi masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam mencari solusi. Kawasan ini kini menghadapi sejumlah tantangan. Kesiapan suatu daerah dalam mewujudkan otonomi yang lebih nyata dan akuntabel dapat ditingkatkan melalui penerapan fungsi keuangan daerah.

Keuangan daerah mencakup hak, tanggung jawab, aset, dan nilai moneter yang terkait dengan suatu daerah tertentu. Keuangan daerah merupakan nilai total seluruh aset tersebut jika digabungkan. Yang dimaksud “keuangan daerah” dalam Halim dan Kusufi (2014) adalah mencakup seluruh hak dan kewajiban yang bernilai moneter, serta aset moneter dan nonmoneter yang berpotensi meningkatkan kekayaan daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2014) dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “keuangan daerah” adalah semua aset di daerah yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang. Selain itu, apabila digunakan kata “keuangan daerah”, apa maksudnya jika disebutkan “hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menyediakan sumber daya yang memadai bagi daerah merupakan hal yang penting untuk menjamin bahwa pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dalam kerangka otonomi daerah. Kemungkinan memperoleh sumber daya keuangan, seperti pembiayaan pemerintah dengan tugas khusus yang didelegasikan, pengumpulan dan penggunaan pajak dan retribusi daerah, bagi hasil dari ekstraksi sumber daya alam daerah, pengelolaan aset, dan akuisisi. Bagian penting dari hak

sumber daya keuangan mencakup berbagai cara yang sah untuk menghasilkan uang dan cara membiayainya. Daerah tertentu memerlukan keistimewaan tertentu.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **2.1.2. Konsep dan Teori Penerimaan dan Pengeluaran Negara**

Pasal 17 UU RI Tahun 2003 mendefinisikan tentang penerimaan negara. penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Jenis-jenis sumber pendapatan negara (pemerintah pusat) meliputi:

1. Penerimaan dalam negeri yang meliputi:
  - a. Seluruh pendapatan yang dihimpun terdiri dari penerimaan pajak, yang mencakup pajak-pajak yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri serta pajak-pajak perdagangan internasional.
    - 1) Pajak atas penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan lain-lain, dan pajak lainnya.
    - 2) Pajak perdagangan internasional, terdiri atas bea masuk, pajak ekspor, dan retribusi merupakan contoh berbagai bentuk pajak yang terkait dengan perdagangan internasional.
  - b. Pendapatan yang tidak dikenakan pajak,
    - 1) Kategori Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) tidak hanya mencakup pendapatan dari minyak dan gas (baik minyak bumi

maupun gas bumi), tetapi juga pendapatan dari sumber lain, seperti pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

- 2) Uang yang dihasilkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3) Jenis penerimaan negara yang ketiga disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (PNBP).

## 2. Hibah

Hibah adalah kontribusi swasta, baik dari individu di negara bagian atau pemerintah asing, menyediakan seluruh pendanaan negara. Disisi lain, Adolf Wagner mengemukakan pandangan bahwa pengeluaran pemerintah dan peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat akan cenderung meningkat seiring waktu. Gagasan inti dari teori ini adalah bahwa pemerintah mengambil peran yang lebih penting dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, ketika pendapatan per kapita naik, pengeluaran pemerintah juga cenderung meningkat. Hal ini sangat tepat karena pemerintah diharapkan mengawasi interaksi yang berkembang di masyarakat dan mengatur bidang-bidang seperti hukum, pendidikan, rekreasi, dan budaya. Mengenai hukum Wagner, ada beberapa penyebab yang bisa dikaitkan dengan peningkatan belanja pemerintah. Unsur-unsur tersebut terdiri dari perluasan fungsi terkait pertahanan, keamanan, dan ketertiban, meningkatkan kegiatan kesejahteraan, memperluas layanan keuangan, dan meningkatkan fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

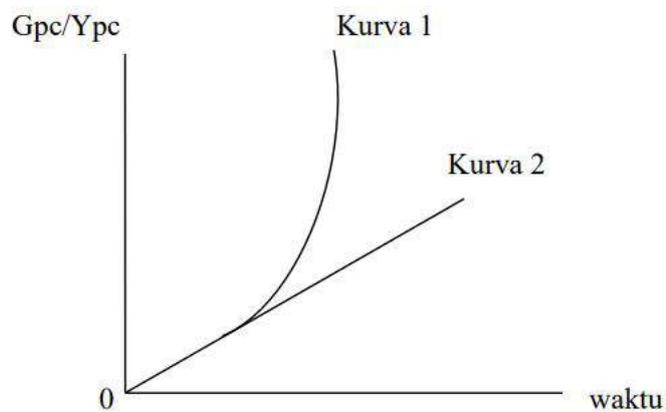
$$\frac{PPkP}{PPk1} > \frac{PkPPn}{PPk2} > \dots > \frac{PkPPn}{PPkn}$$

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ..., n : Jangka waktu (tahun)

Ide ini didasarkan pada teori organik negara yang dikembangkan Wagner. Sesuai dengan teori ini, pemerintah sebagai entitas yang memiliki kebebasan untuk bertindak secara independen dari entitas masyarakat lainnya.



**Gambar 1** Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner

Sebagai entitas yang memiliki kebebasan untuk bertindak secara independen dari entitas masyarakat lainnya. Sebagian dari total pengeluaran pemerintah digunakan untuk mendanai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin, sementara sebagian lainnya dialokasikan untuk mendukung kegiatan pembangunan atau pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah mencakup berbagai aspek, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan kepada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori lain, serta pengeluaran tak terduga.

Kebiasaan belanja pemerintah merupakan cerminan dari kebijakannya. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan pembelian produk dan jasa, pengeluaran mewakili biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program-program tersebut. Ada tiga kebijakan anggaran berbeda yang membentuk kerangka kebijakan fiskal: berimbang, surplus, dan defisit. Berikut revisi rencana APBN yang diajukan Suminto (2004):

- 1) Belanja pemerintah pusat
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja barang
  - c. Belanja Modal
  - d. Angsuran bunga utang

- e. subsidi
  - f. Belanja hibah
  - g. Bantuan sosial
  - h. Belanja lain-lain
- 2) Belanja untuk daerah

### **2.1.3 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran daerah merupakan peran penting dalam perencanaan dana publik untuk penyediaan layanan. Peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk menjamin rancangan dan pelaksanaan APBD yang tepat dan efisien. Undang-undang harus mencakup metode dan strategi penganggaran yang harus ditaati dengan disiplin dan jujur. Dokumen resmi yang menggambarkan anggaran daerah di Indonesia dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia. APBD mencakup anggaran provinsi, kota, dan kabupaten. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD diatur dalam pasal 1 ayat 14 UU No. 32 Tahun 2004. Strategi ini ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, APBD merupakan singkatan dari “Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah” Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah (RKTPD) yang telah dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan Peraturan Daerah, mengatur pengelolaan keuangan daerah untuk jangka waktu satu tahun anggaran dari 1 Januari hingga 31 Desember. Peraturan ini dipandu oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja operasional dan pemeliharaan, biaya konstruksi dan pengembangan, serta belanja administrasi umum merupakan 3 jenis belanja aparatur daerah yang utama. Departemen layanan publik sering kali menghabiskan anggarannya untuk administrasi umum, operasi

dan pemeliharaan, serta akuisisi modal. Salah satu cara untuk mengelompokkan pembiayaan adalah berdasarkan sumber pendanaannya, yang dapat dirinci menjadi sumber pendapatan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Ada beberapa contoh sumber pembiayaan yang berwujud pendapatan daerah. Jumlah tersebut mencakup jumlah surplus anggaran tahun lalu, pendapatan pinjaman obligasi, hasil penjualan aset daerah tertentu, dan dana yang ditransfer dari rekening cadangan. Pengeluaran pada proyek daerah meliputi pembayaran pokok utang, penanaman modal pada proyek, transfer dana cadangan, dan penggunaan sisa APBN tahun ini (Halim, 2004).

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah dana yang diperoleh suatu daerah melalui berbagai kegiatan ekonomi utama yang ada di wilayah tersebut. Menurut Mardiasmo (2021), sumber PAD meliputi pendapatan pajak daerah, retribusi, pendapatan dari badan usaha milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah tertentu, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Berdasarkan peraturan pemerintah, PAD merujuk pada dana yang diterima suatu daerah sebagaimana dijelaskan oleh Darise (2007).

PAD sesuai Pasal 1 Nomor 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, adalah dana yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dari sudut pandang ini, PAD mencakup dana yang diterima suatu daerah dari berbagai sumber lokal seperti pajak daerah, retribusi, pendapatan usaha milik daerah, dan hasil usaha individu di daerah tersebut. Semua ini dikelola sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Daerah, menurut UU Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 adalah seluruh hak daerah yang dihitung dari nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Uang yang diperoleh pemerintah daerah sebagai hasil menyelenggarakan usaha dan pelayanan kepada masyarakat atas nama pemerintah, serta memanfaatkan sumber daya daerah disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang mempunyai peranan penting dalam penentuan tersebut merupakan faktor

penting yang sangat menentukan mampu atau tidaknya setiap daerah dalam menjalankan kegiatan dan program yang telah dikembangkan oleh pemerintah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 yang diundangkan pada tahun 2004:

a. Pajak Daerah

Kontribusi keuangan yang signifikan dari individu atau entitas kepada suatu daerah sebagai pengganti imbalan langsung atau yang sebanding, didefinisikan sebagai “pajak daerah” berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1. Definisi ini telah diamanatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Iuran tersebut dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, guna mendukung pertumbuhan di berbagai wilayah dan memperluas jumlah wilayah yang tercakup.

b. Retribusi pada masing-masing daerah

Retribusi daerah merujuk pada biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas penyediaan layanan atau izin tertentu yang diberikan kepada individu atau organisasi. Pembayaran ini merupakan balasan atas layanan atau izin khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi yang termasuk dalam kategori ini mencakup berbagai macam pungutan, seperti retribusi pelayanan publik, retribusi pelayanan usaha, dan berbagai biaya perizinan.

Pengelolaan kekayaan daerah yang berbeda mencakup kelompok hasil berikut:

- 1) Bagian dari penghasilan yang diperoleh melalui penyertaan modal secara aktif pada BUMD
- 2) Bagian dari keuntungan tahunan yang diperoleh dari investasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 3) Sebagian keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham para peserta dalam usaha swasta atau usaha bersama

- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Sebaliknya, perhatikan contoh pendapatan asli daerah yang sah berikut ini:
- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari :
- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
  - 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - 3) Jasa giro
  - 4) Bunga deposito
  - 5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
  - 6) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
  - 8) Pendapatan denda pajak
  - 9) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
  - 10) Pendapatan dari pengembalian
  - 11) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
  - 12) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

## **2. Dana Perimbangan**

Pengalihan, pendelegasian, dan pelimpahan tanggung jawab pemerintahan kepada daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Setelah penerapannya, komponen-komponen ini harus seimbang secara finansial antara tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan harus ada

distribusi kendali, alokasi, dan penggunaan sumber daya nasional yang adil. Agar dapat otonom secara sah, pemerintahan dan layanan daerah harus dijalankan berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab.

Tujuan dari dana perimbangan, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Presiden 55 Tahun 2005 (Pemerintah Indonesia, 2005), adalah untuk mengurangi kesenjangan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Dana ini berasal dari APBN dan disalurkan ke seluruh daerah. Contoh dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Setiap jenis dana perimbangan memiliki tujuan yang berbeda untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Untuk meminimalkan kesenjangan keuangan dan memastikan bahwa pembangunan didasarkan pada keterampilan dan kebutuhan masing-masing daerah, penentuan DAU menekankan pada memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan jumlah pembiayaan yang sama (R. U. Harahap, 2011). Menurut Raviyanti dan Krishna (2017), penggunaan DAK sebagian besar terkonsentrasi untuk membayar program dan kegiatan tertentu yang berhubungan dengan pemerintah. Misalnya, pendanaan fasilitas pendidikan dan kesehatan ditanggung oleh DAK. Sementara itu, pemanfaatan DBH sebagai sarana pembiayaan belanja daerah berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Williantara dan Budiasih (2016), penyaluran DBH ditentukan dengan menentukan proporsi jatah APBN yang disalurkan.

#### **a. Dana Bagi Hasil**

Kuncoro (2004), pembagian uang bagi hasil dapat diselenggarakan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Tindakan ini diambil sebagai respons atas ketidakcukupan dana pajak yang menjadi persoalan. Menurut Suhadak dan Trilaksono (2007) menegaskan bahwa dana bagi hasil berasal dari pendapatan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana tersebut disebar antar daerah sesuai angka persentase yang telah ditentukan. dengan mempertimbangkan potensi daerah penghasil untuk menentukan distribusinya. Menurut Sumarsono (2010), penerimaan uang bagi hasil pajak ada kaitannya dengan proses penyusunan anggaran daerah yang dimasukkan dalam APBD. Dalam

rangka memprioritaskan dana untuk perbaikan struktur permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan, serta pembangunan jaringan transit irigasi, jalan, dan jembatan, hal ini dilakukan.

Dana bagi hasil merupakan bagian dari dana perimbangan yang mempunyai peranan penting yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Secara khusus, dana tersebut berfungsi sebagai dana tambahan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kemungkinan pemekaran daerah, dan berasal dari sumber pendapatan daerah yang prospektif. Ada tiga wadah uang bagi hasil yang disisihkan pemerintah sesuai Pasal 289 UU Republik Indonesia No.23 Tahun 2014. Sejumlah kelompok menerima uang tersebut. Beberapa dana tersebut diberi nama Dana Bagi Hasil Pajak, Cukai, dan Sumber Daya Alam (SDA). Teknik pembagian pendapatan didasarkan pada persentase, dan proporsinya ditentukan oleh daerah pembuat barang tersebut.

#### **a) Dana Bagi Hasil Pajak**

Dana bagi hasil berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak bumi dan Bangunan, Biaya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH pajak disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

##### **1. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan**

Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi dengan proporsi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Spesifikasi dana bagi hasil PBB adalah sebagai berikut, sebesar 90% untuk lokasi yang telah ditentukan:

- 1) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
- 2) 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
- 3) 9% untuk biaya pemungutan

Bagian pemerintah pusat 10% dari total diperuntukkan bagi semua kabupaten dan kota. Total keseluruhan alokasi untuk kabupaten dan kota mencapai 74,8 persen dari Dana Bagi Hasil PBB yang diterima. Alokasi untuk

kabupaten dan kota dari bagian pemerintah pusat (10%) ini dibagi lagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 6,5% tersebar merata di seluruh wilayah kota kabupaten dan kota. Pembagian ini dilakukan dengan tujuan agar kemampuan keuangan masing-masing daerah terdistribusi secara merata.
  - 2) Kabupaten dan kota yang berhasil mencapai atau melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan dalam realisasi pendapatan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya berhak menerima insentif sebesar 3,5%. Sebagian dari uang yang telah diperoleh digunakan untuk mendanai pembayaran ini. Untuk mendorong intensifikasi pemungutan PBB, perlu dipertimbangkan pemberian insentif.
2. Dana Bagi Hasil Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dua puluh persen pendapatan yang diperoleh suatu negara dari BPHTB diberikan kepada pemerintah, sedangkan delapan puluh persen dari seluruh pendapatan tersebut dibagi ke berbagai daerah di negara tersebut. Alokasi keenam belas persentil DBH BPHTB yang merinci enam puluh empat persen (64 %) untuk kabupaten atau kota serta enam belas persen (16 %) untuk provinsi, telah disetujui dengan semua faktor dipertimbangkan. Setiap kabupaten dan kota akan menerima dua puluh persen (20%) dari total saham pemerintah. Sebelum menetapkan alokasi DBH PBB, penting untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap rencana penerimaan PBB dan BPHTB pada tahun anggaran yang bersangkutan. Selambat-lambatnya dua bulan sebelum bulan diterimanya laporan anggaran yang berlaku, proses ini harus diselesaikan. Kita harus menyelesaikan proses ini pada tenggat waktu ini.

3. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran merupakan hal yang lazim dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Pedoman Pajak Penghasilan. Upaya dilakukan untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak bagi wajib pajak, mengingat jumlah terutang harus dibayar dalam waktu

satu tahun. Uang ini harus dibuat secara penuh dan tidak dapat ditahan dengan cara apapun selain secara langsung. Sebagaimana tercantum dalam Struktur Tahunan Pajak Penghasilan, Pasal 29 berkaitan dengan kekurangan pembayaran pajak penghasilan. Sesuatu yang berkaitan dengan pajak penghasilan sedang menjadi masalah di sini. Yang dimaksud dengan “yang dimaksud” dalam konteks ini adalah sisa pajak penghasilan selama 25 tahun pajak yang bersangkutan, setelah diterapkan kredit pajak penghasilan dan pasal 25 Kitab Undang-undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pajak yang dikenakan atas gaji, honorarium, tunjangan, dan imbalan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan atau pekerjaan, serta atas kegiatan dan jasa yang diberikan oleh orang pribadi yang wajib membayar pajak penghasilan dalam negeri disebut Penghasilan. Pajak Pasal 21, Penghasilan, Honorarium dan Tunjangan.

#### **b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**

Banyak sektor yang memberikan dukungan keuangan yang diperlukan untuk memperoleh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Hal ini mencakup berbagai macam usaha, termasuk usaha yang bergerak di bidang kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, panas bumi, dan ekstraksi gas alam.

##### **1. Sumber Daya Alam Kehutanan**

Dana yang digunakan sebagai bagi hasil penjualan sumber daya alam yang digunakan dalam proyek kehutanan antara lain adalah Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Sumber Daya Hutan Provinsi (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). Untuk beberapa daerah, 40% DBH kehutanan berasal dari IIUPH, untuk provinsi yang bersangkutan sebesar 16%, dan untuk kabupaten dan kota penghasil sebesar 64%. Delapan puluh persen DBH kehutanan daerah berasal dari PSDH. Dari jumlah tersebut, enam belas persen berasal dari provinsi yang bersangkutan, tiga puluh dua persen dari kabupaten dan kota penghasil, dan tiga puluh dua persen dari kabupaten dan kota lain di wilayah tersebut. DBH hutan yang dipungut dari PSDH kemudian didistribusikan secara merata ke seluruh kabupaten dan kota di provinsi yang

menjadi pertimbangan. Diperkirakan sekitar empat puluh persen DBH Kehutanan yang bersumber dari DR dialihkan ke daerah-daerah dan kota-kota penghasil guna mendanai inisiatif-inisiatif yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan.

## 2. Pertambangan Umum

Ada tiga jenis biaya yang berkontribusi terhadap bagi hasil pertambangan umum: biaya eksplorasi, biaya eksploitasi, dan biaya tetap. Provinsi tersebut menyumbang 16% dari total DBH pertambangan umum, sedangkan kabupaten atau kota penghasil sebesar 32% dan kabupaten atau kota lain dalam satu wilayah yang sama menyumbang 32%. Beberapa kabupaten atau kota memberikan kontribusi sebesar 80% dari total tersebut.

DBH pertambangan umum, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan umum yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% untuk provinsi yang bersangkutan DBH pertambangan umum sebesar 80% yang berasal dari wilayah provinsi dengan rincian, 26% untuk provinsi yang bersangkutan dan 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan umum dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

## 3. Perikanan

Dana bagi hasil Perikanan berasal dari pungutan Pengusahaan Perikanan dan Peungutan Hasil Perikanan. DBH Perikanan untuk daerah adalah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten kota/kota.

## 4. Pertambangan Minyak Bumi

Dana bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15% dengan rincian, 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6%

dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak Bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,2% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak Bumi dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15% dibagi dengan rincian, 5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 10% dibagikan untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

#### 5. Pertambangan Gas Bumi DBH

Pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH pertambangan gas bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian, 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil dan 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi dibandingkan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian, 10% dibagikan

untuk provinsi yang bersangkutan dan 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,33% dibagikan ke seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

#### 6. Pertambangan Panas Bumi

Eksplorasi sumber daya alam melalui penambangan panas bumi menghasilkan penerimaan negara bukan pajak. Pemerintah federal menerima bagian 20%, sedangkan masing-masing daerah menerima 80%. Di sini kita bisa melihat berapa besar pendapatan yang dihasilkan masing-masing daerah. Di antara sekian banyak sumber DBH yang bisa ditawarkan oleh usaha pertambangan panas bumi adalah:

##### 1) Setoran bagi pemerintah

Keuntungan negara dari pengusaha panas bumi digunakan untuk penghematan oleh pemerintah. Setelah pajak dan retribusi lainnya dipotong sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan, uang tersebut diperoleh dari pengusaha panas bumi. Perjanjian yang mendasari penimbunan tersebut merupakan kontrak padat panas bumi yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

##### 2) Iuran tetap dan iuran produksi Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara.

Berikut penjelasan lengkap bagaimana pertambangan panas bumi di kawasan itu menghasilkan DBH sebesar 80%:

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 32% untuk daerah dan kota yang memproduksi barang, dan
- 3) 32% untuk setiap kota dan kabupaten lain di provinsi yang dipertimbangkan, dengan rincian pastinya bergantung pada persentase yang bersangkutan.

Penambangan panas bumi menghasilkan pendapatan melalui dua kategori biaya: biaya tetap dan biaya produksi. Pembiayaan pengeluaran tersebut bersumber dari kontrak perusahaan panas bumi yang diadakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

#### **2.1.4 Variabel Intervening**

Menurut Ghozali (2016), variabel intervening adalah variabel yang berfungsi sebagai penghubung atau mediator antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks penelitian, variabel ini berperan untuk menjelaskan atau memediasi pengaruh yang terjadi antara variabel independen (yang merupakan penyebab) dan variabel dependen (yang merupakan akibat). Dengan kata lain, variabel intervening membantu memperjelas mekanisme atau proses bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen melalui perantaraannya. Adapun variabel intervening dalam penelitian ini adalah belanja modal, yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.5 Konsep Belanja Daerah**

Yang dimaksud dengan “belanja daerah” adalah setiap dan seluruh belanja yang menguras ekuitas dana yang ada dan keluar dari rekening Kas Umum Daerah. Tidak ada pengembalian investasi bagi daerah, dan merupakan kewajiban daerah yang harus dikembalikan dalam waktu satu tahun anggaran. Belanja daerah provinsi atau kabupaten/kota atau kota adalah uang yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada dua jenis urusan yang termasuk dalam kategori ini: urusan wajib dan urusan pilihan. Badan legislatif memutuskan dua kategori masalah ini.

Dalam memutuskan pengalokasian dana antar daerah, beberapa faktor dipertimbangkan, antara lain struktur organisasi, fungsi, program dan kegiatan,

kelompok pembelian, dan kategori belanja. Kategorisasi pengeluaran menurut kelompok pembelanja mencakup bentuk belanja langsung dan tidak langsung.

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja pegawai</li> <li>b. Bunga</li> <li>c. Subsidi</li> <li>d. Hibah</li> <li>e. Bantuan sosial</li> <li>f. Belanja bagi hasil</li> <li>g. Bantuan keuangan</li> <li>h. Belanja tidak terduga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja pegawai (honorarium dan upah)</li> <li>b. Belanja barang dan jasa</li> <li>c. Belanja modal</li> </ul>

Pengeluaran yang dianggarkan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya dikenal dengan belanja tidak langsung. Semua biaya yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan termasuk dalam kategori ini. Pengeluaran yang dianggarkan yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan disebut sebagai kategori belanja langsung.

Menurut peraturan perundang-undangan yang telah diserahkan kepada DPRD, belanja pegawai meliputi pengeluaran untuk gaji pegawai, yang dapat berupa manfaat moneter atau keuntungan materiil yang nyata, manfaat ini bisa bersifat intangible maupun nyata. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, pegawai pemerintah daerah menerima imbalan tersebut, baik bekerja di dalam maupun di luar daerah. Satu-satunya pengecualian terhadap hal ini adalah tenaga kerja yang terikat pada produksi modal. Ada beberapa jenis kompensasi yang termasuk dalam kategori ini, termasuk gaji, tunjangan, honorarium, uang lembur, kontribusi sosial, dan banyak lagi.

Sebaliknya, Belanja jasa dan barang adalah proses pertukaran uang untuk produk dan jasa yang dapat dikonsumsi dengan tujuan menciptakan komoditas dan jasa tersebut. Perlengkapan kantor, layanan pemeliharaan, dan biaya perjalanan bisnis hanyalah beberapa contoh dari banyak barang dan layanan yang dapat dibeli.

Investasi pada aset tetap dievaluasi sesuai dengan standar pengelolaan anggaran daerah yang dituangkan dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pembuatan, atau pembangunan aset tetap berwujud mempunyai pengaruh nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Aset tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Anggaran Belanja modal inilah yang digunakan untuk pembayaran jenis ini. Dalam satu tahun anggaran, belanja daerah diartikan sebagai “seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi penyaluran dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, dan tidak akan dibayar kembali oleh daerah” (Mahsun, 2011). Konteks belanja di tingkat daerah memberikan definisi ini. Pengeluaran di lokasi berbeda berdampak pada penyaluran dana.

Sebagaimana digunakan di atas, “belanja modal” mengacu pada uang yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah yang akan memberikan dividen selama lebih dari 1 tahun fiskal. Kekayaan atau aset daerah akan meningkat akibat belanja tersebut, dan belanja administrasi umum, termasuk biaya pemeliharaan, juga akan meningkat (Halim, 2004). Laporan Realisasi APBD yang berisi rincian belanja modal yang dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten dan Kota dapat diperoleh dengan mengunduhnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ghozali (2008), berikut adalah berbagai jenis pengeluaran yang terkait dengan investasi modal yang besar:

- a. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda
- b. Pengeluaran telah melampaui batas minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya.
- c. Membeli aset tetap bukan berarti bermaksud menjualnya di kemudian hari.

### **2.1.6 Konsep dan Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama semua negara di dunia. Ini karena pertumbuhan ekonomi mendorong pembangunan dan dengan terjadinya

proses pembangunan berarti kehidupan penduduk suatu negara dapat menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, para akademisi menaruh perhatian besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk mempelajari konsep pertumbuhan ekonomi. Ada pendekatan yang melibatkan pengembangan kerangka teoritis dari fungsi produksi. Namun, belakangan ini sebagian besar studi menggunakan pendekatan yang melibatkan tinjauan tingkat awal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indikator-indikator penting tertentu (Thach et al., 2017).

Ekonom klasik seperti Smith, Malthus, dan Ricardo, bersama dengan yang lainnya, berperan penting dalam pembangunan dasar teori pertumbuhan ekonomi modern. Para ekonom ini tertarik dengan perkembangan kapitalisme dan berusaha menjelaskan mekanisme yang mendasari kemajuan dalam sistem ekonomi baru tersebut. Menurut Harris (2007), gagasan utama yang dianut oleh para ekonom klasik adalah bahwa akumulasi modal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, para ekonom klasik memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi akumulasi modal sebagai pendorong kemajuan perekonomian.

Di sisi lain, ekonom neoklasik seperti Solow dan Swan memperluas kerangka teori yang telah dikembangkan oleh para ekonom klasik. Solow dan Swan mengidentifikasi modal, tenaga kerja, dan teknologi sebagai kekuatan pendorong di balik pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, model Solow memiliki dua kelemahan utama. Pertama, model ini mengasumsikan bahwa kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen, tidak mempertimbangkan pengaruh internal atau eksternal. Kedua, model ini mengabaikan intervensi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi.

Sebagai respons terhadap kelemahan-kelemahan ini, muncul model pertumbuhan endogen, di antaranya adalah model pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Mankiw, Romer, dan Weil (MRW). Model ini mengakui peran penting dari faktor internal dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, termasuk peran pemerintah dalam merangsang perkembangan teknologi dan akumulasi modal.

Menurut Simon Kuznet, ketika suatu negara berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, yang dimaksudnya adalah negara tersebut dapat memperluas jumlah komoditas ekonomi yang dapat diberikan kepada penduduknya. Demikian definisi pertumbuhan ekonomi yang diutarakan Kuznet dalam paparannya. Peningkatan kemampuan ini merupakan hasil dari perkembangan teknologi dan institusi, serta penyesuaian ideologi yang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan tersebut (Talangamin dan Koleangan 2018).

Perkembangan kegiatan dalam perekonomian dapat dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi. Berbagai macam barang dan jasa tercipta sebagai hasil dari kemajuan ini. Salah satu definisi "pertumbuhan ekonomi" adalah suatu proses yang terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran seberapa efektif kemajuan pembangunan. Pemerintah termotivasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini melibatkan pengembangan kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat lokal untuk memungkinkan masyarakat menciptakan peluang kerja baru dan dengan demikian berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian lokal. Informasi yang disajikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan representasi visual dari ekspansi perekonomian yang terjadi di suatu wilayah tertentu.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun literatur-literatur yang dapat menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Hasil Penelitian Sebelumnya

NO.	PENELITI	JUDUL	MODEL / VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1.	Venny Tria Vanesha, Selamet Rahmadi, Parmadi (2019)	“Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada	Regresi data panel / PAD, DAU, DAK, Belanja Modal	Hasil penelitian membuktikan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal secara bersamaan. Namun secara parsial hanya DAU yang

NO.	PENELITI	JUDUL	MODEL / VARIABEL	HASIL PENELITIAN
		kabupaten/kota di Provinsi Jambi”		berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
2.	Kurniawati, Muzdalifah (2022)	“Pengaruh PAD dan DAU melalui Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018)”	Persamaan Simultan metode Two-Stage Least Square (TSLS) / PAD, DAU, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian tahap 1 menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal secara simultan, namun PAD tidak berpengaruh secara parsial. Penelitian tahap 2 menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi baik secara simultan maupun parsial.
3.	Darwin Marasi Purba, Yansen Siahaan, Rizki Ahmad Fauzi (2020)	“Pengaruh DBH Pajak dan Bukan Pajak, terhadap APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2010-2017”	Regresi data panel / DBH Pajak, APBD	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap APBD Kota Bogor. Namun, secara parsial, Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan, sementara Dana Bagi Hasil bukan Pajak tidak berpengaruh signifikan.
4.	Maryani, Zamzami, Erni Achmad (2023)	“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007-2021”	Regresi Analisis Jalur / Pertumbuhan Ekonomi, Pajak, Retribusi, DAU, Belanja Modal	Penelitian menunjukkan bahwa gabungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2007-2021). Namun, secara simultan, faktor-faktor ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, baik langsung

NO.	PENELITI	JUDUL	MODEL / VARIABEL	HASIL PENELITIAN
				maupun melalui Belanja Modal.
5.	Amelia Agustin (2021)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi”	Regresi data panel / PAD, DAU, DBH, Belanja Modal	Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Bagi Hasil (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dengan t hitung masing-masing 0,19 dan 1,32 serta probabilitas lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan t hitung 2,39 dan probabilitas 0,024.
6.	Abdul Mafahir, Aris Soelistiyo Abstract (2017)	“Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat”	Data panel /PAD, DAU dan DAK terhadap PDRB	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan dan bersifat negatif dengan nilai probabilitas 0.131; 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai probabilitas 0.0003; 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan dengan nilai Probabilitas 0.1600.
7.	Azizah, Sirojuzilam, Khaira Amalia Fachrudin (2022)	“Analysis Of The Effect Of Regional Original Income And Fund Transfers On City Government Economic Growth In North Sumatra Province”	Data panel / Pendapatan daerah, dana transfer, pertumbuhan ekonomi pemerintah kota	Hasil hipotesis menunjukkan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000000, yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Ini mendasari diterimanya Ha, yang menyatakan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

NO.	PENELITI	JUDUL	MODEL / VARIABEL	HASIL PENELITIAN
8.	Pungky Siswiyanti (2015)	“Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening”	Regresi analisis jalur / PAD, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal	Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK berpengaruh negatif. Selain itu, Belanja Modal dapat berfungsi sebagai variabel intervening dalam hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi.
9.	Rahayu Intan Lestari, Prayitno Basuki (2024)	“The Effect of Economic Growth, Local Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Profit Sharing Fund on Capital Expenditure of The NTB Provincial Government”	Data panel / Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertumbuhan Ekonomi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Belanja Modal, (2) PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, (3) DAU juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, (4) DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan (5) DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu, variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Dana juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, namun variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan.
10.	Lisandri, Fahmi Rizani, Akhmad Yafiz Syam (2017)	“Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja	Regresi analisis jalur / PAD, DAU, Pertumbuhan Ekonomi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. DAU berpengaruh signifikan

NO.	PENELITI	JUDUL	MODEL / VARIABEL	HASIL PENELITIAN
		Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan”	Belanja Modal	terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh total DAU terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal adalah 36%, di mana pengaruh tidak langsungnya lebih besar (82%) daripada dampak langsungnya (28%), menunjukkan bahwa belanja modal berperan sebagai variabel intervening yang signifikan.
11.	I Gusti Agung Ayu Prami Saraswati, Sudarsana Arka (2016)	“Pengaruh PAD dan DAU terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”	Regresi Analisis Jalur / PAD, DAU, Tingkat Kemiskinan, Belanja Modal	Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, sementara keduanya juga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Belanja modal juga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Melalui belanja modal, PAD Dan DAU berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan, menjadikan belanja modal sebagai variabel intervening dari kedua faktor tersebut.
12.	Agus Salim (2019)	“Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Inflasi terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening”	Regresi berganda / PAD, Dana Perimbangan, Inflasi, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta belanja modal. Namun, inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan realisasi belanja modal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi

NO.	PENELITI	JUDUL	MODEL / VARIABEL	HASIL PENELITIAN
				juga berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal, yang selanjutnya mempengaruhi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Inflasi juga berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi.
13.	Olvia Olsan Angreany (2021)	“Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”	Regresi analisis jalur/ PAD, DAU, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, serta Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar $0,000 < 0,05$ .
14.	Rahmat Daim Harahap, Muhammad Ikhsan Harahap, Meilya Evita Syari (2019)	“Pengaruh DAU dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening”	Regresi Linier Berganda / DAU, PAD, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, Belanja Daerah dapat memediasi hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi.
15.	Nursita Wulandari Lutpikah, Denny Mahendra (2020)	“Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar	Regresi Linear Berganda / PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan

NO.	PENELITI	JUDUL	MODEL / VARIABEL	HASIL PENELITIAN
		Tahun 2017-2019”		signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.
16.	Helmy Budiman, Arifuddin, Madris, Sabir (2022)	“The Effect of Regional Original Income, Special Allocation Funds and General Allocation Funds on Economic Growth in Makassar City for the 2010–2021 Period”	Regresi Linear Berganda / Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Khusus Dana, Dana Alokasi Umum	Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Makassar, sementara dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan, ketiga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menegaskan pentingnya pendapatan asli daerah bagi perekonomian Makassar.

Berbeda dengan penelitian Amelia Agustin (2021), penelitian ini menggunakan teknik analisis yang unik. Amelia Agustin (2021) menggunakan model regresi data panel untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih faktor prediktor terhadap variabel respon. Data panel menyediakan struktur data yang ideal. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara tidak langsung melalui komponen intervening. Tidak hanya itu, penelitian dilakukan di lokasi berbeda dan menggunakan variabel yang berbeda.

Perbedaan penelitian Angreany (2021) terletak pada variabel yang diteliti dan lokasi penelitiannya. Namun, kesamaannya adalah penggunaan model regresi dengan analisis jalur (path analysis) untuk memahami hubungan kompleks antara

variabel independen dan dependen, serta mengidentifikasi jalur-pengaruh tidak langsung melalui variabel intervening. Ini menunjukkan bahwa meskipun fokus dan lokasi penelitian berbeda, metodologi yang digunakan tetap memiliki elemen analisis yang serupa.

## **2.3 Hubungan Antar Variabel**

### **2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sidik et al (2002), menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengembangkan ekonominya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara global baik di daerah maupun secara nasional. Senada dengan Brata (2004) yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan perkapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.

### **2.3.2 Hubungan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana Bagi Hasil pajak memiliki peran dan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama ketika alokasi dana dari bagi hasil pajak digunakan untuk investasi dalam membangun infrastruktur dan layanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan (Martinez-Vazquez et al., 2019). Dengan demikian, pengelolaan dana bagi hasil pajak yang baik dapat menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

### **2.3.3 Hubungan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana Bagi Hasil bukan pajak yang tepat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi infrastruktur. Infrastruktur yang baik dapat membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas, dimana semuanya memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

(Shah, 2007). Dana Bagi Hasil bukan pajak yang dikelola dengan baik dan benar akan membantu mengurangi ketimpangan regional dengan memperkuat ekonomi daerah yang kurang berkembang Bird dan Smart (2002). Oleh karena itu, pengelolaan Dana Bagi Hasil bukan pajak dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

#### **2.3.4 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Peran yang sangat signifikan dalam membiayai kegiatan pembangunan di suatu daerah dipegang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belanja pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah dilakukan melalui belanja modal, yang jumlahnya ditentukan oleh besarnya pendapatan asli daerah yang berhasil dihimpun (Halim, 2007). Peningkatan PAD memiliki potensi untuk meningkatkan belanja modal, dan secara tidak langsung, hal tersebut akan berpengaruh positif pada pelayanan publik yang diberikan (Nuarisa, 2013).

#### **2.3.5 Hubungan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal**

Dana Bagi Hasil pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap belanja modal suatu daerah. Peningkatan dana bagi hasil pajak dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah (Shah 2007). Alokasi dana bagi hasil pajak yang tepat dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah dalam belanja modal (Martinez-Vazquez et al., 2019). Hal ini dapat terjadi karena dana bagi hasil pajak dapat memberikan sumber pendanaan tambahan yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala keuangan dalam pembiayaan belanja modal. Oleh karena itu, dana bagi hasil pajak dapat berperan penting dalam mendukung belanja modal pemerintah daerah.

#### **2.3.6 Hubungan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal**

Alokasi Dana Bagi Hasil bukan pajak yang tepat dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah dalam belanja modal. Hal ini dapat terjadi karena DBH bukan pajak dapat memberikan sumber pendanaan tambahan yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala keuangan dalam pembiayaan belanja modal. Dengan demikian, DBH bukan pajak dapat berperan penting dalam mendukung belanja modal pemerintah daerah.

### **2.3.7 Hubungan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Peningkatan pelayanan sektor publik yang berkelanjutan dilengkapi dengan perbaikan fasilitas umum dan investasi yang dilakukan pemerintah. Perbaikan tersebut meliputi peningkatan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Untuk mencapai pembangunan ekonomi, penting untuk mencapai keseimbangan antara penyediaan modal pembangunan dan perluasan produk domestik bruto atau produk regional domestik bruto. Menurut Ismerdekaningsih dan Rahayu (2002), pembentukan modal ini perlu dimaknai secara komprehensif, dengan mempertimbangkan seluruh pengeluaran yang berpotensi meningkatkan produktivitas.

Dalam mengalokasikan dan meningkatkan investasi di daerah, perencanaan belanja modal daerah memainkan peran penting. Hal ini bergantung pada proporsi belanja modal yang diberikan untuk pembangunan di sektor-sektor yang produktif di daerah. Oleh karena itu, sektor-sektor produktif tersebut akan memberikan manfaat dalam memperlancar siklus ekonomi dengan efek multiplier untuk masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan per kapita dalam siklus rumah tangga dan secara keseluruhan meningkatkan pendapatan per kapita di daerah.

### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi daerah dalam membangun infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah digunakan pemerintah untuk pembiayaan atas belanja daerah, semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya dan semakin baik alokasi PAD kedalam belanja modal akan meningkatkan proses pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

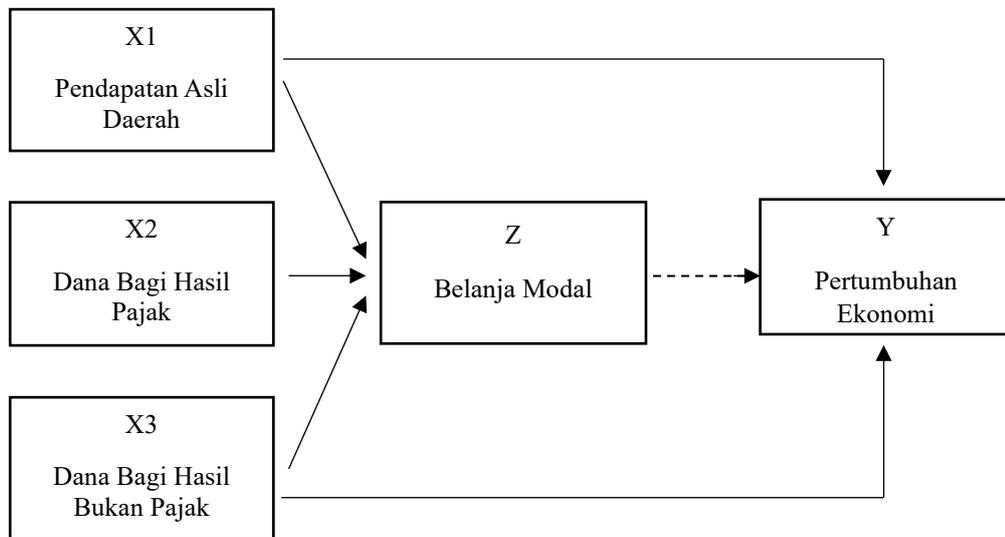
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (sumber daya alam). Bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH pajak berkaitan erat dengan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi karena alokasi dana yang adil dan efektif dapat mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dana bagi hasil pajak menjadi materi yang berkaitan dengan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi mengacu pada penggunaan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.

Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hasil pengelolaan sumber daya alam, pendapatan dari badan usaha milik daerah (BUMD), atau pendapatan bukan pajak lainnya. Sumber-sumber ini dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja modal. Penggunaan DBH bukan pajak untuk belanja modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tingkat pemerintah daerah, Belanja Modal tidak hanya bersifat otonom, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera melalui belanja modal. Pemahaman terhadap hubungan ini akan difokuskan pada peran kunci Belanja Modal sebagai variabel intervening yang memiliki dampak signifikan.

Gambar 2 menunjukkan kerangka pemikiran yang tersusun berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yakni Pendapatan Asli Daerah sebagai X1, Dana Bagi Hasil Pajak X2, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak X3, Belanja Modal sebagai Z, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Y.



**Gambar 2** Skematika Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Provinsi di Sumatera dalam periode tahun 2006-2023.
2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak berpengaruh positif melalui Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera dalam periode tahun 2006-2023.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data realisasi PAD Provinsi di Sumatera tahun 2006-2023, data realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi di Sumatera tahun 2006-2023, data realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi di Sumatera tahun 2006-2023, data laju PDRB Provinsi di Sumatera tahun 2006-2023, dan data realisasi Belanja Modal setiap provinsi Sumatera secara periodik, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *time series* tahunan selama 17 (tujuh belas) tahun yang mencakup tahun 2006–2023.

##### **3.1.2 Sumber Data**

Informasi data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari berbagai situs website yang relevan dengan topik tersebut, seperti:

- 1) Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan Belanja Modal periode 2006-2023 dirilis oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Republik Indonesia melalui <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd> dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di laman <https://www.bps.go.id/id>
- 2) Data Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku periode 2006-2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di laman <https://www.bps.go.id/id>

#### **3.2 Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur dapat digunakan untuk mengetahui hubungan langsung atau tidak langsung yang melibatkan variabel intervening. Peneliti menggunakan pengolahan data dengan menggunakan program Amos. Metode analisis data dalam penelitian ini

disesuaikan dengan rumusan masalah yang ingin dijawab, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu :

### **3.2.1 Uji Asumsi Klasik**

Prosedur pengujian asumsi klasik perlu dilakukan sebelum memulai analisis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model regresi memiliki kemampuan prediktif yang baik dan memenuhi asumsi klasik.

#### **a. Uji Normalitas**

Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji normalitas adalah sebuah uji data untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Dengan anggapan apabila suatu variabel tidak berdistribusi normal, maka dapat dikatakan suatu uji statistik mengalami penurunan. Salah satu metode untuk melakukan uji normalitas adalah dengan memanfaatkan nilai *Critical Ratio* (CR) pada *Assessment of Normality*. Dalam prosedur ini, nilai CR dihitung berdasarkan tingkat penyimpangan data dari distribusi normal. Hasil perhitungan nilai CR tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai kritis  $\pm 2,58$  pada tingkat signifikansi 0,01 (1%). Apabila nilai CR berada dalam rentang -2,58 hingga +2,58, maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai CR berada di luar rentang tersebut, data dianggap tidak berdistribusi normal pada tingkat kepercayaan 99%.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghozali (2016), uji multikolinearitas merupakan suatu uji untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Efek dari pengujian multikolinearitas adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut membuktikan standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

### 3.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018) analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Adapun persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

$b_1b_2b_3$  = Koefisien regresi variabel independen

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Bagi Hasil Pajak

X3 = Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

e = Standar Error

### 3.2.3 Uji Hipotesis

#### a. Uji F Statistik (Anova)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan (serempak) terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis menurut Sugiyono (2017) dapat digunakan rumus signifikan korelasi ganda sebagai berikut:

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Dk =  $(n-k-1)$  derajat kebebasan

Ketika hasil perhitungan ini dibandingkan dengan f tabel yang dihasilkan menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat risiko 5%, atau dengan derajat kebebasan  $n$  dikurangi  $k$  dikurangi 1, maka faktor-faktor berikut akan dipertimbangkan. Perhitungan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

Kriteria Uji :

- a) Jika  $f$  hitung  $>$   $f$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (berpengaruh)
- b) Jika  $f$  hitung  $<$   $f$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak berpengaruh).

**b. Uji t Statistik (Parsial)**

Uji statistik yang biasa disebut uji t sebenarnya memiliki beberapa nama berbeda. Nama lain untuk tes ini adalah tes signifikansi individual. Mencari tahu seberapa besar pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen adalah inti dari tes ini. Ujian dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:

$$t = \frac{r(\sqrt{n}-2)}{(\sqrt{1-r^2})}$$

Keterangan :

- t = Distribusi t
- n = Jumlah data
- r = Koefisien korelasi parsial
- $r^2$  = Koefisien determinasi

Ketika uji-t selesai, hasilnya akan dibandingkan dengan t-tabel dengan margin kesalahan 15% (atau dengan kata lain 0,15). Perbandingan ini akan dilakukan segera setelah perhitungan t selesai. Persyaratan berikut harus dipenuhi sebelum keputusan validitas hipotesis dapat dicapai:

- a) Dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen apabila t-estimasi yang dihasilkan dari t-tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Signifikan  $<$  0,15). Artinya terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika t-estimasi yang dihasilkan dari data atau probabilitas berada di bawah tingkat signifikan (Signifikan  $>$  0,15). Kurangnya perilaku penting dalam

variabel independen ditunjukkan di sini. Hal ini terjadi ketika probabilitas tidak mencapai tingkat signifikansi.

### 3.2.4 Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dapat dikatakan bahwa semakin besar koefisien determinasi ( $R^2$ ) (mendekati 1), maka pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin besar. Artinya model yang digunakan lebih baik dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya bila  $R^2$  menjadi kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) adalah kecil. Artinya model yang digunakan belum cukup kuat untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen.

Berikut adalah rumus koefisien determinasi baik secara parsial maupun simultan:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi

$R^2$  = Koefisien Korelasi

Untuk menjawab rumusan masalah kedua yang menggunakan analisis jalur yaitu :

### 3.2.5 Uji Asumsi Klasik

Prosedur pengujian asumsi klasik perlu dilakukan sebelum memulai analisis jalur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model regresi memiliki kemampuan prediktif yang baik dan memenuhi asumsi klasik.

#### a. Uji Normalitas

Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji normalitas adalah sebuah uji data untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak normal. Dengan anggapan apabila suatu variabel tidak berdistribusi normal, maka dapat dikatakan suatu uji statistik mengalami penurunan. Salah satu metode untuk melakukan uji normalitas adalah dengan memanfaatkan nilai *Critical Ratio* (CR) pada *Assessment of Normality*. Dalam prosedur ini, nilai CR dihitung berdasarkan tingkat penyimpangan data dari distribusi normal. Hasil perhitungan nilai CR tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai kritis  $\pm 2,58$  pada tingkat signifikansi 0,01 (1%). Apabila nilai CR berada dalam rentang -2,58 hingga +2,58, maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai CR berada di luar rentang tersebut, data dianggap tidak berdistribusi normal pada tingkat kepercayaan 99%.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghozali (2016), uji multikolinearitas merupakan suatu uji untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Efek dari pengujian multikolinearitas adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut membuktikan standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

#### **3.2.6 Analisis Jalur (*Path Analysis*)**

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Analisis utama yang dilakukan adalah untuk menguji konstruk jalur apakah teruji secara empiris atau tidak. Menurut Ghozali (2016) analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Analisis selanjutnya dilakukan untuk mencari pengaruh langsung dan tidak langsung dengan menggunakan korelasi dan regresi sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel dependen terakhir, harus lewat jalur langsung atau melalui variabel mediasi. Berikut langkah menguji analisis jalur sebagai berikut:

Persamaan jalur untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Model Sub Struktural 1

$$Z = P_{zx_1}X_1 + P_{zx_2}X_2 + P_{zx_3}X_3 + \mu \dots$$

Keterangan:

Z = Belanja Modal

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> = Dana Bagi Hasil Pajak

X<sub>3</sub> = Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

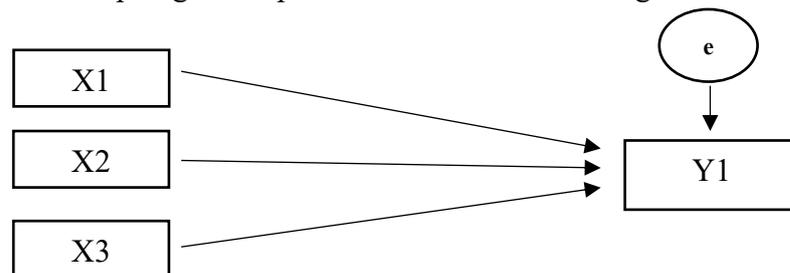
P<sub>zx<sub>1</sub></sub> = Koefisien jalur X<sub>1</sub> ke Z

P<sub>zx<sub>2</sub></sub> = Koefisien jalur X<sub>2</sub> ke Z

P<sub>zx<sub>3</sub></sub> = Koefisien jalur X<sub>3</sub> ke Z

μ = Tingkat Kesalahan

Adapun gambar persamaan struktural 1 sebagai berikut



**Gambar 3** Persamaan Struktural 1

2) Model Sub Struktural 2

$$Y = P_{yx_1}X_1 + P_{yx_2}X_2 + P_{yx_3}X_3 + P_{yx_4}X_4 + \mu \dots$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> = Dana Bagi Hasil Pajak

X<sub>3</sub> = Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

X<sub>4</sub> = Belanja Modal

P<sub>yx<sub>1</sub></sub> = Koefisien jalur X<sub>1</sub> ke Y

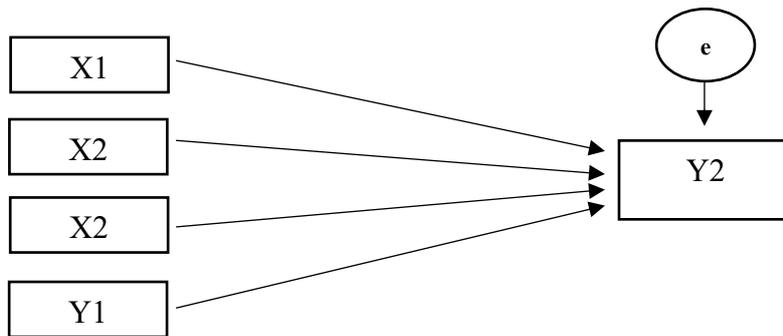
P<sub>yx<sub>2</sub></sub> = Koefisien jalur X<sub>2</sub> ke Y

P<sub>yx<sub>3</sub></sub> = Koefisien jalur X<sub>3</sub> ke Y

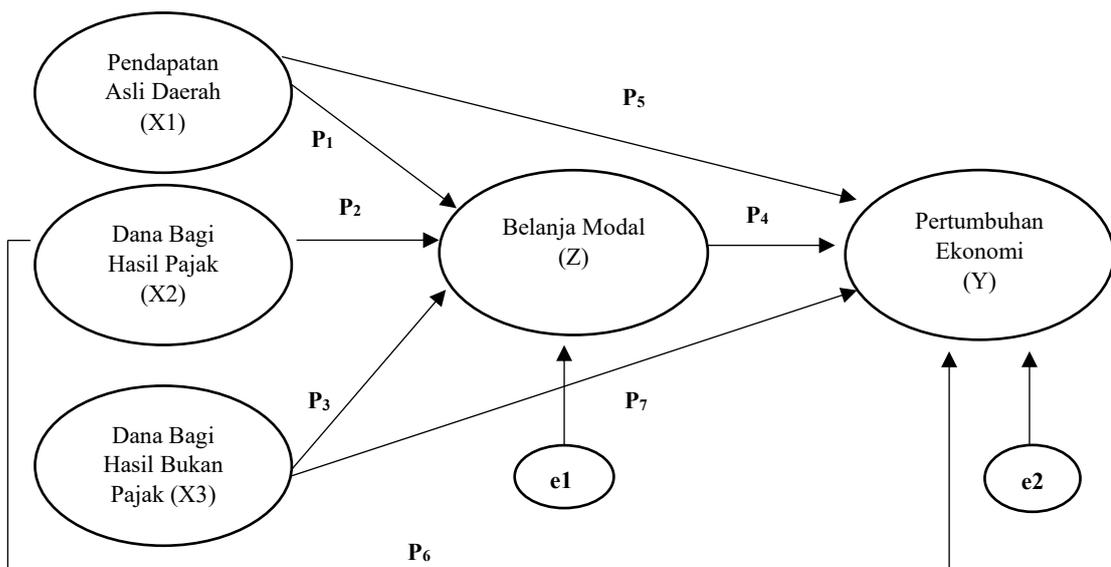
$P_{ZX_4}$  = Koefisien jalur  $X_4$  ke  $Y$

$\mu$  = Tingkat Kesalahan

Adapun gambar persamaan struktural 2 sebagai berikut



**Gambar 4** Persamaan Struktural 2



**Gambar 5** Model Diagram Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Berdasarkan pada gambar 3, model diagram analisis jalur (*path analysis*) dimana setiap nilai  $p$  dalam model analisis jalur menggambarkan jalur dan koefisien jalur.

- Pengaruh langsung  $X_1$  terhadap  $Y$  =  $P_5$   
 Pengaruh tidak langsung  $X_1$  terhadap  $Z$  =  $P_1 \times P_4$   
 Pengaruh Total korelasi  $X_1$  ke  $Z$  =  $P_5 + (P_1 \times P_4)$

- Pengaruh langsung X2 terhadap Y = P6  
 Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Z = P2 x P4  
 Pengaruh Total X2 ke Z = P5 + (P2 x P4)
- Pengaruh langsung X3 terhadap Y = P7  
 Pengaruh tidak langsung X3 terhadap Z = P3 x P4  
 Pengaruh Total X3 ke Z = P7 + (P3 x P4)

### 3.2.7 Uji Hipotesis

#### a. Uji F Statistik (Anova)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan (serempak) terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis menurut Sugiyono (2017) dapat digunakan rumus signifikan korelasi ganda sebagai berikut:

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

- R = Koefisien korelasi ganda
- k = Jumlah variabel independen
- n = Jumlah anggota sampel
- Dk = (n-k-1) derajat kebebasan

Ketika hasil perhitungan ini dibandingkan dengan f tabel yang dihasilkan menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat risiko 5%, atau dengan derajat kebebasan n dikurangi k dikurangi 1, maka faktor-faktor berikut akan dipertimbangkan. Perhitungan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

Kriteria Uji :

- a) Jika f hitung > f tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima (berpengaruh)
- b) Jika f hitung < f tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak berpengaruh).

#### b. Uji t Statistik (Parsial)

Uji statistik yang biasa disebut uji t sebenarnya memiliki beberapa nama berbeda. Nama lain untuk tes ini adalah tes signifikansi individual. Mencari tahu

seberapa besar pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen adalah inti dari tes ini. Ujian dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:

$$t = \frac{r(\sqrt{n}-2)}{(\sqrt{1-r^2})}$$

Keterangan :

- t = Distribusi t
- n = Jumlah data
- r = Koefisien korelasi parsial
- r<sup>2</sup> = Koefisien determinasi

Ketika uji-t selesai, hasilnya akan dibandingkan dengan t-tabel dengan margin kesalahan 15% (atau dengan kata lain 0,15). Perbandingan ini akan dilakukan segera setelah perhitungan t selesai. Persyaratan berikut harus dipenuhi sebelum keputusan validitas hipotesis dapat dicapai:

- a) Dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen apabila t-estimasi yang dihasilkan dari t-tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Signifikan < 0,15). Artinya terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika t-estimasi yang dihasilkan dari data atau probabilitas berada di bawah tingkat signifikan (Signifikan > 0,15). Kurangnya perilaku penting dalam variabel independen ditunjukkan di sini. Hal ini terjadi ketika probabilitas tidak mencapai tingkat signifikansi.

### 3.2.8 Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dapat dikatakan bahwa semakin besar koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) (mendekati 1), maka pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin besar. Artinya model yang digunakan lebih baik dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya bila R<sup>2</sup> menjadi kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan pengaruh

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) adalah kecil. Artinya model yang digunakan belum cukup kuat untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen.

Berikut adalah rumus koefisien determinasi baik secara parsial maupun simultan:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

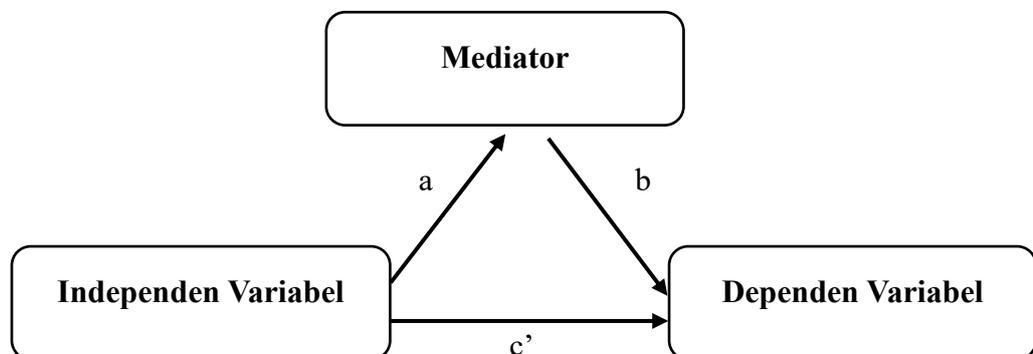
KD = Koefisien determinasi

$R^2$  = Koefisien Korelasi

### 3.2.9 Uji Sobel

Uji Sobel atau *Sobel test* dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang mediasi. Sebelum melakukan uji Sobel, perlu diketahui apakah variabel independen berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel dependen dengan melihat variabel mediasinya. Tes Sobel dirancang oleh Sobel pada tahun 1982 sebagai alat untuk mengevaluasi hipotesis mediasi.

Sesuai Ghozali (2016), menjelaskan bahwa uji Sobel dilakukan dengan cara menguji tidak langsung pengaruh X ke Y melalui M. Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalihkan jalur  $X \rightarrow M$  (a) dengan jalur  $M \rightarrow Y$  (b) atau  $ab$ . Jadi koefisien  $ab = (c-c')$ , dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan  $c'$  adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M.



Gambar 6 Konsep Uji Sobel

Untuk mengetahui hasil uji Sobel digunakan rumus sebagai berikut:

$$Sab = \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2}$$

Keterangan :

- Sa = Standr eror koefisien a
- Sb = Standar eror koefisien b
- b = Koefisien variabel mediasi
- a = Koefisien variabel bebas

Untuk menguji signifikan pengaruh tidak langsung, maka perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{sab}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai pada tabel, jika nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi.

### 3.3 Operasional Variabel

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan dari yang diterima oleh daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang dimaksud adalah data laju pertumbuhan PAD pada APBD masing-masing provinsi di Sumatera selama 17 tahun dari tahun 2006-2023 dalam satuan rupiah (Rp).

#### 2. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersumber dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan. DBH pajak yang dimaksud adalah data laju pertumbuhan DBH pajak pada APBD masing-masing provinsi di Sumatera selama 17 tahun dari tahun 2006-2023 dalam satuan rupiah (Rp).

#### 3. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersumber dari SDA Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi DBH, dan pertambangan panas bumi. DBH bukan pajak yang dimaksud adalah data laju pertumbuhan DBH bukan pajak pada APBD masing-masing provinsi di Sumatera selama 17 tahun dari tahun 2006-2023 dalam satuan rupiah (Rp).

#### 4. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah Provinsi untuk menambah aset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Belanja modal yang dimaksud adalah data laju pertumbuhan belanja modal pada APBD masing-masing provinsi di Sumatera selama 17 tahun dari tahun 2006-2023 dalam satuan rupiah (Rp).

#### 5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan aktivitas ekonomi dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dengan makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah data Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan atas dasar harga berlaku masing-masing provinsi di Sumatera selama 17 tahun dari tahun 2006-2023 dalam satuan persen (%).

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Keadaan Penduduk Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera**

Penduduk di Indonesia merupakan salah satu elemen penting yang mencerminkan dinamika sosial-ekonomi suatu daerah. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk di setiap provinsi mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti angka kelahiran, migrasi, dan kebijakan pemerintahan. Perubahan jumlah penduduk di Pulau Sumatera memberikan gambaran tentang pola pertumbuhan dan tantangan yang dihadapi dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Gambaran umum jumlah penduduk provinsi di pulau Sumatera tahun 2006 - 2023 yang disajikan pada tabel 4.1 terlihat adanya variasi pola pertumbuhan di setiap daerah yang mencerminkan dinamika demografi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Secara keseluruhan, sebagian besar provinsi menunjukkan tren pertumbuhan positif dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Provinsi Aceh memiliki rata-rata jumlah penduduk sebesar 4.890 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,65%. Meskipun umumnya pertumbuhan Aceh stabil, terdapat penurunan signifikan sebesar -1,81% pada tahun 2020. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun tersebut, sehingga memengaruhi angka kelahiran, kematian, maupun migrasi.

Di sisi lain, Sumatera Utara, sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Sumatera, mencatat rata-rata jumlah penduduk sebesar 13.903 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,17%. Perbedaan laju pertumbuhan terlihat pada tahun 2010 dengan penurunan sebesar -1,99%, yang dapat mencerminkan dampak dari faktor sosial-ekonomi atau perubahan pola migrasi. Provinsi Sumatera Barat menunjukkan rata-rata jumlah penduduk sebesar 5.175 ribu jiwa dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,25%. Meskipun sebagian besar pertumbuhan cenderung stabil, penurunan sebesar -0,49% pada tahun 2010 menunjukkan adanya hambatan sementara yang berkaitan dengan faktor internal provinsi.

Provinsi Riau mencatat rata-rata jumlah penduduk sebesar 6.063 ribu jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,02%. Pertumbuhan penduduk di Riau cukup tinggi pada awal periode, terutama tahun 2007 yang mencatat laju pertumbuhan sebesar 6,49%. Namun, terdapat penurunan drastis pada tahun 2020 dengan angka -8,29%, yang kemungkinan besar akibat dampak pandemi terhadap migrasi masuk dan aktivitas ekonomi. Provinsi Jambi memiliki rata-rata jumlah penduduk sebesar 3.310 ribu jiwa dan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,78%. Sementara itu, Sumatera Selatan, dengan rata-rata jumlah penduduk 7.912 ribu jiwa, menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan rata-rata laju sebesar 1,52%. Meskipun stabil, provinsi ini mencatat sedikit penurunan pada tahun 2020, yang konsisten dengan tren di banyak provinsi lain pada tahun tersebut.

Bengkulu mencatat rata-rata jumlah penduduk sebesar 1.848 ribu jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,69%. Lampung memiliki rata-rata jumlah penduduk sebesar 8.140 ribu jiwa dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,52%. Lampung menunjukkan lonjakan pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar 6,63%, yang menunjukkan peningkatan angka kelahiran atau faktor migrasi masuk yang signifikan. Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata jumlah penduduk sebesar 1.331 ribu jiwa dan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,05%. Provinsi ini mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2010 dengan laju sebesar 7,47%, tetapi mengalami penurunan sebesar -2,22% pada tahun 2020.

Sementara itu, Kepulauan Riau mencatat rata-rata jumlah penduduk sebesar 1.869 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata tertinggi di antara provinsi lainnya, yakni sebesar 2,89%. Kepulauan Riau menunjukkan lonjakan luar biasa pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan sebesar 11,29%, kemungkinan besar dipengaruhi oleh investasi besar di sektor industri dan perdagangan. Secara keseluruhan, pertumbuhan penduduk di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebagian besar stabil dengan perbedaan pada tahun-tahun tertentu, seperti tahun 2020, yang mencerminkan dampak pandemi COVID-19 secara langsung terhadap dinamika penduduk.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023**

Provinsi	Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Sumatera Sumatera (Ribu Jiwa)																	Rata- Rata	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
Aceh	4,153	4,223	4,293	4,363	4,486	4,619	4,715	4,811	4,907	5,002	5,096	5,190	5,281	5,372	5,275	5,334	5,408	5,483	4,890
Pertumbuhan (%)		1.69	1.66	1.63	2.82	2.96	2.08	2.04	2.00	1.94	1.88	1.84	1.75	1.72	-1.81	1.12	1.39	1.39	1.65
Sumatera Utara	12,643	12,834	13,042	13,248	12,985	13,221	13,408	13,590	13,767	13,938	14,103	14,262	14,415	14,563	14,799	14,936	15,115	15,387	13,903
Pertumbuhan (%)		1.51	1.62	1.58	-1.99	1.82	1.41	1.36	1.30	1.24	1.18	1.13	1.07	1.03	1.62	0.93	1.20	1.80	1.17
Sumatera Barat	4,661	4,731	4,801	4,869	4,845	4,933	5,000	5,067	5,132	5,196	5,260	5,322	5,382	5,441	5,534	5,580	5,641	5,757	5,175
Pertumbuhan (%)		1.50	1.48	1.42	-0.49	1.82	1.36	1.34	1.28	1.25	1.23	1.18	1.13	1.10	1.71	0.83	1.09	2.06	1.25
Riau	4,762	5,071	5,189	5,306	5,543	5,726	5,879	6,033	6,188	6,344	6,501	6,658	6,815	6,972	6,394	6,494	6,614	6,643	6,063
Pertumbuhan (%)		6.49	2.33	2.25	4.47	3.30	2.67	2.62	2.57	2.52	2.47	2.42	2.36	2.30	-8.29	1.56	1.85	0.44	2.02
Jambi	2,727	2,818	2,909	3,001	3,088	3,168	3,227	3,286	3,344	3,402	3,459	3,515	3,570	3,625	3,548	3,585	3,631	3,679	3,310
Pertumbuhan (%)		3.34	3.23	3.16	2.90	2.59	1.86	1.83	1.77	1.73	1.68	1.62	1.56	1.54	-2.12	1.04	1.28	1.32	1.78
Sumatera Selatan	6,775	7,019	7,121	7,222	7,446	7,599	7,714	7,829	7,942	8,052	8,161	8,267	8,370	8,471	8,467	8,551	8,657	8,744	7,912
Pertumbuhan (%)		3.60	1.45	1.42	3.10	2.05	1.51	1.49	1.44	1.39	1.35	1.30	1.25	1.21	-0.05	0.99	1.24	1.00	1.52
Bengkulu	1,568	1,616	1,640	1,670	1,713	1,753	1,784	1,814	1,845	1,876	1,905	1,934	1,963	1,992	2,011	2,033	2,060	2,086	1,848
Pertumbuhan (%)		3.06	1.49	1.83	2.57	2.34	1.77	1.68	1.71	1.68	1.55	1.52	1.50	1.48	0.95	1.09	1.33	1.26	1.69
Lampung	7,211	7,289	7,391	7,491	7,596	7,736	7,835	7,936	8,026	8,117	8,205	8,290	8,371	8,448	9,008	9,082	9,177	9,314	8,140
Pertumbuhan (%)		1.08	1.40	1.35	1.40	1.84	1.28	1.29	1.13	1.13	1.08	1.04	0.98	0.92	6.63	0.82	1.05	1.49	1.52
Kep. Bangka Belitung	1,074	1,106	1,122	1,138	1,223	1,258	1,287	1,315	1,344	1,373	1,402	1,431	1,460	1,489	1,456	1,473	1,495	1,512	1,331
Pertumbuhan (%)		2.98	1.45	1.43	7.47	2.86	2.31	2.18	2.21	2.16	2.11	2.07	2.03	1.99	-2.22	1.17	1.49	1.14	2.05
Kep. Riau	1,337	1,392	1,453	1,514	1,685	1,749	1,805	1,861	1,917	1,973	2,028	2,083	2,137	2,190	2,183	2,065	2,118	2,153	1,869
Pertumbuhan (%)		4.11	4.38	4.20	11.29	3.80	3.20	3.10	3.01	2.92	2.79	2.71	2.59	2.48	-0.32	-5.41	2.57	1.65	2.89

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), Data Diolah

## **4.2 Kondisi Perekonomian Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera**

PDRB pada hakikatnya mencerminkan tingkat aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Hal ini mencakup kegiatan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah selama periode waktu tertentu. Dengan demikian, PDRB secara tidak langsung berfungsi sebagai indikator penilaian hasil pembangunan perekonomian daerah secara komprehensif dan berkelanjutan. Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia dengan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2006 hingga 2023, terlihat adanya dinamika pertumbuhan di setiap provinsi dengan karakteristik dan pencapaian yang beragam. Rata-rata pertumbuhan PDRB di Pulau Sumatera menunjukkan tren positif, meskipun beberapa provinsi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.

Provinsi Aceh, misalnya, mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 7,62%. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2010 dengan angka 43,51%, sedangkan pada tahun-tahun tertentu seperti 2009, terjadi penurunan sebesar -3,77%. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi Aceh yang masih dipengaruhi oleh dinamika lokal, termasuk dampak rekonstruksi pasca tsunami. Sumatera Utara, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,22%, menunjukkan stabilitas pertumbuhan yang baik dibandingkan provinsi lainnya. Tahun 2011 menjadi puncak pertumbuhan dengan angka 40,08%, didukung oleh sektor industri dan perdagangan yang berkembang pesat. Provinsi Sumatera Barat juga mencatat pertumbuhan yang positif, dengan rata-rata 11,79%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 37,65%, yang mencerminkan peran penting sektor pariwisata dan pertanian.

Provinsi Riau menjadi salah satu penyumbang terbesar PDRB Sumatera dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,72%. Namun, Riau juga mengalami beberapa tantangan, seperti penurunan pertumbuhan sebesar -3,96% pada tahun 2016 akibat fluktuasi harga komoditas utama seperti minyak sawit dan minyak bumi. Sementara itu, Jambi menunjukkan karakteristik pertumbuhan yang lebih dinamis, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi di Sumatera, yakni 17,79%. Tahun 2011 menjadi puncak pertumbuhan Jambi dengan angka fantastis 111,65%, didorong oleh kenaikan signifikan harga komoditas perkebunan dan pertambangan.

Sumatera Selatan mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 12,69% dengan stabilitas yang relatif baik. Tahun 2011 menjadi momen penting dengan pertumbuhan mencapai 42,07%, didorong oleh peningkatan investasi di sektor energi dan infrastruktur. Provinsi Bengkulu, meskipun memiliki PDRB yang lebih kecil dibandingkan provinsi lainnya, menunjukkan pertumbuhan yang impresif dengan rata-rata 14,68%. Tahun 2011 menjadi tahun pertumbuhan tertinggi sebesar 82,53%, yang mencerminkan dampak positif dari pengembangan sektor pertanian dan kelautan.

Provinsi Lampung, yang dikenal sebagai lumbung pangan Sumatera, mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 15,40%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 70,47%, mencerminkan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan, terutama kopi dan kelapa sawit. Kepulauan Bangka Belitung mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 12,42%, dengan puncak pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 57,26%, didorong oleh harga timah yang tinggi. Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,48%, mencatat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 74,08%, didorong oleh aktivitas industri dan perdagangan di kawasan Batam dan Bintan.

Provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode 2006-2023 adalah Jambi dengan angka 17,79%. Kenaikan luar biasa pada tahun 2011 sebesar 111,65% menjadi salah satu faktor utama pencapaian ini, didukung oleh peran penting sektor perkebunan dan pertambangan. Di sisi lain, Aceh mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 7,62%. Meskipun demikian, Aceh masih menunjukkan peningkatan dalam jangka panjang, terutama setelah melalui fase pemulihan pasca bencana dan konflik.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan tren positif selama periode 2006-2023, meskipun beberapa provinsi menghadapi tantangan yang bersifat lokal maupun global. Ini menunjukkan pentingnya diversifikasi ekonomi di Sumatera untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata. Investasi pada sektor-sektor potensial, seperti pariwisata, pertanian, dan industri, tetap menjadi kunci utama untuk memperkuat daya saing ekonomi regional.

**Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023**

Provinsi	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)																		Rata-Rata
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	69,353	71,093	73,531	70,758	101,545	108,218	114,525	121,971	130,448	129,093	136,844	145,807	155,911	164,211	166,372	184,980	210,418	227,110	<b>132343.78</b>
Pertumbuhan (%)		2.51	3.43	-3.77	43.51	6.57	5.83	6.50	6.95	-1.04	6.00	6.55	6.93	5.32	1.32	11.18	13.75	7.93	<b>7.62</b>
Sumatera Utara	139,618	160,377	181,820	213,932	236,354	331,085	377,037	417,120	470,222	523,772	571,722	626,063	684,634	741,752	801,733	811,188	859,934	955,193	1,050,995
Pertumbuhan (%)		14.87	13.37	17.66	10.48	40.08	13.88	10.63	12.73	11.39	9.15	9.50	9.36	8.34	8.09	1.18	6.01	11.08	<b>12.22</b>
Sumatera Barat	44,675	53,030	59,799	70,614	76,295	105,018	118,674	131,436	146,885	167,040	179,952	196,099	213,893	230,572	246,423	241,894	253,100	285,376	312,770
Pertumbuhan (%)		18.70	12.76	18.09	8.05	37.65	13.00	10.75	11.75	13.72	7.73	8.97	9.07	7.80	6.87	-1.84	4.63	12.75	<b>11.79</b>
Riau	139,019	167,068	210,003	276,400	319,511	388,578	485,649	558,493	607,499	679,692	652,762	681,699	704,705	755,435	765,198	727,599	839,002	991,615	1,026,472
Pertumbuhan (%)		20.18	25.70	31.62	15.60	21.62	24.98	15.00	8.77	11.88	-3.96	4.43	3.37	7.20	1.29	-4.91	15.31	18.19	<b>12.72</b>
Jambi	22,487	26,062	32,077	41,056	42,816	90,618	103,523	115,070	132,019	153,857	155,066	171,199	189,788	208,367	217,712	205,082	232,294	276,719	293,729
Pertumbuhan (%)		15.90	23.08	27.99	4.29	111.65	14.24	11.15	14.73	16.54	0.79	10.40	10.86	9.79	4.48	-5.80	13.27	19.12	<b>17.79</b>
Sumatera Selatan	81,532	95,929	109,896	133,331	136,558	194,013	226,667	253,265	281,997	308,407	331,766	353,867	382,886	419,724	455,233	454,607	493,637	590,067	629,100
Pertumbuhan (%)		17.66	14.56	21.32	2.42	42.07	16.83	11.73	11.34	9.37	7.57	6.66	8.20	9.62	8.46	-0.14	8.59	19.53	<b>12.69</b>
Bengkulu	10,134	11,397	12,874	14,503	15,533	28,353	32,200	36,208	40,460	45,235	50,334	55,384	60,658	66,413	72,143	73,305	79,603	90,112	96,551
Pertumbuhan (%)		12.46	12.96	12.65	7.10	82.53	13.57	12.45	11.74	11.80	11.27	10.03	9.52	9.49	8.63	1.61	8.59	13.20	<b>14.68</b>
Lampung	40,907	49,119	60,922	74,491	88,322	150,561	170,047	187,349	204,403	231,008	252,883	279,418	306,700	333,671	360,664	353,025	371,199	414,131	448,880
Pertumbuhan (%)		20.07	24.03	22.27	18.57	70.47	12.94	10.17	9.10	13.02	9.47	10.49	9.76	8.79	8.09	-2.12	5.15	11.57	<b>15.40</b>
Kep. Bangka Belitung	14,172	15,921	17,895	21,523	22,614	35,562	40,849	45,400	50,394	56,390	60,987	65,048	69,865	73,121	75,829	75,520	85,961	95,296	102,636
Pertumbuhan (%)		12.34	12.40	20.27	5.07	57.26	14.87	11.14	11.00	11.90	8.15	6.66	7.41	4.66	3.70	-0.41	13.83	10.86	<b>12.42</b>
Kep. Riau	40,985	46,216	51,826	59,208	63,893	111,224	126,914	144,841	163,112	182,916	199,570	216,008	227,707	249,076	268,080	254,095	275,623	308,843	331,890
Pertumbuhan (%)		12.76	12.14	14.24	7.91	74.08	14.11	14.13	12.61	12.14	9.10	8.24	5.42	9.38	7.63	-5.22	8.47	12.05	<b>13.48</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), Data Diolah

Dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), provinsi-provinsi dengan PDRB yang lebih tinggi, seperti Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan, cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar. Hal ini memungkinkan alokasi anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta investasi di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Sebagai contoh, Riau dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 12,72% memiliki potensi besar dalam memanfaatkan belanja modal untuk mendukung industri dan komoditas utama seperti minyak kelapa sawit. Sumatera Utara, dengan pertumbuhan rata-rata 12,22%, menunjukkan kestabilan dalam pengelolaan sektor industri dan perdagangan yang memberikan dampak positif pada kapasitas fiskalnya. Salah satu komponen penting dalam APBD adalah belanja modal, yang mencakup pengeluaran untuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Provinsi-provinsi ini memiliki peluang untuk memanfaatkan belanja modal sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi, asalkan pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Di sisi lain, provinsi dengan rata-rata PDRB yang lebih rendah, seperti Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Aceh, menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskal, terutama untuk membiayai belanja modal yang menjadi kebutuhan dasar pembangunan. Bengkulu, dengan pertumbuhan rata-rata 14,68%, memiliki potensi untuk mendorong sektor pertanian dan kelautan sebagai unggulan daerah, sementara Kepulauan Bangka Belitung (12,42%) dapat lebih fokus pada optimalisasi sektor tambang timah. Aceh, dengan pertumbuhan rata-rata 7,62% yang terendah di Sumatera, masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk mendukung belanja modalnya. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta prioritas pada belanja modal yang mendukung sektor unggulan lokal dapat menjadi strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal. Dengan fokus yang tepat pada belanja modal, provinsi-provinsi dengan PDRB lebih rendah tetap memiliki peluang untuk mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Pulau Sumatera.

**Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023**

Provinsi	Realisasi Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah)																		Rata-Rata
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	4067.19	3012.37	6911.76	6732.21	6967.81	7089.65	9180.14	10671.82	11606.32	11694.1	12364.5	14350.9	14622.4	15753	13976	13948.4	13353	10186.8	<b>10360.441</b>
Pertumbuhan (%)		-25.93	129.45	-2.60	3.50	1.75	29.49	16.25	8.76	0.76	5.73	16.07	1.89	7.73	-11.28	-0.20	-4.27	-23.71	<b>9.02</b>
Sumatera Utara	2299.46	2685.78	3225.85	3248.99	3885.63	4480.78	7201.84	7397.98	7772.02	8480.75	10440.6	12234.8	13037.5	13080	13881	14034	12011.6	13458.5	<b>8492.0306</b>
Pertumbuhan (%)		16.80	20.11	0.72	19.60	15.32	60.73	2.72	5.06	9.12	23.11	17.18	6.56	0.32	6.13	1.10	-14.41	12.05	<b>11.89</b>
Sumatera Barat	1058.66	1231.39	1723.76	1523.89	1920.97	1986.57	2922.58	3147.83	3635.83	4052.24	4624.67	6066.82	6431.89	6390.3	6987.6	6076.05	5924.28	6459.26	<b>4009.1456</b>
Pertumbuhan (%)		16.32	39.98	-11.60	26.06	3.41	47.12	7.71	15.50	11.45	14.13	31.18	6.02	-0.65	9.35	-13.05	-2.50	9.03	<b>12.32</b>
Riau	3579.68	3413	4164.94	3663.1	4346.84	4275.9	6847.31	6994.64	8132.41	6911.04	6942.92	7902.47	9236.88	8703.2	8420.4	9383	8656.84	9481.27	<b>6725.3267</b>
Pertumbuhan (%)		-4.66	22.03	-12.05	18.67	-1.63	60.14	2.15	16.27	-15.02	0.46	13.82	16.89	-5.78	-3.25	11.43	-7.74	9.52	<b>7.13</b>
Jambi	1010.11	1155.35	1436.38	1292.67	1640.18	1399.12	2654.69	2886.3	3165.05	3129.71	3203.97	4305.26	4218.02	4575.2	4694	4725.72	4215.3	4909.07	<b>3034.2267</b>
Pertumbuhan (%)		14.38	24.32	-10.01	26.88	-14.70	89.74	8.72	9.66	-1.12	2.37	34.37	-2.03	8.47	2.60	0.68	-10.80	16.46	<b>11.77</b>
Sumatera Selatan	1866.21	2135.81	2574.42	2681.67	3224.15	3435.48	5223.88	5468.14	6237.36	5990.42	6582.78	8195.96	6865.58	9273.1	10345	9611.29	9902.57	10744.5	<b>6131.0017</b>
Pertumbuhan (%)		14.45	20.54	4.17	20.23	6.55	52.06	4.68	14.07	-3.96	9.89	24.51	-16.23	35.07	11.56	-7.09	3.03	8.50	<b>11.88</b>
Bengkulu	556.3	765.4	1082.51	1007.09	1000.86	1145.96	1562.52	1696.37	1986.23	2180.67	2355.56	2804.57	2992.59	2934.1	3368.9	3051.75	2760.07	2897.37	<b>2008.2633</b>
Pertumbuhan (%)		37.59	41.43	-6.97	-0.62	14.50	36.35	8.57	17.09	9.79	8.02	19.06	6.70	-1.96	14.82	-9.41	-9.56	4.97	<b>11.20</b>
Lampung	1341.05	1515.26	1711.01	1890.12	2004.89	2181.16	3834.73	3884.53	4454.18	4781.2	5476.92	6948.83	8112.69	7058.3	7024.8	7097.65	7011.69	7381.76	<b>4650.5978</b>
Pertumbuhan (%)		12.99	12.92	10.47	6.07	8.79	75.81	1.30	14.66	7.34	14.55	26.87	16.75	-13.00	-0.47	1.04	-1.21	5.28	<b>11.77</b>
Kep. Bangka Belitung	463.38	593.77	775.34	1001.91	862.71	1067.05	1332.03	1609.66	1596.08	1869.95	2069.86	2359.07	2874.91	2776.1	2489.6	2465.81	2079.66	2962.29	<b>1736.0661</b>
Pertumbuhan (%)		28.14	30.58	29.22	-13.89	23.69	24.83	20.84	-0.84	17.16	10.69	13.97	21.87	-3.44	-10.32	-0.96	-15.66	42.44	<b>12.84</b>
Kep. Riau	912.3	1277.57	1148.93	1636	1723.57	1978.76	2249.82	2715.83	3312.45	2605.39	2782.11	3037.64	3594.25	3655.1	4141.7	3703.81	3870.32	4151.64	<b>2694.2906</b>
Pertumbuhan (%)		40.04	-10.07	42.39	5.35	14.81	13.70	20.71	21.97	-21.35	6.78	9.18	18.32	1.69	13.31	-10.57	4.50	7.27	<b>10.47</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), Data Diolah

Provinsi dengan rata-rata pendapatan tertinggi adalah Aceh sebesar Rp10.360,44 miliar, yang menunjukkan kapasitas fiskal besar meskipun laju pertumbuhannya cenderung fluktuatif dengan rata-rata 9,02%. Tingginya pendapatan Aceh sebagian besar didukung oleh Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan dari pemerintah pusat, meskipun dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, seperti terlihat pada 2023 dengan penurunan hingga 23,71%. Provinsi Riau, dengan rata-rata pendapatan Rp6.725,33 miliar, mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 7,13%. Meskipun pendapatan provinsi ini cukup besar, fluktuasi yang signifikan tampak pada penurunan pertumbuhan pada beberapa tahun tertentu, seperti tahun 2015 (-15,02%), yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas unggulan seperti minyak sawit. Jambi, dengan rata-rata pendapatan Rp3.034,23 miliar dan pertumbuhan rata-rata 11,77%, menunjukkan potensi besar dari sektor perkebunan dan pertambangan. Namun, provinsi ini masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Provinsi Bengkulu mencatat rata-rata pendapatan Rp2.008,26 miliar dengan pertumbuhan rata-rata 11,20%. Kendati merupakan salah satu provinsi dengan pendapatan terendah, Bengkulu menunjukkan laju pertumbuhan positif, didukung oleh sektor pertanian dan perikanan. Secara umum, provinsi dengan rata-rata pendapatan lebih tinggi, seperti Aceh dan Sumatera Utara, memiliki kapasitas fiskal lebih besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sebaliknya, provinsi dengan rata-rata pendapatan lebih rendah, seperti Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan PAD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan pendapatan yang relatif tinggi di beberapa provinsi, seperti Sumatera Barat (12,32%) dan Lampung (11,77%), mencerminkan potensi besar yang dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan prioritas pada sektor unggulan lokal. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk memastikan pemerataan pembangunan antarwilayah di Pulau Sumatera.

**Tabel 4.4 Realisasi Belanja Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023**

Provinsi	Realisasi Belanja Daerah (Miliar Rupiah)																		Rata-Rata
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	2442.72	3342.66	5715.62	9791.34	7528.51	8077.91	8757.32	11220.42	12045.84	12149.4	12119.7	13832.8	15084	14672	15798	13683.6	16170.7	11093.9	10751.477
Pertumbuhan (%)		36.84	70.99	71.31	-23.11	7.30	8.41	28.13	7.36	0.86	-0.24	14.14	9.04	-2.73	7.67	-13.38	18.18	-31.40	12.32
Sumatera Utara	2184.67	2553.27	2967.35	3615.97	3666.7	4677.86	7633.63	7260.46	7808.55	7959.16	9476.42	12518.8	13867.5	13440	14081	13225.4	12649.6	14273.5	8547.7817
Pertumbuhan (%)		16.87	16.22	21.86	1.40	27.58	63.19	-4.89	7.55	1.93	19.06	32.10	10.77	-3.08	4.77	-6.08	-4.35	12.84	12.81
Sumatera Barat	960.09	1241.37	1637.7	1707.69	2239.75	2123.68	2962.29	3113.31	3483.67	4022.25	4504.03	5759.81	6642.45	6551.3	7271.6	6468.9	6204.28	6789.26	4093.5222
Pertumbuhan (%)		29.30	31.93	4.27	31.16	-5.18	39.49	5.10	11.90	15.46	11.98	27.88	15.32	-1.37	11.00	-11.04	-4.09	9.43	13.09
Riau	3171.1	3726.76	3657.88	4006.11	4267.43	4468.25	6670.76	7525.28	5602.07	7760.97	8731.93	9188.74	10326.4	8690.4	8486.3	8931.7	8656.84	10142.5	6889.5211
Pertumbuhan (%)		17.52	-1.85	9.52	6.52	4.71	49.29	12.81	-25.56	38.54	12.51	5.23	12.38	-15.84	-2.35	5.25	-3.08	17.16	8.40
Jambi	963.24	1105.38	1404.98	1670.04	1488.13	1498.75	2531.59	3010.74	3204.63	3425.56	3294.48	4132.94	4515.14	4824.4	5244.8	4388.29	4795.84	5501.68	3166.7
Pertumbuhan (%)		14.76	27.10	18.87	-10.89	0.71	68.91	18.93	6.44	6.89	-3.83	25.45	9.25	6.85	8.72	-16.33	9.29	14.72	12.11
Sumatera Selatan	1741.58	2319.23	2386.78	2751.67	3108.03	3565.88	5060.92	5678.7	5770.73	5190.19	4962.57	6409.38	5806.8	9654.7	10541	10060.7	9766.47	10511.8	5849.2839
Pertumbuhan (%)		33.17	2.91	15.29	12.95	14.73	41.93	12.21	1.62	-10.06	-4.39	29.15	-9.40	66.27	9.18	-4.56	-2.92	7.63	12.69
Bengkulu	504.87	664.76	1249.66	857.59	971.19	1155.76	1518.45	1727	1934.72	2282.34	2029.69	2867.21	3424.71	3118.3	3475.8	2880.22	2838.77	2977.76	2026.5972
Pertumbuhan (%)		31.67	87.99	-31.37	13.25	19.00	31.38	13.73	12.03	17.97	-11.07	41.26	19.44	-8.95	11.46	-17.13	-1.44	4.90	13.77
Lampung	1341.05	1515.26	1711.01	1890.12	2004.89	2181.16	3834.73	3884.53	4454.18	4781.2	5476.92	6948.83	8112.69	7058.3	7024.8	7097.65	7011.69	7381.76	4650.5978
Pertumbuhan (%)		12.99	12.92	10.47	6.07	8.79	75.81	1.30	14.66	7.34	14.55	26.87	16.75	-13.00	-0.47	1.04	-1.21	5.28	11.77
Kep. Bangka Belitung	463.38	593.77	775.34	1001.91	862.71	1067.05	1332.03	1609.66	1596.08	1869.95	2069.86	2359.07	2874.91	2776.1	2489.6	2465.81	2079.66	2962.29	1736.0661
Pertumbuhan (%)		28.14	30.58	29.22	-13.89	23.69	24.83	20.84	-0.84	17.16	10.69	13.97	21.87	-3.44	-10.32	-0.96	-15.66	42.44	12.84
Kep. Riau	912.3	1277.57	1148.93	1636	1723.57	1978.76	2249.82	2715.83	3312.45	2605.39	2782.11	3037.64	3594.25	3655.1	4141.7	3703.81	3870.32	4151.64	2694.2906
Pertumbuhan (%)		40.04	-10.07	42.39	5.35	14.81	13.70	20.71	21.97	-21.35	6.78	9.18	18.32	1.69	13.31	-10.57	4.50	7.27	10.47

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), Data Diolah

Data realisasi belanja daerah di provinsi-provinsi Sumatera dari tahun 2006 hingga 2023. Secara keseluruhan, rata-rata belanja daerah menunjukkan perbedaan signifikan antarprovinsi. Aceh, misalnya, memiliki rata-rata belanja tertinggi sebesar 10.751,48 miliar rupiah, dengan fluktuasi pertumbuhan tahunan yang cukup besar, yaitu rata-rata 12,32%. Peningkatan belanja yang signifikan terjadi pada tahun 2008 dengan pertumbuhan sebesar 70,99%, namun penurunan tajam terlihat pada tahun 2023 sebesar -31,40%. Sumatera Barat mencatat rata-rata belanja sebesar 4.093,52 miliar rupiah dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 13,09%. Jambi memiliki rata-rata belanja yang lebih kecil, yaitu 3.166,70 miliar rupiah, namun pertumbuhan tahunan yang stabil dengan rata-rata 12,11%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 68,91%, menunjukkan alokasi belanja yang lebih agresif di tahun tersebut. Bengkulu, dengan rata-rata belanja 2.026,60 miliar rupiah, menunjukkan tren pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 13,77%, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2008 sebesar 87,99%. Lampung mencatat rata-rata belanja sebesar 4.650,60 miliar rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 11,77%. Provinsi ini mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 75,81% dan kontraksi kecil pada tahun-tahun tertentu seperti 2019 (-13,00%).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata belanja sebesar 1.736,07 miliar rupiah dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 12,84%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 42,44%, sedangkan penurunan signifikan terlihat pada tahun 2022 (-15,66%). Kepulauan Riau, dengan rata-rata belanja sebesar 2.694,29 miliar rupiah, menunjukkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,47%. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar 40,04%, sedangkan kontraksi terbesar terjadi pada tahun 2015 (-21,35%). Secara keseluruhan, pola pertumbuhan di setiap provinsi sangat bervariasi, mencerminkan perbedaan dalam prioritas pembangunan, kebijakan fiskal, dan dinamika ekonomi di masing-masing wilayah. Provinsi-provinsi dengan pertumbuhan belanja yang lebih stabil cenderung memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap pengembangan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

### **4.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Sumatera**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam mengelola sumber daya lokalnya. Sebagai salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan berbagai potensi lokal yang dimilikinya untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Tingginya PAD menunjukkan bahwa suatu daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari pendapatan sendiri tanpa harus bergantung secara signifikan pada transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam konteks otonomi daerah, PAD memiliki peran strategis sebagai tolak ukur kemandirian finansial dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya yang ada. Selain itu, PAD juga menjadi sumber pendanaan yang lebih fleksibel dibandingkan transfer pusat, karena pemerintah daerah memiliki kendali penuh atas alokasinya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Dengan demikian, PAD bukan hanya menjadi indikator keuangan, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Daerah dengan PAD tinggi umumnya lebih mandiri secara finansial, seperti Provinsi Sumatera Utara yang memiliki rata-rata PAD tertinggi sebesar Rp3.672,63 miliar, diikuti oleh Riau Rp2.902,02 miliar, Sumatera Selatan Rp2.583,98 miliar, dan Aceh Rp1.670,60 miliar. Sebaliknya, provinsi dengan rata-rata PAD terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp575,09 miliar dan Bengkulu sebesar Rp628,37 miliar. Pertumbuhan PAD di Sumatera Utara sangat signifikan pada tahun 2014, dengan kenaikan drastis sebesar 539,06% akibat lonjakan pendapatan, sementara Aceh juga mengalami peningkatan besar sebesar 91,76% pada tahun yang sama. Namun, penurunan tajam pernah terjadi di Sumatera Utara pada tahun 2010 dengan nilai -79,27%, mencerminkan fluktuasi yang masih mungkin terjadi dalam kinerja PAD suatu daerah.

Aceh mencatat pertumbuhan PAD rata-rata sebesar 12,93%, dengan fluktuasi pertumbuhan signifikan seperti penurunan kecil pada 2013 sebesar 0,12% tetapi mengalami kenaikan besar pada 2014. Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan rata-rata 10,81%, dengan peningkatan tertinggi pada 2010 sebesar 39,11%. Provinsi Riau juga mengalami pertumbuhan rata-rata 12,66%, dengan peningkatan PAD terbesar pada 2011 sebesar 65,03%. Jambi mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 12,37%, dengan peningkatan tertinggi pada 2008 sebesar 68,11%. Sumatera Selatan memiliki rata-rata pertumbuhan 12,63%, dengan kenaikan tertinggi pada 2011 sebesar 34,87%, mencerminkan stabilitas ekonomi provinsi tersebut. Bengkulu mencatat pertumbuhan rata-rata 12,84%, dengan lonjakan pertumbuhan tertinggi pada 2009 sebesar 45,89%.

Lampung, yang memiliki rata-rata PAD sebesar Rp2.140,73 miliar, mencatat pertumbuhan rata-rata 11,80%, dengan lonjakan besar pada 2010 sebesar 37,71%. Kepulauan Bangka Belitung mencatat pertumbuhan rata-rata 11,21%, dengan peningkatan tertinggi pada 2011 sebesar 39,95%, meskipun mengalami penurunan yang signifikan pada beberapa tahun berikutnya. Kepulauan Riau memiliki rata-rata pertumbuhan 12,79%, dengan peningkatan tertinggi pada 2014 sebesar 69,12%. Secara umum, tren kenaikan PAD di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya daerah terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun fluktuasi pertumbuhan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh masing-masing pemerintah provinsi. Faktor-faktor seperti lonjakan drastis atau penurunan tajam kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional dan global, perubahan regulasi, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, dan pengelolaan sumber daya alam. Provinsi dengan rata-rata PAD tinggi menunjukkan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, sementara provinsi dengan PAD lebih rendah perlu memaksimalkan potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan.

**Tabel 4.5 Realisasi PAD Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023**

Provinsi	Jumlah Realisasi PAD (Miliar Rupiah)																		Rata-Rata
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	476.9	587.48	716.29	795.87	796.94	802.84	901.72	902.77	1,731.13	1,985.83	2,057.48	2,276.31	2,359.39	2,698.91	2,570.78	2,505.89	2,917.15	2,987.19	<b>1670.60</b>
Pertumbuhan (%)		23.19	21.93	11.11	0.13	0.74	12.32	0.12	91.76	14.71	3.61	10.64	3.65	14.39	-4.75	-2.52	16.41	2.40	<b>12.93</b>
Sumatera Utara	1502.6	1693.84	2002	1946.44	403.52	379.38	451.84	691.14	4,416.81	4,883.88	4,630.46	5,287.47	5,638.96	5,761.27	5,531.24	6,402.71	7,258.02	7,225.69	<b>3672.63</b>
Pertumbuhan (%)		12.73	18.19	-2.78	-79.27	-5.98	19.10	52.96	539.06	10.57	-5.19	14.19	6.65	2.17	-3.99	15.76	13.36	-0.45	<b>35.71</b>
Sumatera Barat	494.92	571.6	790.08	723.75	1006.82	1147.3	1225.46	1303.62	1,729.22	1,876.73	1,894.69	2,134.01	2,275.09	2,328.43	2,255.07	2,551.90	2,851.97	2,471.22	<b>1646.22</b>
Pertumbuhan (%)		15.49	38.22	-8.40	39.11	13.95	6.81	6.38	32.65	8.53	0.96	12.63	6.61	2.34	-3.15	13.16	11.76	-13.35	<b>10.81</b>
Riau	964.66	1257.06	1477.57	1276.25	1339.26	2210.13	2588.68	2401.14	3,245.08	3,476.96	3,495.54	3,360.01	3,639.00	3,558.21	3,333.18	4,050.47	4,696.77	5,866.45	<b>2902.02</b>
Pertumbuhan (%)		30.31	17.54	-13.63	4.94	65.03	17.13	-7.24	35.15	7.15	0.53	-3.88	8.30	-2.22	-6.32	21.52	15.96	24.90	<b>12.66</b>
Jambi	385.04	372.44	626.11	526.44	686.62	984.23	996	804.41	1,281.23	1,241.23	1,273.89	1,580.30	1,656.57	1,651.09	1,535.18	1,843.43	2,163.59	1,900.66	<b>1194.90</b>
Pertumbuhan (%)		-3.27	68.11	-15.92	30.43	43.34	1.18	-19.22	59.28	-3.12	2.63	24.05	4.83	-0.33	-7.02	20.08	17.37	-12.15	<b>12.37</b>
Sumatera Selatan	741.95	847.95	1139.86	1171.65	1371.08	1849.11	2001.73	2287.01	2,407.90	2,534.52	2,733.32	3,031.63	3,528.01	3,494.51	3,375.10	3,865.46	4,930.95	5,199.84	<b>2583.98</b>
Pertumbuhan (%)		14.29	34.43	2.79	17.02	34.87	8.25	14.25	5.29	5.26	7.84	10.91	16.37	-0.95	-3.42	14.53	27.56	5.45	<b>12.63</b>
Bengkulu	165.1	209.76	289.07	421.73	351.09	440.92	483.76	507.99	672.06	701.30	745.38	804.58	872.26	826.67	712.35	984.42	1,088.42	1,033.85	<b>628.37</b>
Pertumbuhan (%)		27.05	37.81	45.89	-16.75	25.59	9.72	5.01	32.30	4.35	6.29	7.94	8.41	-5.23	-13.83	38.19	10.56	-5.01	<b>12.84</b>
Lampung	631.98	674.69	891.78	812.08	1118.34	1395.67	1687.7	2183.41	2,274.68	2,247.34	2,446.04	2,750.60	2,864.24	3,018.07	2,842.29	3,249.67	3,678.30	3,766.19	<b>2140.73</b>
Pertumbuhan (%)		6.76	32.18	-8.94	37.71	24.80	20.92	29.37	4.18	-1.20	8.84	12.45	4.13	5.37	-5.82	14.33	13.19	2.39	<b>11.80</b>
Kep. Bangka Belitung	198.17	203.54	294.18	255.26	328.12	459.2	438.37	465.93	562.92	571.80	567.63	709.83	850.44	826.7	683.43	895.76	1,090.48	949.85	<b>575.09</b>
Pertumbuhan (%)		2.71	44.53	-13.23	28.54	39.95	-4.54	6.29	20.82	1.58	-0.73	25.05	19.81	-2.79	-17.33	31.07	21.74	-12.90	<b>11.21</b>
Kep. Riau	281.83	324.99	406.28	424.68	522	620.9	723.05	632.81	1,070.20	1,012.14	1,109.05	1,094.79	1,220.77	1,311.70	1,195.64	1,375.77	1,675.73	1,806.97	<b>933.85</b>
Pertumbuhan (%)		15.31	25.01	4.53	22.92	18.95	16.45	-12.48	69.12	-5.43	9.57	-1.29	11.51	7.45	-8.85	15.07	21.80	7.83	<b>12.79</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), Data Diolah

#### **4.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi di Pulau Sumatera**

Dana Bagi Hasil Pajak berperan penting dalam mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan langsung dari pusat, sekaligus mendorong daerah untuk mendukung pemungutan pajak dengan baik. Dana ini digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, Aceh menunjukkan pola yang konstan dengan nilai DBH pajak sebesar Rp186,79 miliar setiap tahunnya, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 166,01% . Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi terbesar, mencatat rata-rata DBH pajak sebesar Rp428,22 miliar dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 8,77%.

Sumatera Barat mencatat rata-rata penerimaan DBH pajak sebesar Rp126,57 miliar dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 8,20%. Provinsi ini juga menunjukkan pola pertumbuhan yang tidak stabil, seperti peningkatan signifikan sebesar 102,03% pada 2012 namun diikuti penurunan tajam pada tahun-tahun berikutnya. Riau yang memiliki rata-rata DBH pajak sebesar Rp545,75 miliar namun, pertumbuhan tahunan Riau sangat fluktuatif dengan rata-rata 73,64%, termasuk peningkatan ekstrem sebesar 1.284% pada 2021. Provinsi Jambi mencatat rata-rata penerimaan DBH pajak sebesar Rp176,12 miliar dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 4,70%. Sumatera Selatan mencatat rata-rata penerimaan sebesar Rp611,51 miliar dengan pertumbuhan 8,39%. Sementara itu, Bengkulu dan Lampung memiliki rata-rata penerimaan lebih rendah, seperti Bengkulu yang mencatat peningkatan sebesar 420,45% pada 2007. Lampung, dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp130,64 miliar, memiliki pertumbuhan yaitu 5,98%.

Provinsi-provinsi kepulauan seperti Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau juga mencatat pola pertumbuhan yang tidak stabil. Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata DBH pajak sebesar Rp53,87 miliar dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 11,83%, sementara Kepulauan Riau mencatat rata-rata penerimaan sebesar Rp244,57 miliar dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 28,08%. Fluktuasi ini terlihat jelas pada pertumbuhan Kepulauan Riau yang mencapai puncak pertumbuhan sebesar 410,63% pada 2012 tetapi juga mengalami penurunan tajam pada tahun-tahun berikutnya.

**Tabel 4.6 Realisasi DBHP Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023**

Provinsi	Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak (Miliar Rupiah)																	Rata-Rata	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
Aceh	120.08	139.14	272.36	184.9	201.97	224.63	251.12	238.11	77.43	205.97	225.93	219.96	159.6	113.61	206.21	200.32	170.78	150.01	<b>186.79</b>
Pertumbuhan (%)		15.87	95.75	-32.11	9.23	11.22	11.79	-5.18	-67.48	166.01	9.69	-2.64	-27.44	-28.82	81.51	-2.86	-14.75	-12.16	<b>12.21</b>
Sumatera Utara	240.83	291.47	306.25	316	403.52	379.38	451.84	691.14	380.46	313.79	485.32	446.15	455.53	322.41	394.67	691.3	631.46	506.37	<b>428.22</b>
Pertumbuhan (%)		21.03	5.07	3.18	27.70	-5.98	19.10	52.96	-44.95	-17.52	54.66	-8.07	2.10	-29.22	22.41	75.16	-8.66	-19.81	<b>8.77</b>
Sumatera Barat	71.45	84.26	85.86	89.2	103.32	90.61	183.06	159.05	132.67	94.44	164	168.66	131.76	107.5	146.66	161.97	166.04	137.79	<b>126.57</b>
Pertumbuhan (%)		17.93	1.90	3.89	15.83	-12.30	102.03	-13.12	-16.59	-28.82	73.66	2.84	-21.88	-18.41	36.43	10.44	2.51	-17.01	<b>8.20</b>
Riau	328.54	388.94	395.71	395.07	555.97	465.18	502.49	559.66	668.49	756.11	877.34	139.09	116.23	79.69	108.08	1,495.83	1,127.90	863.25	<b>545.75</b>
Pertumbuhan (%)		18.38	1.74	-0.16	40.73	-16.33	8.02	11.38	19.45	13.11	16.03	-84.15	-16.44	-31.44	35.63	1284.00	-24.60	-23.46	<b>73.64</b>
Jambi	128.28	146.94	130.38	129.18	157.83	165.26	217.35	172.94	194.97	179.89	198.81	188.91	170.44	152.85	149.03	273.81	220.65	192.72	<b>176.12</b>
Pertumbuhan (%)		14.55	-11.27	-0.92	22.18	4.71	31.52	-20.43	12.74	-7.73	10.52	-4.98	-9.78	-10.32	-2.50	83.73	-19.41	-12.66	<b>4.70</b>
Sumatera Selatan	253.33	312.84	294.43	344.72	431	379.63	490.24	558.07	548.89	578.42	788.75	637.87	707.05	763.86	966.31	1,219.27	958.92	773.49	<b>611.51</b>
Pertumbuhan (%)		23.49	-5.88	17.08	25.03	-11.92	29.14	13.84	-1.64	5.38	36.36	-19.13	10.85	8.03	26.50	26.18	-21.35	-19.34	<b>8.39</b>
Bengkulu	7.48	38.93	37.6	40.84	52.02	18.51	61.84	55.25	50.653	36	82.57	43.7	40.96	22.61	36.97	62.01	57.87	49.81	<b>44.20</b>
Pertumbuhan (%)		420.45	-3.42	8.62	27.38	-64.42	234.09	-10.66	-8.32	-28.93	129.36	-47.08	-6.27	-44.80	63.51	67.73	-6.68	-13.93	<b>42.16</b>
Lampung	78.28	94.24	91.33	105.93	130.17	126.73	164.92	170.26	142.64	105.18	156.58	148.41	122.49	87.41	148.36	186.59	167.26	124.67	<b>130.64</b>
Pertumbuhan (%)		20.39	-3.09	15.99	22.88	-2.64	30.13	3.24	-16.22	-26.26	48.87	-5.22	-17.47	-28.64	69.73	25.77	-10.36	-25.46	<b>5.98</b>
Kep. Bangka Belitung	24.46	33.01	41.57	40.34	52.05	55.99	63.59	65	52.83	47.46	62.47	39.04	53.51	43.36	39.42	95.39	87.63	72.49	<b>53.87</b>
Pertumbuhan (%)		34.96	25.93	-2.96	29.03	7.57	13.57	2.22	-18.72	-10.16	31.63	-37.51	37.06	-18.97	-9.09	141.98	-8.14	-17.28	<b>11.83</b>
Kep. Riau	124.79	159.81	174.67	185.87	234.37	217.46	1110.42	220.77	203.98	167.1	266.73	197.99	157.69	103.44	151.74	233.32	201.89	290.27	<b>244.57</b>
Pertumbuhan (%)		28.06	9.30	6.41	26.09	-7.22	410.63	-80.12	-7.61	-18.08	59.62	-25.77	-20.35	-34.40	46.69	53.76	-13.47	43.78	<b>28.08</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), Data Diolah

#### **4.5 Perkembangan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi di Pulau Sumatera**

Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak adalah dana yang berasal dari penerimaan sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi hasilnya dibagi dengan pemerintah daerah. Sumber utama DBH Bukan Pajak berasal dari sektor-sektor pengelolaan sumber daya alam, seperti pertambangan, kehutanan, perikanan, dan minyak dan gas bumi (migas). DBH Bukan Pajak bertujuan untuk mengompensasi daerah penghasil sumber daya alam, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) provinsi-provinsi di Sumatera pada tabel 4.7, terlihat adanya variasi yang signifikan baik dalam jumlah realisasi maupun pertumbuhan setiap tahunnya. Provinsi Riau menjadi penerima tertinggi dengan rata-rata Rp1.505,50 miliar, menunjukkan peran penting sektor minyak dan gas. Namun, tren pertumbuhan Riau relatif stagnan dengan rata-rata mendekati nol persen, yang mengindikasikan perlunya diversifikasi sumber pendapatan. Sebaliknya, Aceh mencatat pertumbuhan rata-rata tertinggi sebesar 152,52%, meskipun nilai realisasinya cenderung fluktuatif, terutama setelah 2015. Hal ini mencerminkan ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap perubahan eksternal.

Provinsi dengan penerimaan DBHBP rendah seperti Bengkulu rata-rata Rp30,57 miliar dan Kepulauan Bangka Belitung rata-rata Rp134,55 miliar menunjukkan pertumbuhan yang lebih bervariasi, di mana Bengkulu mencatat lonjakan pertumbuhan hingga 1.714,96% pada 2011. Sementara itu, Sumatera Selatan dan Jambi tampil sebagai provinsi dengan performa relatif stabil, mengindikasikan pengelolaan sumber daya yang lebih terukur. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa faktor pengelolaan sektor unggulan dan kebijakan keuangan menjadi determinan penting dalam realisasi DBHBP di Sumatera.

**Tabel 4.7 Realisasi DBHBP Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023**

Provinsi	Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Miliar Rupiah)																		Rata-Rata
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	1731.8	1177.84	1765.01	1465.27	118.2	1270.15	122.17	101.04	1,199.68	47.04	25.65	33.44	32.28	98.33	0	31.41	257.08	311.59	<b>543.78</b>
Pertumbuhan (%)		-31.99	49.85	-16.98	-91.93	974.58	-90.38	-17.30	1087.33	-96.08	-45.47	30.37	-3.47	204.62	-100.00	0.00	718.47	21.20	<b>152.52</b>
Sumatera Utara	2.29	2.25	4.88	1.36	2.31	7.16	8.31	19.39	23.31	20.45	30.59	14.7	58.31	58.89	31.4	112.33	177.69	75	<b>36.15</b>
Pertumbuhan (%)		-1.75	116.89	-72.13	69.85	209.96	16.06	133.33	20.22	-12.27	49.58	-51.95	296.67	0.99	-46.68	257.74	58.19	-57.79	<b>58.05</b>
Sumatera Barat	5.75	3.26	1.98	1.29	5.42	1.6	9.76	8	16.38	12.57	10.7	13.34	15.53	26.42	18.94	25.75	34	42.24	<b>14.05</b>
Pertumbuhan (%)		-43.30	-39.26	-34.85	320.16	-70.48	510.00	-18.03	104.75	-23.26	-14.88	24.67	16.42	70.12	-28.31	35.96	32.04	24.24	<b>50.94</b>
Riau	2068.36	1469.34	2093.27	1793.77	2349.31	2324.77	2564.67	2212.41	2,698.59	1,074.93	1,015.82	749.54	864.95	865.86	1002.45	446.59	752.07	752.26	<b>1505.50</b>
Pertumbuhan (%)		-28.96	42.46	-14.31	30.97	-1.04	10.32	-13.74	21.98	-60.17	-5.50	-26.21	15.40	0.11	15.78	-55.45	68.40	0.03	<b>0.00</b>
Jambi	122.43	124.59	130.38	129.18	265.59	301.32	350.16	239.37	321.85	172.07	126	201.6	236.36	243.68	221.3	214.53	450.81	315.24	<b>231.47</b>
Pertumbuhan (%)		1.76	4.65	-0.92	105.60	13.45	16.21	-31.64	34.46	-46.54	-26.77	60.00	17.24	3.10	-9.18	-3.06	110.14	-30.07	<b>12.85</b>
Sumatera Selatan	449.53	457.85	584.35	648.53	862.16	933.82	1127	1191.06	1,385.67	749.98	694.57	869.85	936.9	931.59	1018.17	717.56	1693.67	1706.75	<b>942.17</b>
Pertumbuhan (%)		1.85	27.63	10.98	32.94	8.31	20.69	5.68	16.34	-45.88	-7.39	25.24	7.71	-0.57	9.29	-29.52	136.03	0.77	<b>12.95</b>
Bengkulu	5.62	0.859	2.08	1.57	2.74	49.73	17.21	9.92	44.9	63	81.9	17.61	25.4	23.64	24.43	28.73	66.6	84.36	<b>30.57</b>
Pertumbuhan (%)		-84.72	142.14	-24.52	74.52	1714.96	-65.39	-42.36	352.62	40.31	30.00	-78.50	44.24	-6.93	3.34	17.60	131.81	26.67	<b>133.87</b>
Lampung	123.78	82.88	133.03	58.76	107.29	124.36	145.69	130.7	144.94	66.91	57.31	100.92	93.54	51.12	40.78	42.39	109.16	85.31	<b>94.38</b>
Pertumbuhan (%)		-33.04	60.51	-55.83	82.59	15.91	17.15	-10.29	10.90	-53.84	-14.35	76.09	-7.31	-45.35	-20.23	3.95	157.51	-21.85	<b>9.56</b>
Kep. Bangka Belitung	35.84	53.95	93.49	65.56	45.51	145.04	98.68	107.44	122.11	140.69	163.68	81.79	162.03	161.04	101.48	149.2	441.79	252.64	<b>134.55</b>
Pertumbuhan (%)		50.53	73.29	-29.87	-30.58	218.70	-31.96	8.88	13.65	15.22	16.34	-50.03	98.10	-0.61	-36.98	47.02	196.11	-42.81	<b>30.29</b>
Kep. Riau	546.67	169.19	480.93	295.37	761.69	611.76	0	722.33	721.28	340.54	354.68	328.67	379.76	633.99	375.26	233.56	531.38	403	<b>438.34</b>
Pertumbuhan (%)		-69.05	184.25	-38.58	157.88	-19.68	-100.00	0.00	-0.15	-52.79	4.15	-7.33	15.54	66.94	-40.81	-37.76	127.51	-24.16	<b>9.76</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), Data Diolah

#### **4.6 Perkembangan Belanja Modal Provinsi di Pulau Sumatera**

Belanja modal, atau sering disebut sebagai belanja investasi, adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi untuk membeli, membangun, atau memperbaiki aset tetap yang akan digunakan dalam jangka waktu panjang. Dapat dilihat pada tabel 4.8 beberapa provinsi, seperti Aceh dan Riau, mencatat fluktuasi yang sangat tajam. Aceh, misalnya, mengalami pertumbuhan belanja modal yang luar biasa pada tahun 2008 236,66% dan 2009 (92,19%) akibat dampak dana otonomi khusus, tetapi juga mencatat penurunan signifikan pada tahun-tahun tertentu, seperti 2010 (-34,85%) dan 2013 (-44,69%). Sementara itu, Riau menunjukkan pola yang tidak konsisten, dengan lonjakan pertumbuhan mencapai 223,02% pada 2014, tetapi juga mengalami penurunan tajam sebesar -76,80% pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan alokasi dan realisasi belanja modal.

Provinsi lainnya, seperti Sumatera Barat, Lampung, dan Bengkulu, cenderung menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih stabil meskipun dengan fluktuasi kecil. Lampung, misalnya, mencatat pertumbuhan signifikan pada tahun-tahun tertentu seperti 2010 (79,88%) dan 2016 (36,00%), namun tidak mengalami penurunan sebesar provinsi seperti Aceh atau Riau. Hal yang sama berlaku untuk Sumatera Barat, yang meskipun mengalami penurunan pada tahun 2016 (-28,51%), berhasil mencatat pertumbuhan yang relatif konsisten pada sebagian besar tahun lainnya. Stabilitas ini mencerminkan perencanaan yang lebih matang dan fokus pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa provinsi memiliki sumber daya yang lebih besar, efektivitas perencanaan dan implementasi anggaran tetap menjadi tantangan utama. Fluktuasi yang tinggi pada beberapa provinsi, terutama yang memiliki dana otonomi khusus atau sumber daya alam yang melimpah, menyoroti perlunya penguatan kapasitas manajemen fiskal dan pengelolaan proyek pembangunan. Stabilitas belanja modal pada beberapa provinsi lain menjadi bukti bahwa alokasi yang konsisten dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih positif, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di Sumatera.

**Tabel 4.8 Realisasi Belanja Modal Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2006-2023**

Provinsi	Jumlah Realisasi Belanja Modal (Miliar Rupiah)																		Rata-Rata
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	570.3	775.17	2609.72	5015.63	3267.91	1473.98	815.33	1855.44	2,397.50	2,025.10	2,582.41	2,168.30	2,503.94	3,162.09	1,755.47	2,199.33	2,868.71	1,676.03	<b>2206.80</b>
Pertumbuhan (%)		35.92	236.66	92.19	-34.85	-54.90	-44.69	127.57	29.21	-15.53	27.52	-16.04	15.48	26.28	-44.48	25.28	30.44	-41.58	<b>23.21</b>
Sumatera Utara	622.82	686.13	579.74	713.51	716.8	1063.23	803.6	913.4	1,145.97	932.24	1,243.29	1,919.45	1,564.90	1,249.60	1,497.94	1,141.20	1,776.12	2,629.55	<b>1177.75</b>
Pertumbuhan (%)		10.17	-15.51	23.07	0.46	48.33	-24.42	13.66	25.46	-18.65	33.37	54.38	-18.47	-20.15	19.87	-23.82	55.64	48.05	<b>12.44</b>
Sumatera Barat	248.37	259.26	362.1	431.32	583.06	594.23	645.61	700.4	785.88	788.14	1,164.09	832.18	1,099.70	1,062.23	736.89	666.35	941.07	952.72	<b>714.09</b>
Pertumbuhan (%)		4.38	39.67	19.12	35.18	1.92	8.65	8.49	12.20	0.29	47.70	-28.51	32.15	-3.41	-30.63	-9.57	41.23	1.24	<b>10.59</b>
Riau	1407.65	1508.72	1195.26	1206.07	1421.08	1342.18	1961.66	2687.86	623.64	2,014.48	2,532.12	1,941.22	1,046.85	1,161.04	919.25	1,018.46	1,508.53	2,082.95	<b>1532.17</b>
Pertumbuhan (%)		7.18	-20.78	0.90	17.83	-5.55	46.15	37.02	-76.80	223.02	25.70	-23.34	-46.07	10.91	-20.83	10.79	48.12	38.08	<b>16.02</b>
Jambi	416.79	422.44	560.25	483.92	465.86	518.75	678.74	716.1	818.05	791.3	1,087.37	895.65	784.72	866.5	642.7	449.69	906.8	1,031.00	<b>696.48</b>
Pertumbuhan (%)		1.36	32.62	-13.62	-3.73	11.35	30.84	5.50	14.24	-3.27	37.42	-17.63	-12.39	10.42	-25.83	-30.03	101.65	13.70	<b>8.98</b>
Sumatera Selatan	846.99	984.27	891.58	636.55	1033.27	1139.12	1017.13	1099.13	731.61	1,041.02	1,241.87	1,377.38	1,537.28	1,606.22	1,664.70	1,836.83	1,536.37	1,239.94	<b>1192.29</b>
Pertumbuhan (%)		16.21	-9.42	-28.60	62.32	10.24	-10.71	8.06	-33.44	42.29	19.29	10.91	11.61	4.48	3.64	10.34	-16.36	-19.29	<b>4.80</b>
Bengkulu	125.966	189.71	388.31	134.92	165.06	220.88	290.26	300.14	305.05	479.18	588.69	711.07	618.48	741.82	417.1	324.34	417.02	586.89	<b>389.16</b>
Pertumbuhan (%)		50.60	104.69	-65.25	22.34	33.82	31.41	3.40	1.64	57.08	22.85	20.79	-13.02	19.94	-43.77	-22.24	28.57	40.73	<b>17.27</b>
Lampung	326.5	269.8	208.83	236.71	425.8	631.25	831.95	970.16	925.45	868.99	1,067.23	1,451.48	1,729.33	1,014.04	752.53	849.69	1,025.33	1,207.38	<b>821.80</b>
Pertumbuhan (%)		-17.37	-22.60	13.35	79.88	48.25	31.79	16.61	-4.61	-6.10	22.81	36.00	19.14	-41.36	-25.79	12.91	20.67	17.76	<b>11.84</b>
Kep. Bangka Belitung	153.95	194.5	235.19	347.21	313.36	487.55	290.78	482.35	305.55	233.71	340.78	368.21	315.4	441.2	436.5	428.65	354.01	566.22	<b>349.73</b>
Pertumbuhan (%)		26.34	20.92	47.63	-9.75	55.59	-40.36	65.88	-36.65	-23.51	45.81	8.05	-14.34	39.89	-1.07	-1.80	-17.41	59.94	<b>13.24</b>
Kep. Riau	193.65	434.98	289.2	636.86	651.56	259.9	262.34	382.69	717.99	341.28	407.98	495.73	620.06	633.11	586.61	338.33	552.16	618.88	<b>467.96</b>
Pertumbuhan (%)		124.62	-33.51	120.21	2.31	-60.11	0.94	45.88	87.62	-52.47	19.54	21.51	25.08	2.10	-7.34	-42.32	63.20	12.08	<b>19.37</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), Data Diolah

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi di Sumatera

##### 5.1.1 Uji Asumsi Klasik

###### 5.1.1.1 Uji Normalitas

Pada output AMOS, uji normalitas dilakukan dengan membandingkan nilai C.R (*critical ratio*) pada penilaian normalitas dengan nilai kritis  $\pm 2,58$  pada taraf 0,01.

##### Provinsi Aceh

**Tabel 5.1** Hasil Uji Normalitas Provinsi Aceh

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	,000	1765,010	,813	1,409	-1,085	-,940
DBHP	77,430	272,360	-,425	-,736	-,564	-,488
PAD	476,900	2987,190	,042	,074	-1,630	-1,412
BM	570,300	5015,630	,737	1,276	1,152	,998
Multivariate					2,417	,740

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa nilai normalitas multivariate sebesar  $0,740 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

##### Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 5.2** Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Utara

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	1,360	177,690	1,865	3,230	2,925	2,534
DBHP	240,830	691,300	,769	1,331	-,328	-,284
PAD	379,380	7258,020	-,065	-,113	-1,526	-1,322
BM	579,740	2629,550	1,168	2,023	,981	,850
Multivariate					6,176	1,891

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.2 terlihat nilai normalitas multivariate sebesar  $1,891 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 5.3** Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Barat

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	1,290	42,240	,972	1,684	,147	,127
DBHP	71,450	183,060	-,006	-,011	-1,471	-1,274
PAD	494,920	2851,970	-,098	-,171	-1,337	-1,158
BM	248,370	1164,090	-,140	-,242	-,820	-,710
Multivariate					1,053	,322

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 5.3 terlihat nilai normalitas multivariate sebesar  $0,322 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Riau

**Tabel 5.4** Hasil Uji Normalitas Provinsi Riau

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	446,590	2698,590	,213	,369	-1,517	-1,313
DBHP	79,690	1495,830	,894	1,548	,459	,398
PAD	964,660	5866,450	,297	,514	-,404	-,350
BM	623,640	2687,860	,551	,955	-,491	-,425
Multivariate					,950	,291

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui bahwa nilai normalitas multivariate sebesar  $0,291 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Jambi

**Tabel 5.5** Hasil Uji Normalitas Provinsi Jambi

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	122,430	450,810	,616	1,067	-,139	-,121
DBHP	128,280	273,810	,860	1,489	,653	,566
PAD	372,440	2163,590	,017	,029	-1,161	-1,006
BM	416,790	1087,370	,217	,376	-1,135	-,983
Multivariate					6,909	2,115

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa nilai normalitas multivariate sebesar  $2,115 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 5.6** Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Selatan

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	449,530	1706,750	,781	1,353	-,108	-,094
DBHP	253,330	1219,270	,582	1,008	-,359	-,311
PAD	741,950	5199,840	,407	,705	-,660	-,572
BM	636,550	1836,830	,268	,464	-,881	-,763
Multivariate					,069	,021

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 5.6 dapat diketahui bahwa nilai normalitas multivariate sebesar  $0,021 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Bengkulu

**Tabel 5.7** Hasil Uji Normalitas Provinsi Bengkulu

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	,859	84,360	,712	1,234	-,787	-,681
DBHP	7,480	82,570	-,062	-,107	,225	,195
PAD	165,100	1088,420	-,037	-,064	-1,102	-,954
BM	125,966	741,820	,360	,624	-1,031	-,893
Multivariate					,952	,292

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 5.7 dapat diketahui nilai normalitas multivariate sebesar  $0,292 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Lampung

**Tabel 5.8** Hasil Uji Normalitas Provinsi Lampung

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	40,780	145,690	-,091	-,158	-1,317	-1,141
DBHP	78,280	186,590	-,015	-,027	-1,120	-,970
PAD	631,980	3766,190	-,083	-,144	-1,230	-1,065
BM	208,830	1729,330	,243	,422	-,411	-,356
Multivariate					-1,831	-,561

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 5.8 dapat dilihat bahwa nilai normalitas multivariate sebesar  $-0,561 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Kep. Bangka Belitung

**Tabel 5.9** Hasil Uji Normalitas Provinsi Kep. Bangka Belitung

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	35,840	441,790	2,084	3,610	4,712	4,080
DBHP	24,460	95,390	,714	1,237	,031	,027
PAD	198,170	1090,480	,253	,438	-1,008	-,873
BM	153,950	566,220	,108	,187	-,616	-,534
Multivariate					5,399	1,653

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.9 dapat diketahui nilai normalitas multivariate sebesar  $1,653 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Kep. Riau

**Tabel 5.10** Hasil Uji Normalitas Provinsi Kep. Riau

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	,000	761,690	-,169	-,293	-,532	-,461
DBHP	103,440	1110,420	3,589	6,217	11,659	10,097
PAD	281,830	1806,970	,215	,373	-,983	-,851
BM	193,650	717,990	-,120	-,208	-1,378	-1,193
Multivariate					6,697	2,050

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.10 dapat diketahui nilai normalitas multivariate sebesar  $2,050 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### 5.1.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Kehadiran multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel-variabel independen sangat berkorelasi satu sama lain, yang dapat menyebabkan estimasi model tidak akurat.

## Provinsi Aceh

**Tabel 5.11** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Aceh

	Estimate
PAD <--> DBHBP	-,650
DBHP <--> DBHBP	-,190
PAD <--> DBHP	-,229

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.11 dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga disimpulkan tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

## Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 5.12** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Utara

	Estimate
PAD <--> DBHBP	,744
DBHP <--> DBHBP	,642
PAD <--> DBHP	,330

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.12 terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$  sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi antar variabel eksogen.

## Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 5.13** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Barat

	Estimate
PAD <--> DBHBP	,861
DBHP <--> DBHBP	,476
PAD <--> DBHP	,634

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.13 terlihat nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

## Provinsi Riau

**Tabel 5.14** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Riau

	Estimate
PAD <--> DBHBP	-,670
DBHP <--> DBHBP	-,216
PAD <--> DBHP	,428

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.14 terlihat nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$  sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi antar variabel eksogen.

**Provinsi Jambi**

**Tabel 5.15** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Jambi

	Estimate
PAD <--> DBHBP	,574
DBHP <--> DBHBP	,504
PAD <--> DBHP	,654

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan Tabel 5.15 terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$  sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi antar variabel eksogen.

**Provinsi Sumatera Selatan**

**Tabel 5.16** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Selatan

	Estimate
PAD <--> DBHBP	,726
DBHP <--> DBHBP	,420
PAD <--> DBHP	,850

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan Tabel 5.16 terlihat nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$  sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi antar variabel eksogen.

**Provinsi Bengkulu**

**Tabel 5.17** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Bengkulu

	Estimate
PAD <--> DBHBP	,667
DBHP <--> DBHBP	,355
PAD <--> DBHP	,406

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$  sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi antar variabel eksogen.

## Provinsi Lampung

**Tabel 5.18** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Lampung

	Estimate
PAD <--> DBHBP	-,347
DBHP <--> DBHBP	,020
PAD <--> DBHP	,531

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.18 dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

## Provinsi Kep. Bangka Belitung

**Tabel 5.19** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Kep. Bangka Belitung

	Estimate
PAD <--> DBHBP	,793
DBHP <--> DBHBP	,685
PAD <--> DBHP	,659

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.19 dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

## Provinsi Kep. Riau

**Tabel 5.20** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Kep. Riau

	Estimate
PAD <--> DBHBP	-,031
DBHP <--> DBHBP	-,517
PAD <--> DBHP	-,047

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.20 terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$  sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi antar variabel eksogen.

### 5.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda

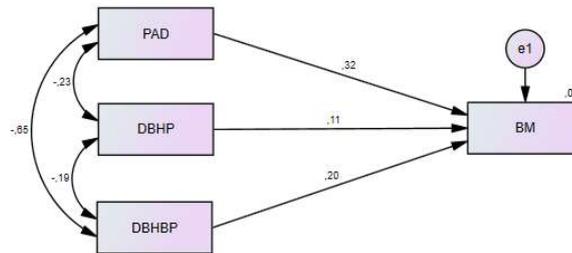
Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Provinsi Aceh**

**Tabel 5.21** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Aceh

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,372	,409	,909	,363	
BM <--- DBHP	2,219	5,525	,402	,688	
BM <--- DBHBP	,312	,549	,568	,570	

Sumber : Data Diolah (2025)



**Gambar 7** Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Aceh

$$BM = 0,372 \text{ PAD} + 2,219 \text{ DBHP} + 0,312 \text{ DBHBP}$$

Dari tabel 5.21 terlihat nilai koefisien variabel PAD sebesar 0,372 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% maka variabel BM akan mengalami kenaikan sebesar 0,372%.

Nilai koefisien variabel DBHP sebesar 2,219 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan DBHP sebesar 1% maka variabel BM akan mengalami kenaikan sebesar 2,219%.

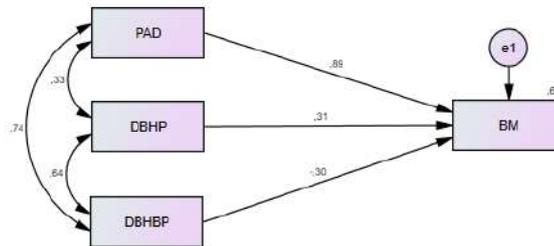
Nilai koefisien variabel DBHBP sebesar 0,312 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan DBHBP sebesar 1% maka variabel BM akan mengalami kenaikan DBHBP. 0,312%.

**Provinsi Sumatera Utara**

**Tabel 5.22** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Sumatera Utara

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,192	,049	3,938	***	
BM <--- DBHP	1,238	,793	1,561	,118	
BM <--- DBHBP	-3,435	3,215	-1,068	,285	

Sumber : Data Diolah (2025)



**Gambar 8** Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Sumatera Utara

$$BM = 0,192 \text{ PAD} + 1,238 \text{ DBHP} - 3,435 \text{ DBHBP}$$

Dari tabel 5.22 terlihat nilai koefisien variabel PAD sebesar 0,192 yang berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1% maka variabel BM akan mengalami kenaikan sebesar 0,192%.

Nilai koefisien variabel DBHP sebesar 1,238 yang berarti setiap kenaikan DBHP sebesar 1% maka variabel BM akan mengalami kenaikan sebesar 1,238%.

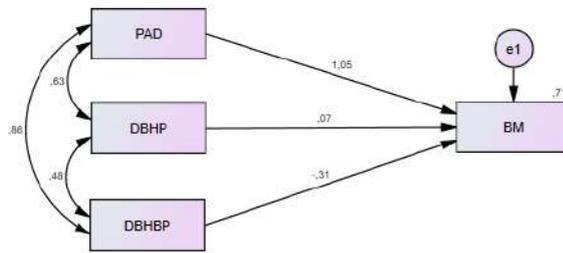
Nilai koefisien variabel DBHBP sebesar -3,435 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan DBHBP sebesar 1% maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 3,435 %.

**Provinsi Sumatera Barat**

**Tabel 5.23** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Sumatera Barat

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,382	,108	3,550	***	
BM <--- DBHP	,566	1,301	,435	,663	
BM <--- DBHBP	-7,347	6,090	-1,207	,228	

Sumber : Data Diolah (2025)



**Gambar 9** Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Sumatera Barat

$$BM = 0,382 \text{ PAD} + 0,566 \text{ DBHP} - 7,347 \text{ DBHBP}$$

Tabel 5.23 menunjukkan nilai koefisien PAD sebesar 0,382, yang berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1%, variabel BM akan naik sebesar 0,382%.

Nilai koefisien DBHP sebesar 0,566, yang berarti setiap kenaikan DBHP sebesar 1%, variabel BM akan naik sebesar 0,566%.

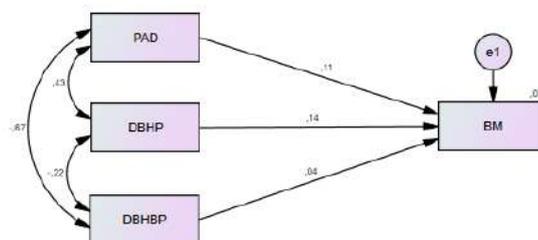
Nilai koefisien variabel DBHBP sebesar -7,347, yang berarti setiap kenaikan DBHBP sebesar 1%, variabel BM akan turun. 7,347%.

**Provinsi Riau**

**Tabel 5.24** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Riau

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,047	,147	,318	,750	
BM <--- DBHP	,202	,396	,510	,610	
BM <--- DBHBP	,033	,242	,136	,892	

Sumber : Data Diolah (2025)



**Gambar 10** Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Riau

$$BM = 0,047 \text{ PAD} + 0,202 \text{ DBHP} + 0,033 \text{ DBHBP}$$

Tabel 5.24 menunjukkan nilai koefisien PAD sebesar 0,047, yang berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1%, variabel BM akan naik sebesar 0,047%.

Nilai koefisien DBHP sebesar 0,202, yang berarti setiap kenaikan DBHP sebesar 1%, variabel BM akan naik sebesar 0,202%.

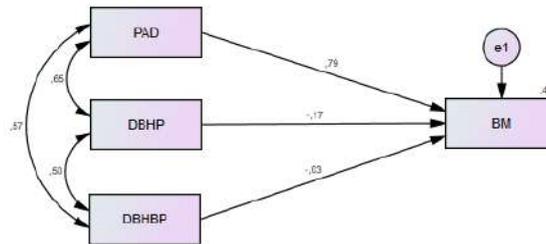
Nilai koefisien DBHBP sebesar 0,033, yang berarti setiap kenaikan DBHBP sebesar 1%, variabel BM akan naik sebesar 0,033%.

**Provinsi Jambi**

**Tabel 5.25** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Jambi

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,308	,099	3,116	,002	
BM <--- DBHP	-,993	1,379	-,720	,471	
BM <--- DBHBP	-,069	,518	-,134	,894	

Sumber : Data Diolah (2025)



**Gambar 11** Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Jambi

$$BM = 0,308 \text{ PAD} - 0,993 \text{ DBHP} - 0,069 \text{ DBHBP}$$

Tabel 5.25 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai 0,308 yang berarti setiap kenaikan 1% PAD maka variabel BM akan mengalami kenaikan sebesar 0,308%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai -0,933 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% DBHP maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,933%.

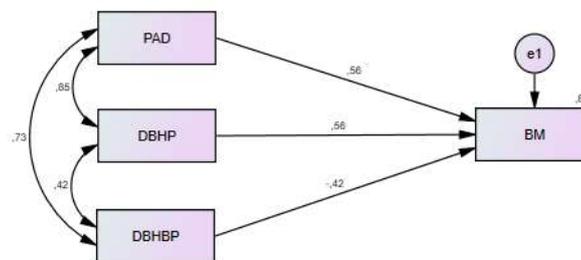
Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai -0,069 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% DBHBP maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,069%.

**Provinsi Sumatera Selatan**

**Tabel 5. 26** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Sumatera Selatan

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,145	,081	1,774	,076	
BM <--- DBHP	,718	,306	2,348	,019	
BM <--- DBHBP	-,387	,170	-2,278	,023	

Sumber : Data Diolah (2025)



**Gambar 12** Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Sumatera Selatan

$$BM = 0,145 PAD + 0,718 DBHP - 0,387 DBHBP$$

Tabel 5.26 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai 0,145 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% PAD maka variabel BM akan naik sebesar 0,145%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai 0,718 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% DBHP maka variabel BM akan naik sebesar 0,718 %.

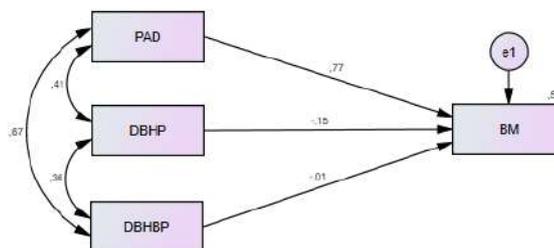
Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai -0,387 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% DBHBP maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,387%.

## Provinsi Bengkulu

**Tabel 5.27** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Bengkulu

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,531	,163	3,261	,001	
BM <--- DBHP	-1,639	2,089	-,785	,433	
BM <--- DBHBP	-,066	1,609	-,041	,967	

Sumber : Data Diolah (2025)



**Gambar 13** Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Bengkulu

$$BM = 0,531 \text{ PAD} - 1,639 \text{ DBHP} - 0,066 \text{ DBHBP}$$

Tabel 5.27 menunjukkan nilai koefisien PAD sebesar 0,531 yang berarti setiap kenaikan 1% PAD maka variabel BM akan mengalami kenaikan sebesar 0,531%.

Nilai koefisien DBHP bernilai -1,639 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% DBHP maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 1,639%.

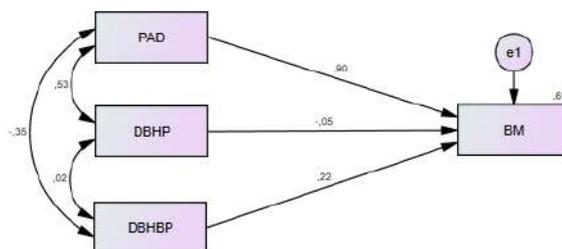
Nilai koefisien DBHBP bernilai -0,066 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% DBHBP maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,066%.

## Provinsi Lampung

**Tabel 5.28** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Lampung

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,366	,074	4,969	***	
BM <--- DBHP	-,644	2,221	-,290	,772	
BM <--- DBHBP	2,572	1,822	1,412	,158	

Sumber : Data Diolah (2025)



**Gambar 14** Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Lampung

$$BM = 0,366 \text{ PAD} - 0,644 \text{ DBHP} + 2,572 \text{ DBHBP}$$

Tabel 5.28 menunjukkan koefisien sebesar 0,366 untuk variabel PAD, yang berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1% maka variabel BM akan mengalami kenaikan sebesar 0,366%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai -0,644 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% DBHP maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,644%.

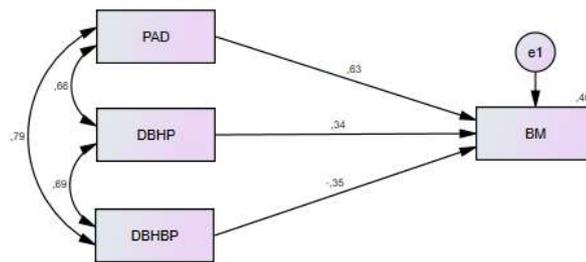
Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai 2,572 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% DBHBP maka variabel BM akan mengalami kenaikan sebesar 2,572%.

### Provinsi Kep. Bangka Belitung

**Tabel 5.29** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Kep. Bangka Belitung

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,252	,129	1,950	,051	
BM <--- DBHP	2,022	1,595	1,267	,205	
BM <--- DBHBP	-,413	,388	-1,064	,287	

*Sumber : Data Diolah (2025)*



**Gambar 15** Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Kep. Bangka Belitung

$$BM = 0,252 \text{ PAD} + 2,022 \text{ DBHP} - 0,413 \text{ DBHBP}$$

Pada tabel 5.29 terlihat nilai koefisien variabel PAD sebesar 0,252 yang berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1% maka variabel BM akan mengalami kenaikan sebesar 0,252%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai 2,022 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% DBHP maka variabel BM akan mengalami kenaikan sebesar 2,022%.

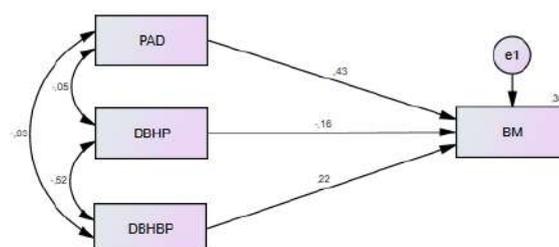
Nilai koefisien DBHBP bernilai -0,413 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% DBHBP maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,413%.

**Provinsi Kep. Riau**

**Tabel 5.30** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Kep. Riau

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,154	,072	2,126	,034	
BM <--- DBHP	-,116	,176	-,655	,512	
BM <--- DBHBP	,178	,190	,939	,348	

*Sumber : Data Diolah (2025)*



**Gambar 16** Model Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi Kep. Riau

$$BM = 0,154 \text{ PAD} - 0,116 \text{ DBHP} + 0,178 \text{ DBHBP}$$

Pada tabel 5.30 terlihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai 0,154 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% PAD maka variabel BM akan mengalami kenaikan sebesar 0,154%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai -0,116 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% DBHP maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,116%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai 0,178 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% DBHBP maka variabel BM akan mengalami kenaikan sebesar 0,178%.

### 5.1.3 Uji Hipotesis

#### 5.1.3.1 Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

#### Provinsi Aceh

**Tabel 5.31** Hasil Uji F Provinsi Aceh

	Estimate
BM	,047

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Nilai F hitung

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,047/3}{(1 - 0,047)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,0156}{0,953/14}$$

$$Fh = \frac{0,0156}{0,0680}$$

$$Fh = 0,2294$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $0,2294 < 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap BM Provinsi Aceh.

### Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 5.32** Hasil Uji F Provinsi Sumatera Utara

	Estimate
BM	,645

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Nilai F hitung

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,645/3}{(1 - 0,645)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,215}{0,355/14}$$

$$Fh = \frac{0,215}{0,0253}$$

$$Fh = 8,498$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $8,498 > 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM Provinsi Sumatera Utara.

### Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 5.33** Hasil Uji F Provinsi Sumatera Barat

	Estimate
BM	,713

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Nilai F hitung

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,713/3}{(1 - 0,713)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,2376}{0,287/14}$$

$$Fh = \frac{0,2376}{0,0205}$$

$$Fh = 11,5902$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $11,5902 > 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM Provinsi Sumatera Barat.

### Provinsi Riau

**Tabel 5.34** Hasil Uji F Provinsi Riau

	Estimate
BM	,036

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Nilai F hitung

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,036/3}{(1 - 0,036)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,012}{0,964/14}$$

$$Fh = \frac{0,012}{0,0688}$$

$$Fh = 0,1744$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $0,1744 < 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap BM Provinsi Riau.

**Provinsi Jambi**

**Tabel 5.35** Hasil Uji F Provinsi Jambi

	Estimate
BM	,458

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Nilai F hitung

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,458/3}{(1 - 0,458)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,1526}{0,542/14}$$

$$Fh = \frac{0,1526}{0,0387}$$

$$Fh = 3,9431$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $3,9431 > 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM Provinsi Jambi.

**Provinsi Sumatera Selatan**

**Tabel 5.36** Hasil Uji F Provinsi Sumatera Selatan

	Estimate
BM	,808

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Nilai F hitung

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,808/3}{(1 - 0,808)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,2693}{0,192/14}$$

$$Fh = \frac{0,2693}{0,0137}$$

$$Fh = 19,6569$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $19,6569 > 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM Provinsi Sumatera Selatan.

### Provinsi Bengkulu

**Tabel 5.37** Hasil Uji F Provinsi Bengkulu

	Estimate
BM	,509

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Nilai F hitung

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,509/3}{(1 - 0,509)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,1696}{0,491/14}$$

$$Fh = \frac{0,1696}{0,035}$$

$$Fh = 4,8457$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $4,8457 > 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM Provinsi Bengkulu.

### Provinsi Lampung

**Tabel 5.38** Hasil Uji F Provinsi Lampung

	Estimate
BM	,673

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Nilai F hitung

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,673/3}{(1 - 0,673)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,2243}{0,327/14}$$

$$Fh = \frac{0,2243}{0,0233}$$

$$Fh = 9,6266$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $9,6266 > 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM Provinsi Lampung.

### Provinsi Kep. Bangka Belitung

**Tabel 5.39** Hasil Uji F Provinsi Kep. Bangka Belitung

	Estimate
BM	,396

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Nilai F hitung

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,396/3}{(1 - 0,396)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,132}{0,604/14}$$

$$Fh = \frac{0,132}{0,0431}$$

$$Fh = 3,0626$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $3,0626 < 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap BM Provinsi Kep. Bangka Belitung.

#### Provinsi Kep. Riau

**Tabel 5.40** Hasil Uji F Provinsi Kep. Riau

	Estimate
BM	,298

Sumber : Data Diolah (2025)

Nilai F hitung

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,298/3}{(1 - 0,298)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,0993}{0,702/14}$$

$$Fh = \frac{0,0933}{0,0501}$$

$$Fh = 1,8622$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $3,0626 < 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap BM Provinsi Kep. Riau.

### 5.1.3.2 Uji t

Uji statistik t ditujukan guna mengetahui pengaruh variabel independen pada variabel dependen secara parsial.

#### Provinsi Aceh

**Tabel 5.41** Hasil Uji t Provinsi Aceh

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,372	,409	,909	,363	
BM <--- DBHP	2,219	5,525	,402	,688	
BM <--- DBHBP	,312	,549	,568	,570	

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 0,909 dan nilai P Value sebesar  $0,363 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap BM Provinsi Aceh.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 0,402 dan nilai P Value sebesar  $0,688 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHP terhadap BM Provinsi Aceh.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar 0,568 dan nilai P Value sebesar  $0,570 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHBP terhadap BM Provinsi Aceh.

#### Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 5.42** Hasil Uji t Provinsi Sumatera Utara

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,192	,049	3,938	***	
BM <--- DBHP	1,238	,793	1,561	,118	
BM <--- DBHBP	-3,435	3,215	-1,068	,285	

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 3,938 dan nilai P Value sebesar  $0,000 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap BM Provinsi Sumatera Utara.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 1,561 dan nilai P Value sebesar  $0,118 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan DBHP terhadap BM Provinsi Sumatera Utara.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar -1,068 dan nilai P Value sebesar  $0,285 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHBP terhadap BM Provinsi Sumatera Utara.

### Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 5.43** Hasil Uji t Provinsi Sumatera Barat

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,382	,108	3,550	***	
BM <--- DBHP	,566	1,301	,435	,663	
BM <--- DBHBP	-7,347	6,090	-1,207	,228	

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 3,550 dan nilai P Value sebesar  $0,000 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap BM Provinsi Sumatera Barat.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 0,435 dan nilai P Value sebesar  $0,663 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHP terhadap BM Provinsi Sumatera Barat.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar -1,207 dan nilai P Value sebesar  $0,228 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHBP terhadap BM Provinsi Sumatera Barat.

### Provinsi Riau

**Tabel 5.44** Hasil Uji t Provinsi Riau

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,047	,147	,318	,750	
BM <--- DBHP	,202	,396	,510	,610	
BM <--- DBHBP	,033	,242	,136	,892	

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 0,318 dan nilai P Value sebesar 0,750 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap BM Provinsi Riau.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 0,510 dan nilai P Value sebesar 0,610 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHP terhadap BM Provinsi Riau.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar 0,136 dan nilai P Value sebesar 0,892 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHBP terhadap BM Provinsi Riau.

### Provinsi Jambi

**Tabel 5.45** Hasil Uji t Provinsi Jambi

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,308	,099	3,116	,002	
BM <--- DBHP	-,993	1,379	-,720	,471	
BM <--- DBHBP	-,069	,518	-,134	,894	

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 3,116 dan nilai P Value sebesar 0,002 < 0,15, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap BM Provinsi Jambi.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar -0,720 dan nilai P Value sebesar 0,471 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHP terhadap BM Provinsi Jambi.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar -0,134 dan nilai P Value sebesar 0,894 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHBP terhadap BM Provinsi Jambi.

### Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 5.46** Hasil Uji t Provinsi Sumatera Selatan

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,145	,081	1,774	,076	
BM <--- DBHP	,718	,306	2,348	,019	
BM <--- DBHBP	-,387	,170	-2,278	,023	

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 1,774 dan nilai P Value sebesar  $0,076 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap BM Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 2,348 dan nilai P Value sebesar  $0,019 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan DBHP terhadap BM Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar -2,278 dan nilai P Value sebesar  $0,023 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan DBHBP terhadap BM Provinsi Sumatera Selatan.

### Provinsi Bengkulu

**Tabel 5.47** Hasil Uji t Provinsi Bengkulu

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,531	,163	3,261	,001	
BM <--- DBHP	-1,639	2,089	-,785	,433	
BM <--- DBHBP	-,066	1,609	-,041	,967	

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 3,261 dan nilai P Value sebesar  $0,001 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap BM Provinsi Bengkulu.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar -0,785 dan nilai P Value sebesar  $0,433 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHP terhadap BM Provinsi Bengkulu.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar -0,041 dan nilai P Value sebesar  $0,967 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHBP terhadap BM Provinsi Bengkulu.

### Provinsi Lampung

**Tabel 5.48** Hasil Uji t Provinsi Lampung

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,366	,074	4,969	***	
BM <--- DBHP	-,644	2,221	-,290	,772	
BM <--- DBHBP	2,572	1,822	1,412	,158	

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 4,969 dan nilai P Value sebesar  $0,000 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap BM Provinsi Lampung.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar -0,290 dan nilai P Value sebesar  $0,772 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHP terhadap BM Provinsi Lampung.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar 1,412 dan nilai P Value sebesar  $0,158 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHBP terhadap BM Provinsi Lampung.

### Provinsi Kep. Bangka Belitung

**Tabel 5.49** Hasil Uji t Provinsi Kep. Bangka Belitung

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,252	,129	1,950	,051	
BM <--- DBHP	2,022	1,595	1,267	,205	
BM <--- DBHBP	-,413	,388	-1,064	,287	

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 1,950 dan nilai P Value sebesar  $0,051 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap BM Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 1,267 dan nilai P Value sebesar  $0,205 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHP terhadap BM Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar -1,064 dan nilai P Value sebesar  $0,287 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHBP terhadap BM Provinsi Kep. Bangka Belitung.

### Provinsi Kep. Riau

**Tabel 5.50** Hasil Uji t Provinsi Kep. Riau

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,154	,072	2,126	,034	
BM <--- DBHP	-,116	,176	-,655	,512	
BM <--- DBHBP	,178	,190	,939	,348	

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 2,126 dan nilai P Value sebesar  $0,034 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap BM Provinsi Kep. Riau.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar -0,655 dan nilai P Value sebesar  $0,512 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHP terhadap BM Provinsi Kep. Riau.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar 10,939 dan nilai P Value sebesar  $0,348 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan DBHBP terhadap BM Provinsi Kep. Riau.

#### 5.1.4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dirujukan untuk mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan variasi atau perbedaan dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

##### Provinsi Aceh

**Tabel 5.51** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Aceh

	Estimate
BM	,047

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,047 atau 4,7%. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 4,7%, sedangkan sisanya yaitu 95,3% ( $100 - \text{nilai R Square}$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

##### Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 5.52** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Sumatera Utara

	Estimate
BM	,645

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,645 atau 64,5%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar

64,5%, sedangkan sisanya yaitu 35,5% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 5.53** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Sumatera Barat

	Estimate
BM	,713

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,713 atau 71,3%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 71,3%, sedangkan sisanya yaitu 28,7% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Provinsi Riau

**Tabel 5.54** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Riau

	Estimate
BM	,036

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,036 atau 3,6%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 3,6%, sedangkan sisanya yaitu 96,4% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Provinsi Jambi

**Tabel 5.55** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Jambi

	Estimate
BM	,458

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,458 atau 45,8%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 45,8%, sedangkan sisanya yaitu 54,2% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 5.56** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Sumatera Selatan

	Estimate
BM	,808

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,808 atau 80,8%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 80,8%, sedangkan sisanya yaitu 19,2% ( $100 - \text{nilai R Square}$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Provinsi Bengkulu

**Tabel 5.57** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Bengkulu

	Estimate
BM	,509

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,509 atau 50,9%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 50,9%, sedangkan sisanya yaitu 49,1% ( $100 - \text{nilai R Square}$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Provinsi Lampung

**Tabel 5.58** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Lampung

	Estimate
BM	,673

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,673 atau 67,3%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 67,3%, sedangkan sisanya yaitu 32,7% ( $100 - \text{nilai R Square}$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## Provinsi Kep. Bangka Belitung

**Tabel 5.59** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Kep. Bangka Belitung

	Estimate
BM	,396

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,396 atau 39,6%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 39,6%, sedangkan sisanya yaitu 60,4% ( $100 - \text{nilai R Square}$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## Provinsi Kep. Riau

**Tabel 5.60** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Kep. Riau

	Estimate
BM	,298

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,298 atau 29,8%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 29,8%, sedangkan sisanya yaitu 70,2% ( $100 - \text{nilai R Square}$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## 5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera

### 5.2.1 Uji Asumsi Klasik

#### 5.1.1.1 Uji Normalitas

Dalam output AMOS, uji normalitas dilakukan dengan membandingkan nilai C.R (*critical ratio*) pada *assessment of normality* dengan nilai kritis  $\pm 2,58$  pada level 0,01.

## Provinsi Aceh

**Tabel 5.61** Hasil Uji Normalitas Provinsi Aceh

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	,000	1765,010	,813	1,409	-1,085	-,940
DBHP	77,430	272,360	-,425	-,736	-,564	-,488
PAD	476,900	2987,190	,042	,074	-1,630	-1,412
BM	570,300	5015,630	,737	1,276	1,152	,998
PDRB	-3,770	43,510	2,297	3,978	5,515	4,776
Multivariate					8,404	2,131

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5.61 menunjukkan nilai normalitas multivariate sebesar  $2,131 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 5.62** Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Utara

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	379,380	7258,020	-,065	-,113	-1,526	-1,322
DBHBP	1,360	177,690	1,865	3,230	2,925	2,534
DBHP	240,830	691,300	,769	1,331	-,328	-,284
BM	579,740	2629,550	1,168	2,023	,981	,850
PDRB	1,180	40,080	2,552	4,421	7,350	6,365
Multivariate					10,026	2,542

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5.62 terlihat bahwa nilai normalitas multivariate sebesar  $2,542 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 5.63** Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Barat

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	494,920	2851,970	-,098	-,171	-1,337	-1,158
DBHBP	1,290	42,240	,972	1,684	,147	,127
DBHP	71,450	183,060	-,006	-,011	-1,471	-1,274
BM	248,370	1164,090	-,140	-,242	-,820	-,710
PDRB	-1,840	37,650	1,767	3,060	4,502	3,899
Multivariate					2,522	,639

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5.63 terlihat bahwa nilai normalitas multivariate sebesar  $0,639 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Riau

**Tabel 5.64** Hasil Uji Normalitas Provinsi Riau

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	964,660	5866,450	,297	,514	-,404	-,350
DBHBP	446,590	2698,590	,213	,369	-1,517	-1,313
DBHP	79,690	1495,830	,894	1,548	,459	,398
BM	623,640	2687,860	,551	,955	-,491	-,425
PDRB	-4,910	31,620	,051	,088	-,928	-,803
Multivariate					-,464	-,118

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5.64 menunjukkan nilai normalitas multivariate sebesar  $-0,118 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Jambi

**Tabel 5.65** Hasil Uji Normalitas Provinsi Jambi

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	122,430	450,810	,616	1,067	-,139	-,121
DBHP	128,280	273,810	,860	1,489	,653	,566
PAD	372,440	2163,590	,017	,029	-1,161	-1,006
BM	416,790	1087,370	,217	,376	-1,135	-,983
PDRB	-5,800	111,650	3,226	5,588	10,008	8,667
Multivariate					12,664	3,211

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5.65 terlihat bahwa nilai normalitas multivariate sebesar  $3,211 > 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

## Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 5.66** Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Selatan

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	741,950	5199,840	,407	,705	-,660	-,572
DBHBP	449,530	1706,750	,781	1,353	-,108	-,094
DBHP	253,330	1219,270	,582	1,008	-,359	-,311
BM	636,550	1836,830	,268	,464	-,881	-,763
PDRB	-,140	42,070	1,791	3,103	3,843	3,328
Multivariate					2,165	,549

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5.66 menunjukkan nilai normalitas multivariate sebesar  $0,549 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Bengkulu

**Tabel 5.67** Hasil Uji Normalitas Provinsi Bengkulu

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	165,100	1088,420	-,037	-,064	-1,102	-,954
DBHBP	,859	84,360	,712	1,234	-,787	-,681
DBHP	7,480	82,570	-,062	-,107	,225	,195
BM	125,966	741,820	,360	,624	-1,031	-,893
PDRB	1,610	82,530	3,683	6,380	12,152	10,524
Multivariate					7,523	1,907

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5.67 terlihat bahwa nilai normalitas multivariate sebesar  $1,907 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Lampung

**Tabel 5.68** Hasil Uji Normalitas Provinsi Lampung

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	631,980	3766,190	-,083	-,144	-1,230	-1,065
DBHBP	40,780	145,690	-,091	-,158	-1,317	-1,141
DBHP	78,280	186,590	-,015	-,027	-1,120	-,970
BM	208,830	1729,330	,243	,422	-,411	-,356
PDRB	-2,120	70,470	2,832	4,905	8,179	7,083
Multivariate					3,756	,952

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5.68 menunjukkan nilai normalitas multivariate sebesar  $0,952 < 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Provinsi Kep. Bangka Belitung

**Tabel 5.69** Hasil Uji Normalitas Provinsi Kep. Bangka Belitung

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	198,170	1090,480	,253	,438	-1,008	-,873
DBHBP	35,840	441,790	2,084	3,610	4,712	4,080
DBHP	24,460	95,390	,714	1,237	,031	,027
BM	153,950	566,220	,108	,187	-,616	-,534
PDRB	-,410	57,260	2,935	5,084	8,673	7,511
Multivariate					10,430	2,644

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5.69 terlihat bahwa nilai normalitas multivariate sebesar  $2,644 > 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

## Provinsi Kep. Riau

**Tabel 5.70** Hasil Uji Normalitas Provinsi Kep. Riau

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	281,830	1806,970	,215	,373	-,983	-,851
DBHBP	,000	761,690	-,169	-,293	-,532	-,461
DBHP	103,440	1110,420	3,589	6,217	11,659	10,097
BM	193,650	717,990	-,120	-,208	-1,378	-1,193
PDRB	-5,220	74,080	3,310	5,734	10,643	9,217
Multivariate					12,957	3,285

*Sumber: Data diolah (2025)*

Tabel 5.70 terlihat bahwa nilai normalitas multivariate sebesar  $3,285 > 2,58$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

### 5.1.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Adanya multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen saling berkorelasi tinggi, yang dapat mengakibatkan estimasi model menjadi tidak tepat.

## Provinsi Aceh

**Tabel 5.71** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Aceh

	Estimate
PAD <--> DBHP	-,229
DBHP <--> DBHBP	-,190
PAD <--> DBHBP	-,650

*Sumber: Data diolah (2025)*

Tabel 5.71 menunjukkan nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

## Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 5.72** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Utara

	Estimate
DBHP <--> PAD	,330
DBHP <--> DBHBP	,642
DBHBP <--> PAD	,744

*Sumber: Data diolah (2025)*

Tabel 5.72 terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

### Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 5.73** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Barat

	Estimate
DBHP <--> PAD	,634
DBHP <--> DBHBP	,476
DBHBP <--> PAD	,861

*Sumber: Data diolah (2025)*

Tabel 5.73 terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

### Provinsi Riau

**Tabel 5.74** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Riau

	Estimate
DBHP <--> PAD	,428
DBHP <--> DBHBP	-,216
DBHBP <--> PAD	-,670

*Sumber: Data diolah (2025)*

Tabel 5.74 menunjukkan nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

### Provinsi Jambi

**Tabel 5.75** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Jambi

	Estimate
DBHP <--> DBHBP	,504
PAD <--> DBHP	,654
PAD <--> DBHBP	,574

*Sumber: Data diolah (2025)*

Tabel 5.75 terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

### Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 5.76** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Selatan

	Estimate
DBHP <--> PAD	,850
DBHP <--> DBHBP	,420
DBHBP <--> PAD	,726

*Sumber: Data diolah (2025)*

Tabel 5.76 terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

### Provinsi Bengkulu

**Tabel 5.77** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Bengkulu

	Estimate
DBHP <--> PAD	,406
DBHP <--> DBHBP	,355
DBHBP <--> PAD	,667

*Sumber: Data diolah (2025)*

Tabel 5.77 menunjukkan nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

### Provinsi Lampung

**Tabel 5.78** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Lampung

	Estimate
DBHP <--> PAD	,531
DBHP <--> DBHBP	,020
DBHBP <--> PAD	-,347

*Sumber: Data diolah (2025)*

Tabel 5.78 terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

### Provinsi Kep. Bangka Belitung

**Tabel 5.79** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Kep. Bangka Belitung

	Estimate
DBHP <--> PAD	,659
DBHP <--> DBHBP	,685
DBHBP <--> PAD	,793

*Sumber: Data diolah (2025)*

Tabel 5.79 terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

### Provinsi Kep. Riau

**Tabel 5.80** Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Kep. Riau

	Estimate
DBHP <--> PAD	-,047
DBHP <--> DBHBP	-,517
DBHBP <--> PAD	-,031

*Sumber: Data diolah (2025)*

Tabel 5.80 terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel eksogen  $< 1,00$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel eksogen.

### 5.2.2 Analisis Jalur

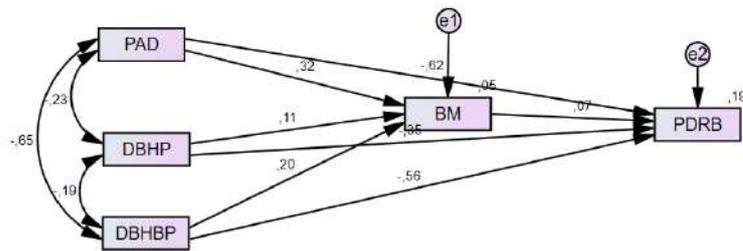
Tujuan utama analisis jalur adalah untuk mengidentifikasi dan menguji hubungan sebab-akibat antara berbagai variabel dalam suatu model secara sistematis. Dengan menghitung koefisien jalur, analisis jalur memberikan gambaran yang jelas tentang besar dan arah pengaruh antar variabel.

### Provinsi Aceh

**Tabel 5.81** Hasil Analisis Jalur Provinsi Aceh

	Estimate
BM <--- PAD	,322
BM <--- DBHP	,110
BM <--- DBHBP	,199
PDRB <--- BM	,072
PDRB <--- DBHBP	-,558
PDRB <--- DBHP	-,346
PDRB <--- PAD	-,624

*Sumber: Data diolah (2025)*



**Gambar 17** Model Analisis Jalur Provinsi Aceh

$$BM = 0,322 \text{ PAD} + 0,110 \text{ DBHP} + 0,199 \text{ DBHBP}$$

Tabel 5.81 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai positif yaitu sebesar 0,322, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,322%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai positif yaitu sebesar 0,110, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,110%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai positif yaitu sebesar 0,199, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,199%.

$$PDRB = -0,624 \text{ PAD} - 0,346 \text{ DBHP} + 0,558 \text{ DBHBP} + 0,072 \text{ BM}$$

Tabel 5.81 dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai positif yaitu sebesar -0,624, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,624%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai negatif yaitu sebesar -0,346, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,346%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai negatif yaitu sebesar -0,558, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,558%.

Nilai koefisien variabel BM bernilai positif yaitu sebesar 0,072, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel BM mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,072%.

**Tabel 5.82** *Direct Effect* Provinsi Aceh

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,322	,110	,199	,000
PDRB	-,624	-,346	-,558	,072

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.82 terlihat bahwa pengaruh langsung PAD terhadap BM sebesar 0,322 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,624. DBHP terhadap BM sebesar 0,110 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,346. Pengaruh langsung DBHBP terhadap BM sebesar 0,199 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,558. Pengaruh langsung BM terhadap PDRB sebesar 0,072.

**Tabel 5.83** *Indirect Effects* Provinsi Aceh

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,023	,008	,014	,000

*Sumber : Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.83 terlihat bahwa pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui Belanja Modal (BM) sebesar 0,023. Pengaruh tidak langsung Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui Belanja Modal (BM) sebesar 0,008. Pengaruh tidak langsung Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui Belanja Modal (BM) sebesar 0,014.

**Tabel 5.84** Total Effects Provinsi Aceh

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,322	,110	,199	,000
PDRB	-,601	-,339	-,544	,072

Sumber : Data diolah (2025)

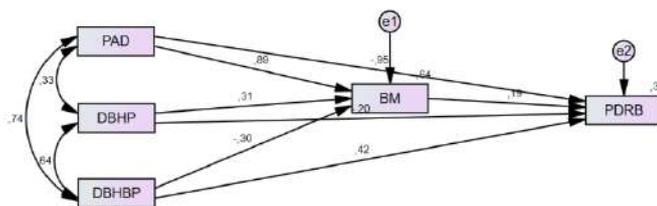
Berdasarkan tabel 5.84 terlihat bahwa pengaruh total PAD terhadap PDRB sebesar -0,601. Pengaruh total DBHP terhadap PDRB sebesar -0,339. Pengaruh total DBHBP terhadap PDRB sebesar -0,544. Pengaruh total BM terhadap PDRB sebesar 0,072.

**Provinsi Sumatera Utara**

**Tabel 5.85** Hasil Analisis Jalur Provinsi Sumatera Utara

	Estimate
BM <--- DBHP	,308
BM <--- DBHBP	-,298
BM <--- PAD	,891
PDRB <--- PAD	-,953
PDRB <--- DBHP	-,203
PDRB <--- DBHBP	,423
PDRB <--- BM	,194

Sumber: Data diolah (2025)



**Gambar 18** Model Analisis Jalur Provinsi Sumatera Utara

$$BM = 0,891 \text{ PAD} + 0,308 \text{ DBHP} - 0,298 \text{ DBHBP}$$

Berdasarkan tabel 5.85 dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai positif yaitu sebesar 0,891, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel

PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,891%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai positif yaitu sebesar 0,308, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,308%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai negatif yaitu sebesar -0,298, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,298%.

$$PDRB = -0,953 \text{ PAD} - 0,203 \text{ DBHP} + 0,423 \text{ DBHBP} + 0,194 \text{ BM}$$

Tabel 5.85 terlihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai negatif yaitu sebesar -0,953, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,953%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai negatif yaitu sebesar -0,203, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,203%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai positif yaitu sebesar 0,423, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,423%.

Nilai koefisien variabel BM bernilai positif yaitu sebesar 0,194, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel BM mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,194%.

**Tabel 5.86** *Direct Effect* Provinsi Sumatera Utara

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,891	,308	-,298	,000
PDRB	-,953	-,203	,423	,194

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.86 dapat dilihat bahwa pengaruh langsung PAD terhadap BM sebesar 0,891 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,953. Pengaruh langsung DBHP terhadap BM sebesar 0,308 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,203. Pengaruh langsung DBHBP terhadap BM sebesar -0,298 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,423. Pengaruh langsung BM terhadap PDRB sebesar 0,194.

**Tabel 5.87** *Indirect Effects* Provinsi Sumatera Utara

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,173	,060	-,058	,000

*Sumber :Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.87 dapat dilihat bahwa pengaruh tidak langsung PAD terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,173. Pengaruh tidak langsung DBHP terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,060. Pengaruh tidak langsung DBHBP terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,058.

**Tabel 5.88** *Total Effects* Provinsi Sumatera Utara

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,891	,308	-,298	,000
PDRB	-,779	-,143	,365	,194

*Sumber :Data diolah (2025)*

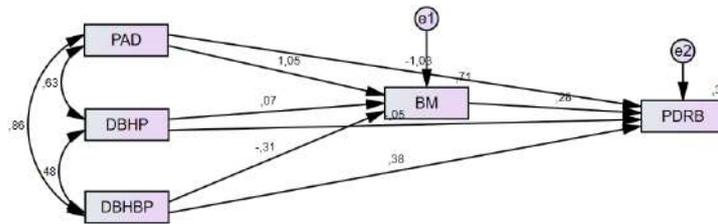
Berdasarkan tabel 5.88 dapat dilihat bahwa pengaruh total PAD terhadap PDRB sebesar -0,779. Pengaruh total DBHP terhadap PDRB sebesar -0,143. Pengaruh total DBHBP terhadap PDRB sebesar 0,365. Pengaruh total BM terhadap PDRB sebesar 0,194.

**Provinsi Sumatera Barat**

**Tabel 5.89** Hasil Analisis Jalur Provinsi Sumatera Barat

			Estimate
BM	<---	DBHP	,074
BM	<---	DBHBP	-,313
BM	<---	PAD	1,047
PDRB	<---	PAD	-1,034
PDRB	<---	DBHP	-,052
PDRB	<---	DBHBP	,381
gaPDRB	<---	BM	,283

Sumber: Data diolah (2025)



**Gambar 19** Model Analisis Jalur Provinsi Sumatera Barat

$$BM = 1,047 PAD + 0,074 DBHP - 0,313 DBHBP$$

Tabel 5.89 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai positif yaitu sebesar 1,047, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 1,047%.

Nilai koefisien DBHP bernilai positif yaitu sebesar 0,074, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,074%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai negatif yaitu sebesar -0,313, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,313%.

$$PDRB = -1,034 PAD - 0,052 DBHP + 0,381 DBHBP + 0,283 BM$$

Tabel 5.89 terlihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai negatif yaitu sebesar -1,034, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 1,034%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai negatif yaitu sebesar -0,052, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,052%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai positif yaitu sebesar 0,381, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,381%.

Nilai koefisien variabel BM bernilai positif yaitu sebesar 0,283, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel BM mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,283%.

**Tabel 5.90** *Direct Effect* Provinsi Sumatera Barat

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,566	-7,347	,382	,000
PDRB	-,012	,262	-,011	,008

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.90 dapat dilihat bahwa pengaruh langsung PAD terhadap BM sebesar 0,566 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,012. Pengaruh langsung DBHP terhadap BM sebesar -7,347 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,262. Pengaruh langsung DBHBP terhadap BM sebesar 0,382 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,011. Pengaruh langsung BM terhadap PDRB sebesar 0,008.

**Tabel 5.91** *Indirect Effects* Provinsi Sumatera Barat

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,021	-,088	,296	,000

*Sumber : Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.91 dapat dilihat bahwa pengaruh tidak langsung PAD terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,021. Pengaruh tidak langsung DBHP terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,088. Pengaruh tidak langsung DBHBP terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,296.

**Tabel 5.92** *Total Effects* Provinsi Sumatera Barat

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,074	-,313	1,047	,000
PDRB	-,031	,292	-,738	,283

*Sumber :Data diolah (2025)*

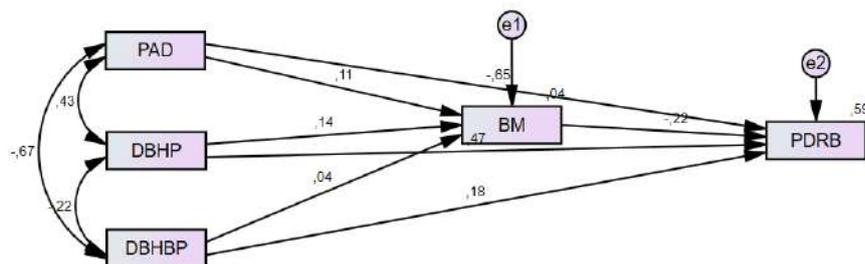
Berdasarkan tabel 5.92 dapat dilihat bahwa pengaruh total PAD terhadap PDRB sebesar -0,031. Pengaruh total DBHP terhadap PDRB sebesar 0,292. Pengaruh total DBHBP terhadap PDRB sebesar -0,738. Pengaruh total BM terhadap PDRB sebesar 0,283.

### **Provinsi Riau**

**Tabel 5.93** Hasil Analisis Jalur Provinsi Riau

	Estimate
BM <--- DBHP	,135
BM <--- DBHBP	,044
BM <--- PAD	,111
PDRB <--- PAD	-,648
PDRB <--- DBHP	,468
PDRB <--- DBHBP	,179
PDRB <--- BM	-,217

*Sumber: Data diolah (2025)*



**Gambar 20** Model Analisis Jalur Provinsi Riau

$$BM = 0,111 \text{ PAD} + 0,135 \text{ DBHP} + 0,044 \text{ DBHBP}$$

Pada tabel 5.93 dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai positif yaitu sebesar 0,111, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,111%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai positif yaitu sebesar 0,135, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,135%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai positif yaitu sebesar 0,044, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,044%.

$$PDRB = -0,648 \text{ PAD} + 0,468 \text{ DBHP} + 0,179 \text{ DBHBP} - 0,217 \text{ BM}$$

Tabel 5.93 terlihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai negatif yaitu sebesar -0,648, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,648%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai positif yaitu sebesar 0,468, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,468%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai positif yaitu sebesar 0,179, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,179%.

Nilai koefisien variabel BM bernilai negatif yaitu sebesar -0,217, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel BM mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,217%.

**Tabel 5.94** *Direct Effect* Provinsi Riau

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,135	,044	,111	,000
PDRB	,468	,179	-,648	-,217

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.94 dapat dilihat bahwa pengaruh langsung PAD terhadap BM sebesar 0,135 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,468. Pengaruh langsung DBHP terhadap BM sebesar 0,044 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,179. Pengaruh langsung DBHBP terhadap BM sebesar 0,111 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,648. Pengaruh langsung BM terhadap PDRB sebesar -0,217.

**Tabel 5.95** *Indirect Effects* Provinsi Riau

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	-,029	-,009	-,024	,000

*Sumber : Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.95 dapat dilihat bahwa pengaruh tidak langsung PAD terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,029. Pengaruh tidak langsung DBHP terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,009. Pengaruh tidak langsung DBHBP terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,024.

**Tabel 5.96** Total Effects Provinsi Riau

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,135	,044	,111	,000
PDRB	,438	,170	-,672	-,217

Sumber :Data diolah (2025)

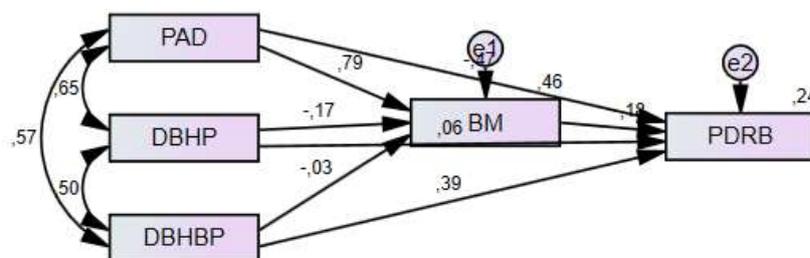
Berdasarkan tabel 5.96 dapat dilihat bahwa pengaruh total PAD terhadap PDRB sebesar 0,438. Pengaruh total DBHP terhadap PDRB sebesar 0,170. Pengaruh total DBHBP terhadap PDRB sebesar -0,672. Pengaruh total BM terhadap PDRB sebesar -0,217.

**Provinsi Jambi**

**Tabel 5.97** Hasil Analisis Jalur Provinsi Jambi

	Estimate
BM <--- PAD	,793
BM <--- DBHP	-,174
BM <--- DBHBP	-,030
PDRB <--- BM	-,180
PDRB <--- DBHP	,058
PDRB <--- DBHBP	,388
PDRB <--- PAD	-,467

Sumber: Data diolah (2025)



**Gambar 21** Model Analisis Jalur Provinsi Jambi

$$BM = 0,793 \text{ PAD} - 0,174 \text{ DBHP} - 0,030 \text{ DBHBP}$$

Pada tabel 5.97 terlihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai positif yaitu sebesar 0,793, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,793%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai negatif yaitu sebesar -0,174, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,174%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai negatif yaitu sebesar -0,030, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,030%.

$$PDRB = -0,467 PAD + 0,058 DBHP + 0,388 DBHBP - 0,180 BM$$

Berdasarkan tabel 5.97 dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai negatif yaitu sebesar -0,467, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,467%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai positif yaitu sebesar 0,058, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,058%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai positif yaitu sebesar 0,388, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,388%.

Nilai koefisien variabel BM bernilai negatif yaitu sebesar -0,180, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel BM mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,180%.

**Tabel 5.98** *Direct Effect* Provinsi Jambi

	DBHBP	DBHP	PAD	BM
BM	-,030	-,174	,793	,000
PDRB	,388	,058	-,467	-,180

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.98 dapat dilihat bahwa pengaruh langsung PAD terhadap BM sebesar 0,140 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,081. Pengaruh langsung DBHP terhadap BM sebesar 0,242 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,197. Pengaruh langsung DBHBP terhadap BM sebesar -0,235 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,781. Pengaruh langsung BM terhadap PDRB sebesar -0,197.

**Tabel 5.99** *Indirect Effects* Provinsi Jambi

	DBHBP	DBHP	PAD	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,005	,031	-,143	,000

*Sumber : Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.99 dapat dilihat bahwa pengaruh tidak langsung PAD terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,028. Pengaruh tidak langsung DBHP terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,048. Pengaruh tidak langsung DBHBP terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,046.

**Tabel 5.100** *Total Effects* Provinsi Jambi

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,793	-,174	-,030	,000
PDRB	-,609	,089	,393	-,180

*Sumber : Data diolah (2025)*

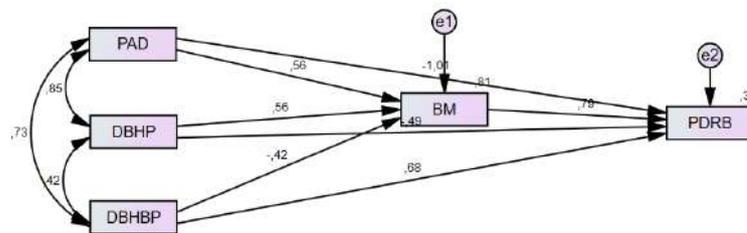
Berdasarkan tabel 5.100 dapat dilihat bahwa pengaruh PAD terhadap PDRB sebesar -0,609. Pengaruh total DBHP terhadap PDRB sebesar 0,089. Pengaruh total DBHBP terhadap PDRB sebesar 0,393. Pengaruh total BM terhadap PDRB sebesar -0,180.

**Provinsi Sumatera Selatan**

**Tabel 5.101** Hasil Analisis Jalur Provinsi Sumatera Selatan

			Estimate
BM	<---	DBHP	,564
BM	<---	DBHBP	-,420
BM	<---	PAD	,563
PDRB	<---	PAD	-1,007
PDRB	<---	DBHP	-,492
PDRB	<---	DBHBP	,682
PDRB	<---	BM	,792

Sumber: Data diolah (2025)



**Gambar 22** Model Analisis Jalur Provinsi Sumatera Selatan

$$BM = 0,563 \text{ PAD} + 0,564 \text{ DBHP} - 0,420 \text{ DBHBP}$$

Pada tabel 5.101 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai positif yaitu sebesar 0,563, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,563%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai positif yaitu sebesar 0,564, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,564%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai negatif yaitu sebesar -0,420, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,420%.

$$PDRB = -1,007 \text{ PAD} - 0,492 \text{ DBHP} + 0,682 \text{ DBHBP} + 0,792 \text{ BM}$$

Tabel 5.101 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai negatif yaitu sebesar -1,007, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 1,007%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai negatif yaitu sebesar -0,492, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,492%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai positif yaitu sebesar 0,682, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,682%.

Nilai koefisien variabel BM bernilai positif yaitu sebesar 0,792, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel BM mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,792%.

**Tabel 5.102** *Direct Effect* Provinsi Sumatera Selatan

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,564	-,420	,563	,000
PDRB	-,492	,682	-1,007	,792

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.102 dapat dilihat bahwa pengaruh langsung PAD terhadap BM sebesar 0,564 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,492. Pengaruh langsung DBHP terhadap BM sebesar -0,420 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,682. Pengaruh langsung DBHBP terhadap BM sebesar 0,563 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -1,007. Pengaruh langsung BM terhadap PDRB sebesar 0,792.

**Tabel 5.103** *Indirect Effects* Provinsi Sumatera Selatan

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,447	-,333	,446	,000

*Sumber : Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.103 dapat dilihat bahwa pengaruh tidak langsung PAD terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,447. Pengaruh tidak langsung DBHP terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,333. Pengaruh tidak langsung DBHBP terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,446.

**Tabel 5.104** *Total Effects* Provinsi Sumatera Selatan

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,564	-,420	,563	,000
PDRB	-,045	,349	-,561	,792

*Sumber : Data diolah (2025)*

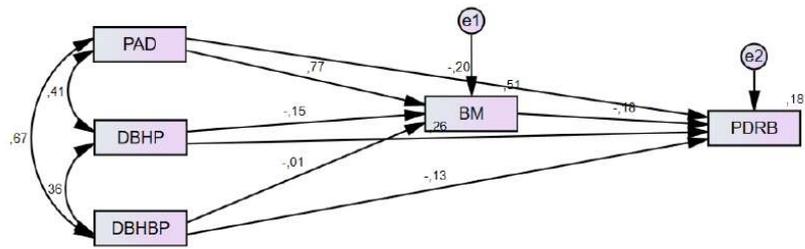
Berdasarkan tabel 5.104 dapat dilihat bahwa pengaruh total PAD terhadap PDRB sebesar -0,045. Pengaruh total DBHP terhadap PDRB sebesar 0,349. Pengaruh total DBHBP terhadap PDRB sebesar -0,561. Pengaruh total BM terhadap PDRB sebesar 0,792.

### **Provinsi Bengkulu**

**Tabel 5.105** Hasil Analisis Jalur Provinsi Bengkulu

	Estimate
BM <--- DBHP	-,147
BM <--- DBHBP	-,009
BM <--- PAD	,767
PDRB <--- PAD	-,195
PDRB <--- DBHP	,256
PDRB <--- DBHBP	-,130
PDRB <--- BM	-,179

*Sumber: Data diolah (2025)*



**Gambar 23** Model Analisis Jalur Provinsi Bengkulu

$$BM = 0,767 \text{ PAD} - 0,147 \text{ DBHP} - 0,009 \text{ DBHBP}$$

Pada tabel 5.105 terlihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai positif yaitu sebesar 0,767, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,767%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai negatif yaitu sebesar -0,147, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,147%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai negatif yaitu sebesar -0,009, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,009%.

$$PDRB = -0,195 \text{ PAD} + 0,256 \text{ DBHP} - 0,130 \text{ DBHBP} - 0,179 \text{ BM}$$

Tabel 5.105 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai negatif yaitu sebesar -0,195, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,195%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai positif yaitu sebesar 0,256, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,256%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai negatif yaitu sebesar -0,130, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,130%.

Nilai koefisien variabel BM bernilai negatif yaitu sebesar -0,179, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel BM mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,179%.

**Tabel 5.106** *Direct Effect* Provinsi Bengkulu

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	-,147	-,009	,767	,000
PDRB	,256	-,130	-,195	-,179

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 6.106 dapat dilihat bahwa pengaruh langsung PAD terhadap BM sebesar -0,147 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,256. Pengaruh langsung DBHP terhadap BM sebesar -0,009 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,130. Pengaruh langsung DBHBP terhadap BM sebesar 0,767 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,195. Pengaruh langsung BM terhadap PDRB sebesar -0,179.

**Tabel 5. 107** *Indirect Effects* Provinsi Bengkulu

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,026	,002	-,137	,000

*Sumber : Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.107 dapat dilihat bahwa pengaruh tidak langsung PAD terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,026. Pengaruh tidak langsung DBHP terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,002. Pengaruh tidak langsung DBHBP terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,137.

**Tabel 5.108** *Total Effects* Provinsi Bengkulu

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	-,147	-,009	,767	,000
PDRB	,282	-,129	-,333	-,179

Sumber :Data diolah (2025)

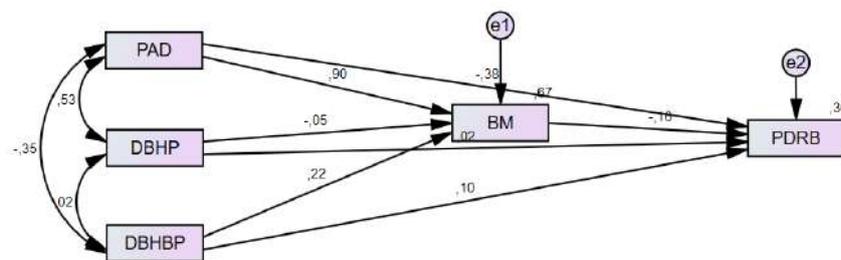
Berdasarkan tabel 5.108 dapat dilihat bahwa pengaruh total PAD terhadap PDRB sebesar 0,282. Pengaruh total DBHP terhadap PDRB sebesar -0,129. Pengaruh total DBHBP terhadap PDRB sebesar -0,333. Pengaruh total BM terhadap PDRB sebesar -0,179.

**Provinsi Lampung**

**Tabel 5.109** Hasil Analisis Jalur Provinsi Lampung

	Estimate
BM <--- DBHP	-,049
BM <--- DBHBP	,216
BM <--- PAD	,897
PDRB <--- PAD	-,384
PDRB <--- DBHP	,021
PDRB <--- DBHBP	,105
PDRB <--- BM	-,160

Sumber: Data diolah (2025)



**Gambar 24** Model Analisis Jalur Provinsi Lampung

$$BM = 0,897 PAD - 0,049 DBHP + 0,216 DBHBP$$

Pada tabel 5.109 terlihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai positif yaitu sebesar 0,897, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,897%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai negatif yaitu sebesar -0,049, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,049%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai positif yaitu sebesar 0,216, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,216%.

$$PDRB = -0,384 PAD + 0,021 DBHP + 0,105 DBHBP - 0,160 BM$$

Pada tabel 5.109 menunjukkan nilai koefisien variabel PAD bernilai negatif yaitu sebesar -0,384, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,384%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai positif yaitu sebesar 0,021, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,021%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai positif yaitu sebesar 0,105, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,105%.

Nilai koefisien variabel BM bernilai negatif yaitu sebesar -0,160, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel BM mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,160%.

**Tabel 5.110** *Direct Effect* Provinsi Lampung

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	-,049	,216	,897	,000
PDRB	,021	,105	-,384	-,160

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.110 dapat dilihat bahwa pengaruh langsung PAD terhadap BM sebesar -0,049 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,021. Pengaruh langsung DBHP terhadap BM sebesar 0,216 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,105. Pengaruh langsung DBHBP terhadap BM sebesar 0,897 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,384. Pengaruh langsung BM terhadap PDRB sebesar -0,160.

**Tabel 5.111** *Indirect Effects* Provinsi Lampung

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,008	-,035	-,143	,000

*Sumber : Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.111 dapat dilihat bahwa pengaruh tidak langsung PAD terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,008. Pengaruh tidak langsung DBHP terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,035. Pengaruh tidak langsung DBHBP terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,143.

**Tabel 5.112** *Total Effects* Provinsi Lampung

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	-,049	,216	,897	,000
PDRB	,029	,070	-,527	-,160

*Sumber : Data diolah (2025)*

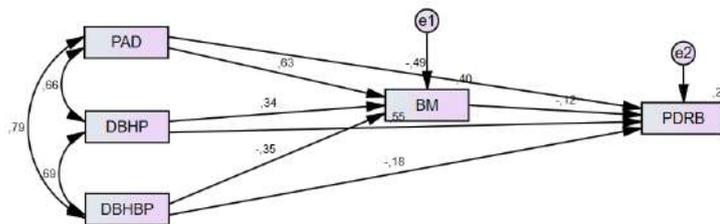
Berdasarkan tabel 5.112 dapat dilihat bahwa pengaruh total PAD terhadap PDRB sebesar 0,029. Pengaruh total DBHP terhadap PDRB sebesar 0,070. Pengaruh total DBHBP terhadap PDRB sebesar -0,527. Pengaruh total BM terhadap PDRB sebesar -0,160.

**Provinsi Kep. Bangka Belitung**

**Tabel 5.113** Hasil Analisis Jalur Provinsi Kep. Bangka Belitung

	Estimate
BM <--- DBHP	,340
BM <--- DBHBP	-,352
BM <--- PAD	,625
PDRB <--- PAD	-,493
PDRB <--- DBHP	,552
PDRB <--- DBHBP	-,180
PDRB <--- BM	-,125

Sumber: Data diolah (2025)



**Gambar 25** Model Analisis Jalur Provinsi Kep. Bangka Belitung

$$BM = 0,625 PAD + 0,340 DBHP - 0,352 DBHBP$$

Pada tabel 5.113 terlihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai positif yaitu sebesar 0,625, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,625%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai positif yaitu sebesar 0,340, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,340%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai negatif yaitu sebesar -0,352, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,352%.

$$PDRB = -0,493 PAD + 0,552 DBHP - 0,180 DBHBP - 0,125 BM$$

Pada tabel 5.113 menunjukkan nilai koefisien variabel PAD bernilai negatif yaitu sebesar -0,493, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,493%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai positif yaitu sebesar 0,552, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,552%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai negatif yaitu sebesar -0,180, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,180%.

Nilai koefisien variabel BM bernilai negatif yaitu sebesar -0,125, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel BM mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,125%.

**Tabel 5. 114** *Direct Effect* Provinsi Kep. Bangka Belitung

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,340	-,352	,625	,000
PDRB	,552	-,180	-,493	-,125

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.114 dapat dilihat bahwa pengaruh langsung PAD terhadap BM sebesar 0,340 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,552. Pengaruh langsung DBHP terhadap BM sebesar -0,352 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,180. Pengaruh langsung DBHBP terhadap BM sebesar 0,625 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,493. Pengaruh langsung BM terhadap PDRB sebesar -0,125.

**Tabel 5. 115 Indirect Effects** Provinsi Kep. Bangka Belitung

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	-,042	,044	-,078	,000

*Sumber : Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.1115 dapat dilihat bahwa pengaruh tidak langsung PAD terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,042. Pengaruh tidak langsung DBHP terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,044. Pengaruh tidak langsung DBHBP terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,078.

**Tabel 5.116 Total Effects** Provinsi Kep. Bangka Belitung

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,340	-,352	,625	,000
PDRB	,509	-,136	-,571	-,125

*Sumber :Data diolah (2025)*

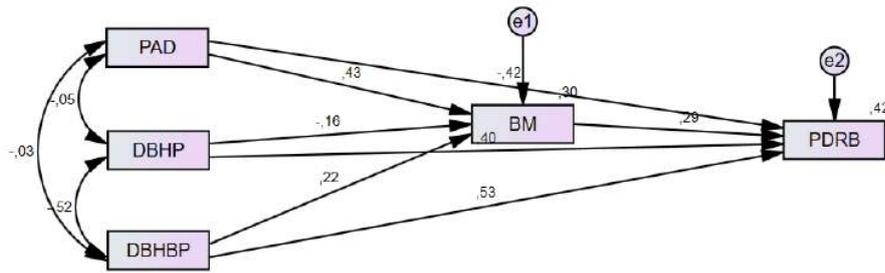
Berdasarkan tabel 5.116 dapat dilihat bahwa pengaruh total PAD terhadap PDRB sebesar 0,509. Pengaruh total DBHP terhadap PDRB sebesar -0,136. Pengaruh total DBHBP terhadap PDRB sebesar -0,571. Pengaruh total BM terhadap PDRB sebesar -0,125.

### **Provinsi Kep. Riau**

**Tabel 5.117 Hasil Analisis Jalur** Provinsi Kep. Riau

	Estimate
BM <--- DBHP	-,156
BM <--- DBHBP	,223
BM <--- PAD	,433
PDRB <--- PAD	-,417
PDRB <--- DBHP	,399
PDRB <--- DBHBP	,525
PDRB <--- BM	,285

*Sumber: Data diolah (2025)*



**Gambar 26** Model Analisis Jalur Provinsi Kep. Riau

$$BM = 0,433 \text{ PAD} - 0,156 \text{ DBHP} + 0,223 \text{ DBHBP}$$

Pada tabel 5.117 menunjukkan nilai koefisien variabel PAD bernilai positif yaitu sebesar 0,433, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,433%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai negatif yaitu sebesar -0,156, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami penurunan sebesar 0,156%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai positif yaitu sebesar 0,223, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel BM akan mengalami peningkatan sebesar 0,223%.

$$PDRB = -0,417 \text{ PAD} + 0,399 \text{ DBHP} + 0,525 \text{ DBHBP} + 0,285 \text{ BM}$$

Pada tabel 5.117 terlihat bahwa nilai koefisien variabel PAD bernilai negatif yaitu sebesar -0,417, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel PAD mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,417%.

Nilai koefisien variabel DBHP bernilai positif yaitu sebesar 0,399, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,399%.

Nilai koefisien variabel DBHBP bernilai positif yaitu sebesar 0,525, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel DBHBP mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,525%.

Nilai koefisien variabel BM bernilai positif yaitu sebesar 0,285, hal tersebut menandakan bahwa jika variabel BM mengalami peningkatan 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,285%.

**Tabel 5.118** *Direct Effect* Provinsi Kep. Riau

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	-,156	,223	,433	,000
PDRB	,399	,525	-,417	,285

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.118 dapat dilihat bahwa pengaruh langsung PAD terhadap BM sebesar -0,156 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,399. Pengaruh langsung DBHP terhadap BM sebesar 0,223 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar 0,525. Pengaruh langsung DBHBP terhadap BM sebesar 0,433 sedangkan pengaruh langsung terhadap PDRB sebesar -0,417. Pengaruh langsung BM terhadap PDRB sebesar 0,285.

**Tabel 5.119** *Indirect Effects* Provinsi Kep. Riau

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	-,044	,064	,124	,000

*Sumber : Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.119 dapat dilihat bahwa pengaruh tidak langsung PAD terhadap PDRB melalui BM sebesar -0,044. Pengaruh tidak langsung DBHP terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,064. Pengaruh tidak langsung DBHBP terhadap PDRB melalui BM sebesar 0,124.

**Tabel 5.120** *Total Effects* Provinsi Kep. Riau

	PAD	DBHP	DBHBP	BM
BM	-,156	,223	,433	,000
PDRB	,355	,589	-,293	,285

*Sumber : Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 5.120 dapat dilihat bahwa pengaruh total PAD terhadap PDRB sebesar 0,355. Pengaruh total DBHP terhadap PDRB sebesar 0,589. Pengaruh total DBHBP terhadap PDRB sebesar -0,293. Pengaruh total BM terhadap PDRB sebesar 0,285.

### 5.2.3 Uji Hipotesis

#### 5.2.3.1 Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

#### Provinsi Aceh

**Tabel 5.121** Hasil Uji F Provinsi Aceh

	Estimate
BM	,047
PDRB	,188

*Sumber : Data diolah (2025)*

Nilai F hitung Sub Struktural I

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,047/3}{(1 - 0,047)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,0156}{0,953/14}$$

$$Fh = \frac{0,0156}{0,0680}$$

$$Fh = 0,2294$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural I di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $0,2294 < 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap BM Provinsi Aceh.

Nilai F hitung Sub Struktural II

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,188/4}{(1 - 0,188)/(18 - 4 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,047}{0,812/13}$$

$$Fh = \frac{0,047}{0,0624}$$

$$Fh = 0,7532$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural II di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $0,7532 < 3,18$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP, DBHBP dan BM secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.

### Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 5.122** Hasil Uji F Provinsi Sumatera Utara

	Estimate
BM	,645
PDRB	,357

*Sumber : Data diolah (2025)*

Nilai F hitung Sub Struktural I

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,645/3}{(1 - 0,645)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,215}{0,355/14}$$

$$Fh = \frac{0,215}{0,0253}$$

$$Fh = 8,498$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural I di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $8,498 > 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM Provinsi Sumatera Utara.

Nilai F hitung Sub Struktural II

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,357/4}{(1 - 0,357)/(18 - 4 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,0892}{0,643/13}$$

$$Fh = \frac{0,0892}{0,0494}$$

$$Fh = 1,8056$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural II di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $1,8056 < 3,18$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP, DBHBP dan BM secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

### Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 5.123** Hasil Uji F Provinsi Sumatera Barat

	Estimate
BM	,713
PDRB	,303

*Sumber : Data diolah (2025)*

Nilai F hitung Sub Struktural I

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,713/3}{(1 - 0,713)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,2376}{0,287/14}$$

$$Fh = \frac{0,2376}{0,0205}$$

$$Fh = 11,5902$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural I di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $11,5902 > 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM Provinsi Sumatera Barat.

Nilai F hitung Sub Struktural II

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,303/4}{(1 - 0,303)/(18 - 4 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,0757}{0,697/13}$$

$$Fh = \frac{0,0757}{0,0536}$$

$$Fh = 1,4123$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural II di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $1,8056 < 3,18$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP, DBHBP dan BM secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

## Provinsi Riau

**Tabel 5.124** Hasil Uji F Provinsi Riau

	Estimate
BM	,036
PDRB	,587

*Sumber : Data diolah (2025)*

Nilai F hitung Sub Struktural I

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,036/3}{(1 - 0,036)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,012}{0,964/14}$$

$$Fh = \frac{0,012}{0,0688}$$

$$Fh = 0,1744$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural I di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $0,1744 < 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap BM Provinsi Riau.

Nilai F hitung Sub Struktural II

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,587/4}{(1 - 0,587)/(18 - 4 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,1467}{0,413/13}$$

$$Fh = \frac{0,1467}{0,0317}$$

$$Fh = 4,6277$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural II di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $4,6277 > 3,18$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP, DBHBP dan BM secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau.

### Provinsi Jambi

**Tabel 5.125** Hasil Uji F Provinsi Jambi

	Estimate
BM	,458
PDRB	,241

*Sumber : Data diolah (2025)*

Nilai F hitung Sub Struktural I

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,458/3}{(1 - 0,458)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,1526}{0,542/14}$$

$$Fh = \frac{0,1526}{0,0387}$$

$$Fh = 3,9431$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural I di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $3,9431 > 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM Provinsi Jambi.

Nilai F hitung Sub Struktural II

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,241/4}{(1 - 0,241)/(18 - 4 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,0602}{0,759/13}$$

$$Fh = \frac{0,0602}{0,0583}$$

$$Fh = 1,0325$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural II di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $1,0325 < 3,18$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP, DBHBP dan BM secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.

### Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 5.126** Hasil Uji F Provinsi Sumatera Selatan

	Estimate
BM	,808
PDRB	,305

*Sumber : Data diolah (2025)*

Nilai F hitung Sub Struktural I

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,808/3}{(1 - 0,808)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,2693}{0,192/14}$$

$$Fh = \frac{0,2693}{0,0137}$$

$$Fh = 19,6569$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural I di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $19,6569 > 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai F hitung Sub Struktural II

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,305/4}{(1 - 0,305)/(18 - 4 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,0762}{0,695/13}$$

$$Fh = \frac{0,0762}{0,0534}$$

$$Fh = 1,4269$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural II di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $1,4269 < 3,18$  (f tabel), sehingga  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP, DBHBP dan BM secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

### Provinsi Bengkulu

**Tabel 5.127** Hasil Uji F Provinsi Bengkulu

	Estimate
BM	,509
PDRB	,177

*Sumber : Data diolah (2025)*

Nilai F hitung Sub Struktural I

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,509/3}{(1 - 0,509)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,1696}{0,491/14}$$

$$Fh = \frac{0,1696}{0,035}$$

$$Fh = 4,8457$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural I di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $4,8457 > 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM Provinsi Bengkulu.

Nilai F hitung Sub Struktural II

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,177/4}{(1 - 0,177)/(18 - 4 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,0442}{0,823/13}$$

$$Fh = \frac{0,0442}{0,0633}$$

$$Fh = 0,6982$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural II di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $0,6982 < 3,18$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP, DBHBP dan BM secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu.

### Provinsi Lampung

**Tabel 5.128** Hasil Uji F Provinsi Lampung

	Estimate
BM	,673
PDRB	,302

*Sumber : Data diolah (2025)*

Nilai F hitung Sub Struktural I

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,673/3}{(1 - 0,673)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,2243}{0,327/14}$$

$$Fh = \frac{0,2243}{0,0233}$$

$$Fh = 9,6266$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural I di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $9,6266 > 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM Provinsi Lampung.

Nilai F hitung Sub Struktural II

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,302/4}{(1 - 0,302)/(18 - 4 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,0755}{0,698/13}$$

$$Fh = \frac{0,0755}{0,0536}$$

$$Fh = 1,4085$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural II di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $1,4085 < 3,18$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP, DBHBP dan BM secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung.

### Provinsi Kep. Bangka Belitung

**Tabel 5.129** Hasil Uji F Provinsi Kep. Bangka Belitung

	Estimate
BM	,396
PDRB	,258

*Sumber : Data diolah (2025)*

Nilai F hitung Sub Struktural I

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,396/3}{(1 - 0,396)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,132}{0,604/14}$$

$$Fh = \frac{0,132}{0,0431}$$

$$Fh = 3,0626$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural I di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $3,0626 < 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap BM Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Nilai F hitung Sub Struktural II

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,258/4}{(1 - 0,258)/(18 - 4 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,0645}{0,742/13}$$

$$Fh = \frac{0,0645}{0,0570}$$

$$Fh = 1,1315$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural II di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $1,1315 < 3,18$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP, DBHBP dan BM secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kep. Bangka Belitung.

### Provinsi Kep. Riau

**Tabel 5.130** Hasil Uji F Provinsi Kep. Riau

	Estimate
BM	,298
PDRB	,421

*Sumber: Data diolah (2025)*

Nilai F hitung Sub Struktural I

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,298/3}{(1 - 0,298)/(18 - 3 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,0993}{0,702/14}$$

$$Fh = \frac{0,0933}{0,0501}$$

$$Fh = 1,8622$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural I di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $3,0626 < 3,34$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP dan DBHBP secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap BM Provinsi Kep. Riau.

Nilai F hitung Sub Struktural II

$$Fh = \frac{R2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,421/4}{(1 - 0,421)/(18 - 4 - 1)}$$

$$Fh = \frac{0,1052}{0,579/13}$$

$$Fh = \frac{0,1052}{0,0445}$$

$$Fh = 2,364$$

Berdasarkan perhitungan nilai F hitung Sub Struktural II di atas, didapatkan nilai f hitung sebesar  $2,364 < 3,18$  (f tabel), sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya PAD, DBHP, DBHBP dan BM secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kep. Riau.

### 5.2.3.2 Uji t

Uji statistik t ditujukan guna mengetahui pengaruh variabel independen pada variabel dependen secara parsial.

**Provinsi Aceh**

**Tabel 5.131 Hasil Uji t Provinsi Aceh**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,372	,409	,909	,363	
BM <--- DBHP	2,219	5,525	,402	,688	
BM <--- DBHBP	,312	,549	,568	,570	
PDRB <--- PAD	-,007	,004	-1,868	,062	
PDRB <--- DBHP	-,069	,051	-1,365	,172	
PDRB <--- DBHBP	-,009	,005	-1,708	,088	
PDRB <--- BM	,001	,002	,323	,747	

*Sumber : Data diolah (2025)*

Tabel 5.131 menunjukkan bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 0,909 dan nilai P Value sebesar 0,363 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 0,402 dan nilai P Value sebesar 0,688 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar 0,568 dan nilai P Value sebesar 0,570 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh.

Nilai CR jalur PAD ---> PDRB sebesar -1,868 dan nilai P Value sebesar 0,062 < 0,15, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.

Nilai CR jalur DBHP ---> PDRB sebesar -1,365 dan nilai P Value sebesar 0,172 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.

Nilai CR jalur DBHBP ---> PDRB sebesar -1,708 dan nilai P Value sebesar 0,088 < 0,15, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.

Nilai CR jalur BM ---> PDRB sebesar 0,323 dan nilai P Value sebesar 0,747 > 0,15, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.

### Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 5.132** Hasil Uji t Provinsi Sumatera Utara

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,192	,049	3,938	***	
BM <--- DBHP	1,238	,793	1,561	,118	
BM <--- DBHBP	-3,435	3,215	-1,068	,285	
PDRB <--- PAD	-,003	,001	-2,264	,024	
PDRB <--- DBHP	-,012	,017	-,717	,474	
PDRB <--- DBHBP	,071	,065	1,093	,274	
PDRB <--- BM	,003	,005	,596	,551	

*Sumber : Data diolah (2025)*

Pada tabel 5.132 terlihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 3,938 dan nilai P Value sebesar  $0,000 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 1,561 dan nilai P Value sebesar  $0,118 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar -1,068 dan nilai P Value sebesar  $0,285 > 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara.

Nilai CR jalur PAD ---> PDRB sebesar -2,264 dan nilai P Value sebesar  $0,024 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

Nilai CR jalur DBHP ---> PDRB sebesar -0,717 dan nilai P Value sebesar  $0,474 > 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

Nilai CR jalur DBHBP ---> PDRB sebesar 1,093 dan nilai P Value sebesar  $0,274 > 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

Nilai CR jalur BM ---> PDRB sebesar 0,596 dan nilai P Value sebesar  $0,551 > 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

### Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 5.133** Hasil Uji t Provinsi Sumatera Barat

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,382	,108	3,550	***	
BM <--- DBHP	,566	1,301	,435	,663	
BM <--- DBHBP	-7,347	6,090	-1,207	,228	
PDRB <--- PAD	-,011	,006	-1,706	,088	
PDRB <--- DBHP	-,012	,060	-,195	,846	
PDRB <--- DBHBP	,262	,289	,905	,366	
PDRB <--- BM	,008	,011	,749	,454	

*Sumber : Data diolah (2025)*

Pada tabel 5.133 terlihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 3,550 dan nilai P Value sebesar  $0,000 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 0,435 dan nilai P Value sebesar  $0,663 > 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar -1,207 dan nilai P Value sebesar  $0,228 > 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat.

Nilai CR jalur PAD ---> PDRB sebesar -1,706 dan nilai P Value sebesar  $0,088 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang

signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Nilai CR jalur DBHP ---> PDRB sebesar -0,195 dan nilai P Value sebesar 0,846 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Nilai CR jalur DBHBP ---> PDRB sebesar 0,905 dan nilai P Value sebesar 0,366 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Nilai CR jalur BM ---> PDRB sebesar 0,749 dan nilai P Value sebesar 0,454 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

### Provinsi Riau

**Tabel 5.134** Hasil Uji t Provinsi Riau

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM	<---	PAD	,047	,147	,318	,750	
BM	<---	DBHP	,202	,396	,510	,610	
BM	<---	DBHBP	,033	,242	,136	,892	
PDRB	<---	PAD	-,005	,002	-2,833	,005	
PDRB	<---	DBHP	,013	,005	2,675	,007	
PDRB	<---	DBHBP	,003	,003	,848	,396	
PDRB	<---	BM	-,004	,003	-1,365	,172	

*Sumber : Data diolah (2025)*

Pada tabel 5.134 menunjukkan nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 0,318 dan nilai P Value sebesar 0,750 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Riau.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 0,510 dan nilai P Value sebesar 0,610 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Riau.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar 0,136 dan nilai P Value sebesar 0,892 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Riau.

Nilai CR jalur PAD ---> PDRB sebesar -2,833 dan nilai P Value sebesar 0,005 < 0,15, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau.

Nilai CR jalur DBHP ---> PDRB sebesar 2,675 dan nilai P Value sebesar 0,007 < 0,15, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau.

Nilai CR jalur DBHBP ---> PDRB sebesar 0,848 dan nilai P Value sebesar 0,396 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau.

Nilai CR jalur BM ---> PDRB sebesar -1,365 dan nilai P Value sebesar 0,172 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau.

### Provinsi Jambi

**Tabel 5.135** Hasil Uji t Provinsi Jambi

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	-,069	,518	-,134	,894	
BM <--- DBHP	,308	,099	3,116	,002	
BM <--- DBHBP	-,993	1,379	-,720	,471	
PDRB <--- PAD	-,021	,033	-,627	,531	
PDRB <--- DBHP	,039	,193	,200	,842	
PDRB <--- DBHBP	,105	,071	1,470	,142	
PDRB <--- BM	-,021	,017	-1,235	,217	

*Sumber : Data diolah (2025)*

Pada tabel 5.135 terlihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar -0,134 dan nilai P Value sebesar 0,894 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Jambi.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 3,116 dan nilai P Value sebesar  $0,002 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Jambi.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar -0,720 dan nilai P Value sebesar  $0,471 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Jambi.

Nilai CR jalur PAD ---> PDRB sebesar -0,627 dan nilai P Value sebesar  $0,531 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.

Nilai CR jalur DBHP ---> PDRB sebesar 0,200 dan nilai P Value sebesar  $0,842 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.

Nilai CR jalur DBHBP ---> PDRB sebesar 1,470 dan nilai P Value sebesar  $0,142 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.

Nilai CR jalur BM ---> PDRB sebesar -1,235 dan nilai P Value sebesar  $0,217 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.

### Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 5.136** Hasil Uji t Provinsi Sumatera Selatan

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,145	,081	1,774	,076	
BM <--- DBHP	,718	,306	2,348	,019	
BM <--- DBHBP	-,387	,170	-2,278	,023	
PDRB <--- PAD	-,007	,005	-1,534	,125	
PDRB <--- DBHP	-,017	,018	-,936	,349	
PDRB <--- DBHBP	,017	,010	1,704	,088	
PDRB <--- BM	,022	,013	1,718	,086	

*Sumber : Data diolah (2025)*

Pada tabel 5.136 menunjukkan nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 1,774 dan nilai P Value sebesar  $0,076 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya

terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 2,348 dan nilai P Value sebesar  $0,019 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar -2,278 dan nilai P Value sebesar  $0,023 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai CR jalur PAD ---> PDRB sebesar -1,534 dan nilai P Value sebesar  $0,125 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai CR jalur DBHP ---> PDRB sebesar -0,936 dan nilai P Value sebesar  $0,349 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai CR jalur DBHBP ---> PDRB sebesar 1,704 dan nilai P Value sebesar  $0,088 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai CR jalur BM ---> PDRB sebesar 1,718 dan nilai P Value sebesar  $0,086 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

## Provinsi Bengkulu

**Tabel 5.137** Hasil Uji t Provinsi Bengkulu

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,531	,163	3,261	,001	
BM <--- DBHP	-1,639	2,089	-,785	,433	
BM <--- DBHBP	-,066	1,609	-,041	,967	
PDRB <--- PAD	-,012	,024	-,503	,615	
PDRB <--- DBHP	,252	,243	1,035	,301	
PDRB <--- DBHBP	-,081	,184	-,438	,661	
PDRB <--- BM	-,016	,028	-,570	,569	

*Sumber : Data diolah (2025)*

Pada tabel 5.137 terlihat bahwa nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 3,261 dan nilai P Value sebesar 0,001 < 0,15, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Bengkulu.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar -0,785 dan nilai P Value sebesar 0,433 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Bengkulu.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar -0,041 dan nilai P Value sebesar 0,967 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Bengkulu.

Nilai CR jalur PAD ---> PDRB sebesar -0,503 dan nilai P Value sebesar 0,615 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu.

Nilai CR jalur DBHP ---> PDRB sebesar 1,035 dan nilai P Value sebesar 0,301 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu.

Nilai CR jalur DBHBP ---> PDRB sebesar -0,438 dan nilai P Value sebesar 0,661 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh

yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu.

Nilai CR jalur BM ---> PDRB sebesar -0,570 dan nilai P Value sebesar 0,569 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu.

### Provinsi Lampung

**Tabel 5.138** Hasil Uji t Provinsi Lampung

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,366	,074	4,969	***	
BM <--- DBHP	-,644	2,221	-,290	,772	
BM <--- DBHBP	2,572	1,822	1,412	,158	
PDRB <--- PAD	-,006	,006	-,929	,353	
PDRB <--- DBHP	,010	,117	,085	,932	
PDRB <--- DBHBP	,045	,102	,444	,657	
PDRB <--- BM	-,006	,013	-,451	,652	

*Sumber : Data diolah (2025)*

Tabel 5.138 menunjukkan nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 4,969 dan nilai P Value sebesar 0,000 < 0,15, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Lampung.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar -0,290 dan nilai P Value sebesar 0,772 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Lampung.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar 1,412 dan nilai P Value sebesar 0,158 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Lampung.

Nilai CR jalur PAD ---> PDRB sebesar -0,929 dan nilai P Value sebesar 0,353 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung.

Nilai CR jalur DBHP ---> PDRB sebesar 0,085 dan nilai P Value sebesar 0,932 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang

signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung.

Nilai CR jalur DBHBP ---> PDRB sebesar 0,444 dan nilai P Value sebesar  $0,657 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung.

Nilai CR jalur BM ---> PDRB sebesar -0,451 dan nilai P Value sebesar  $0,652 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung.

### Provinsi Kep. Bangka Belitung

**Tabel 5.139** Hasil Uji t Provinsi Kep. Bangka Belitung

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM	<--- PAD	,252	,129	1,950	,051	
BM	<--- DBHP	2,022	1,595	1,267	,205	
BM	<--- DBHBP	-,413	,388	-1,064	,287	
PDRB	<--- PAD	-,022	,018	-1,254	,210	
PDRB	<--- DBHP	,367	,207	1,775	,076	
PDRB	<--- DBHBP	-,024	,050	-,474	,635	
PDRB	<--- BM	-,014	,030	-,463	,643	

*Sumber : Data diolah (2025)*

Pada tabel 5.139 terlihat nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 1,950 dan nilai P Value sebesar  $0,051 < 0,15$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar 1,267 dan nilai P Value sebesar  $0,205 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar -1,064 dan nilai P Value sebesar  $0,287 > 0,15$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Nilai CR jalur PAD ---> PDRB sebesar -1,254 dan nilai P Value sebesar 0,210 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Nilai CR jalur DBHP ---> PDRB sebesar 1,775 dan nilai P Value sebesar 0,076 < 0,15, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Nilai CR jalur DBHBP ---> PDRB sebesar -0,474 dan nilai P Value sebesar 0,635 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Nilai CR jalur BM ---> PDRB sebesar -0,463 dan nilai P Value sebesar 0,643 > 0,15, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kep. Bangka Belitung.

### Provinsi Kep. Riau

**Tabel 5.140** Hasil Uji t Provinsi Kep.Riau

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,154	,072	2,126	,034	
BM <--- DBHP	-,116	,176	-,655	,512	
BM <--- DBHBP	,178	,190	,939	,348	
PDRB <--- PAD	-,014	,007	-2,001	,045	
PDRB <--- DBHP	,029	,016	1,824	,068	
PDRB <--- DBHBP	,041	,017	2,370	,018	
PDRB <--- BM	,028	,021	1,294	,196	

*Sumber : Data diolah (2025)*

Pada tabel 5.140 menunjukkan nilai CR jalur PAD ---> BM sebesar 2,126 dan nilai P Value sebesar 0,034 < 0,15, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Kep. Riau.

Nilai CR jalur DBHP ---> BM sebesar -0,655 dan nilai P Value sebesar 0,512 > 0,15, sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Kep. Riau.

Nilai CR jalur DBHBP ---> BM sebesar 0,939 dan nilai P Value sebesar 0,348 > 0,15, sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi Kep. Riau.

Nilai CR jalur PAD ---> PDRB sebesar -2,001 dan nilai P Value sebesar 0,045 < 0,15, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kep. Riau.

Nilai CR jalur DBHP ---> PDRB sebesar 1,824 dan nilai P Value sebesar 0,068 < 0,15, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kep. Riau.

Nilai CR jalur DBHBP ---> PDRB sebesar 2,370 dan nilai P Value sebesar 0,018 < 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kep. Riau.

Nilai CR jalur BM ---> PDRB sebesar 1,294 dan nilai P Value sebesar 0,196 > 0,15, sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kep. Riau.

#### **5.2.4 Uji Koefisien Determinasi**

Uji koefisien determinasi ditujukan untuk mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan variasi atau perbedaan dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

## Provinsi Aceh

**Tabel 5.141** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Aceh

	Estimate
BM	,047
PDRB	,188

*Sumber : Data diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,047 atau 4,7%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 4,7%, sedangkan sisanya yaitu 95,3% ( $100 - \text{nilai R Square}$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R Square variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 0,188 atau 18,8%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, DBHBP dan BM mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 18,8%, sedangkan sisanya yaitu 81,2% ( $100 - \text{nilai R Square}$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 5.142** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Sumatera Utara

	Estimate
BM	,645
PDRB	,357

*Sumber : Data diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,645 atau 64,5%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 64,5%, sedangkan sisanya yaitu 35,5% ( $100 - \text{nilai R Square}$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R Square variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 0,357 atau 35,7%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, DBHBP, dan BM mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar

35,7%, sedangkan sisanya yaitu 64,3% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 5.143** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Sumatera Barat

	Estimate
BM	,713
PDRB	,303

*Sumber : Data diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,713 atau 71,3%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 71,3%, sedangkan sisanya yaitu 28,7% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R Square variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 0,303 atau 30,3%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, DBHBP, dan BM mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 30,3%, sedangkan sisanya yaitu 69,7% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Provinsi Riau

**Tabel 5.144** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Riau

	Estimate
BM	,036
PDRB	,587

*Sumber : Data diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,036 atau 3,6%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 3,6%, sedangkan sisanya yaitu 96,4% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R Square variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 0,587 atau 58,7%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan

bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, DBHBP, dan BM mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 58,7%, sedangkan sisanya yaitu 41,3% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Provinsi Jambi

**Tabel 5.145** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Jambi

	Estimate
BM	,458
PDRB	,241

*Sumber : Data diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,458 atau 45,8%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 45,8%, sedangkan sisanya yaitu 54,2 % (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R Square variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 0,241 atau 21,4%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, DBHBP dan BM mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 21,4%, sedangkan sisanya yaitu 78,6% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 5.146** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Sumatera Selatan

	Estimate
BM	,808
PDRB	,305

*Sumber : Data diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,808 atau 80,8%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 80,8%, sedangkan sisanya yaitu 19,2% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R Square variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 0,305 atau 30,5%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, DBHBP, dan BM mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 30,5%, sedangkan sisanya yaitu 69,5% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Provinsi Bengkulu

**Tabel 5.147** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Bengkulu

	Estimate
BM	,509
PDRB	,177

*Sumber : Data diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,509 atau 50,9%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 50,9%, sedangkan sisanya yaitu 49,1% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R Square variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 0,177 atau 17,7%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, DBHBP, dan BM mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 17,7%, sedangkan sisanya yaitu 82,3% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Provinsi Lampung

**Tabel 5.148** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Lampung

	Estimate
BM	,673
PDRB	,302

*Sumber : Data diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,673 atau 67,3%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar

67,3%, sedangkan sisanya yaitu 32,7% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R Square variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 0,302 atau 30,2%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, DBHBP, dan BM mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 30,2%, sedangkan sisanya yaitu 69,8% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### **Provinsi Kep. Bangka Belitung**

**Tabel 5.149** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Kep. Bangka Beltiung

	Estimate
BM	,396
PDRB	,258

*Sumber : Data dioleh (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,396 atau 39,6%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 39,6%, sedangkan sisanya yaitu 60,4% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R Square variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 0,258 atau 25,8%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, DBHBP, dan BM mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 25,8%, sedangkan sisanya yaitu 74,2% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### **Provinsi Kep. Riau**

**Tabel 5.150** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Provinsi Kep. Riau

	Estimate
BM	,298
PDRB	,421

*Sumber : Data dioleh (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai R Square variabel BM sebesar 0,298 atau 29,8%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, dan DBHBP mampu menjelaskan variabel BM sebesar 29,8%, sedangkan sisanya yaitu 70,2% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R Square variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 0,421 atau 42,1%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DBHP, DBHBP, dan BM mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB sebesar 42,1%, sedangkan sisanya yaitu 57,9% (100 – nilai R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### 5.2.5 Uji Sobel

Uji sobel ditujukan untuk menguji signifikansi pengaruh mediasi dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji Sobel menghitung apakah efek mediasi, yang diukur dengan koefisien jalur antara variabel independen dan mediasi serta antara mediasi dan variabel dependen, signifikan secara statistik. Jika nilai sobel test  $> 1,958$ , maka terdapat pengaruh tidak langsung (Napitupulu et al., 2021).

#### Provinsi Aceh

**Tabel 5.151** Hasil Uji Sobel Provinsi Aceh

Jalur	a	B	SEa	SEb	Sobel Test
PAD --> BM --> PDRB	0,372	0,001	0,409	0,002	0,438
DBHP --> BM --> PDRB	2,219	0,001	5,525	0,002	0,313
DBHBP --> BM --> PDRB	0,312	0,001	0,549	0,002	0,375

Sumber : Data Diolah (2025)

Dapat dilihat bahwa nilai sobel test jalur PAD --> BM --> PDRB sebesar  $0,438 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHP → BM → PDRB sebesar  $0,313 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHBP → BM → PDRB sebesar  $0,375 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

### Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 5.152** Hasil Uji Sobel Provinsi Sumatera Utara

Jalur	a	B	SEa	SEb	Sobel Test
PAD --> BM --> PDRB	0,192	0,003	0,049	0,005	0,593
DBHP -->BM--> PDRB	1,238	0,003	0,793	0,005	0,560
DBHBP--> BM --> PDRB	-3,435	0,003	3,215	0,005	-0,523

Sumber : Data Diolah (2025)

Dapat dilihat bahwa nilai sobel test jalur PAD --> BM --> PDRB sebesar  $0,593 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHP --> BM --> PDRB sebesar  $0,560 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHBP --> BM --> PDRB sebesar  $-0,523 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

### Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 5.153** Hasil Uji Sobel Provinsi Sumatera Barat

Jalur	a	B	SEa	SEb	Sobel Test
PAD --> BM --> PDRB	0,382	0,008	0,108	0,011	0,712
DBHP -->BM--> PDRB	0,745	0,008	1,301	0,011	0,373
DBHBP--> BM --> PDRB	0,286	0,008	6,090	0,011	-0,623

Sumber : Data Dioalah (2025)

Dapat dilihat bahwa nilai sobel test jalur PAD --> BM --> PDRB sebesar  $0,712 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHP --> BM --> PDRB sebesar  $0,373 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHBP --> BM --> PDRB sebesar  $-0,623 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

### Provinsi Riau

**Tabel 5.154** Hasil Uji Sobel Provinsi Riau

Jalur	a	B	SEa	SEb	Sobel Test
PAD --> BM --> PDRB	0,047	-0,004	0,147	0,003	-0,311
DBHP -->BM--> PDRB	0,202	-0,004	0,396	0,003	-0,476
DBHBP--> BM --> PDRB	0,033	-0,004	0,242	0,003	-0,136

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai sobel test jalur PAD --> BM --> PDRB sebesar  $-0,311 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHP --> BM --> PDRB sebesar  $-0,476 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHBP --> BM --> PDRB sebesar  $-0,136 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

### Provinsi Jambi

**Tabel 5.155** Hasil Uji Sobel Provinsi Jambi

Jalur	a	B	SEa	SEb	Sobel Test
PAD --> BM --> PDRB	0,308	-0,021	0,099	0,033	-0,623
DBHP -->BM--> PDRB	-0,993	-0,021	1,379	0,033	0,477
DBHBP--> BM --> PDRB	-0,069	-0,021	0,518	0,033	0,130

*Sumber : Data Diolah (2025)*

Dapat dilihat bahwa nilai sobel test jalur PAD --> BM --> PDRB sebesar  $-0,623 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHP --> BM --> PDRB sebesar  $0,477 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHBP --> BM --> PDRB sebesar  $0,130 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

### Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 5.156** Hasil Uji Sobel Provinsi Sumatera Selatan

Jalur	a	B	SEa	SEb	Sobel Test
PAD --> BM --> PDRB	0,145	0,022	0,081	0,013	0,378
DBHP --> BM --> PDRB	0,718	0,022	0,306	0,013	0,497
DBHBP --> BM --> PDRB	-0,387	0,022	0,170	0,013	-0,440

Sumber : Data Diolah (2025)

Dapat dilihat bahwa nilai sobel test jalur PAD --> BM --> PDRB sebesar  $0,378 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHP --> BM --> PDRB sebesar  $0,497 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHBP --> BM --> PDRB sebesar  $-0,440 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

### Provinsi Bengkulu

**Tabel 5.157** Hasil Uji Sobel Provinsi Bengkulu

Jalur	a	B	SEa	SEb	Sobel Test
PAD --> BM --> PDRB	0,531	-0,016	0,163	0,028	-0,279
DBHP --> BM --> PDRB	-1,639	-0,016	2,089	0,028	-0,125
DBHBP --> BM --> PDRB	-0,060	-0,016	1,609	0,028	-0,004

Sumber : Data Diolah (2025)

Dapat dilihat bahwa nilai sobel test jalur PAD --> BM --> PDRB sebesar  $-0,279 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHP --> BM --> PDRB sebesar  $-0,125 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHBP --> BM --> PDRB sebesar  $-0,004 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

### Provinsi Lampung

**Tabel 5.158** Hasil Uji Sobel Provinsi Lampung

Jalur	a	B	SEa	SEb	Sobel Test
PAD --> BM --> PDRB	0,366	-0,006	0,074	0,013	-0,460
DBHP --> BM --> PDRB	-0,644	-0,006	2,221	0,013	0,246
DBHBP --> BM --> PDRB	2,572	-0,006	1,822	0,013	-0,439

Sumber : Data Diolah (2025)

Dapat dilihat bahwa nilai sobel test jalur PAD --> BM --> PDRB sebesar  $-0,460 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHP --> BM --> PDRB sebesar  $0,246 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHBP --> BM --> PDRB sebesar  $-0,439 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

### Provinsi Kep. Bangka Belitung

**Tabel 5.159** Hasil Uji Sobel Provinsi Kep. Bangka Belitung

Jalur	a	B	SEa	SEb	Sobel Test
PAD --> BM --> PDRB	0,252	-0,014	0,129	0,030	-0,454
DBHP --> BM --> PDRB	2,022	-0,014	1,595	0,030	-0,438
DBHBP --> BM --> PDRB	-0,413	-0,014	0,388	0,030	0,427

Sumber : Data Diolah (2025)

Dapat dilihat bahwa nilai sobel test jalur PAD --> BM --> PDRB sebesar  $-0,454 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHP --> BM --> PDRB sebesar  $-0,438 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHBP --> BM --> PDRB sebesar  $0,427 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

### Provinsi Kep. Riau

**Tabel 5.160** Hasil Uji Sobel Provinsi Kep. Riau

Jalur	a	B	SEa	SEb	Sobel Test
PAD --> BM --> PDRB	0,154	0,028	0,072	0,021	1,131
DBHP --> BM --> PDRB	-0,116	0,028	0,176	0,021	-0,591
DBHBP --> BM --> PDRB	0,178	0,028	0,190	0,021	0,767

Sumber : Data Diolah (2025)

Dapat dilihat bahwa nilai sobel test jalur PAD --> BM --> PDRB sebesar  $1,131 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHP --> BM --> PDRB sebesar  $-0,591 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Nilai sobel test jalur DBHBP --> BM --> PDRB sebesar  $0,767 < 1,958$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

## 5.3 Analisis Ekonomi

### 5.3.1 Analisis Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di beberapa provinsi, terdapat perbedaan signifikan dalam pengaruh PAD terhadap BM.

#### a. Provinsi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR sebesar 0,909 dan P Value  $0,363 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap BM. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya efektivitas penerimaan PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi, atau alokasi PAD yang lebih dominan digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal. Berdasarkan data kontribusi PAD terhadap APBD Aceh relatif kecil dibandingkan transfer dari pemerintah pusat.

b. Provinsi Sumatera Utara

Dengan nilai CR 3,938 dan P Value  $0,000 < 0,15$ , terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap BM. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan belanja modal. Menurut laporan keuangan daerah, Sumatera Utara memiliki potensi pajak yang tinggi dari sektor perdagangan dan industri yang mendukung pembangunan infrastruktur.

c. Sumatera Barat

Hasil analisis menunjukkan CR 3,550 dan P Value  $0,000 < 0,15$ , mengindikasikan pengaruh signifikan PAD terhadap BM. Hal ini dapat dikaitkan dengan strategi optimalisasi penerimaan PAD serta penggunaan yang lebih efektif dalam pengembangan infrastruktur daerah. Sektor pariwisata dan UMKM di Sumatera Barat turut berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

d. Provinsi Riau

Dengan nilai CR 0,318 dan P Value  $0,750 > 0,15$ , tidak terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap BM. Faktor penyebabnya berupa dominasi Dana Bagi Hasil (DBH) dibandingkan PAD dalam pembiayaan belanja modal atau ketidakefisienan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Riau lebih mengandalkan DBH dari sektor migas.

e. Provinsi Jambi

Ditemukan CR sebesar 3,116 dan P Value  $0,002 < 0,15$ , menunjukkan pengaruh signifikan PAD terhadap BM. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan PAD yang efektif, baik dari sektor pajak daerah maupun pengelolaan kekayaan daerah, yang digunakan untuk investasi pembangunan daerah.

f. Provinsi Sumatera Selatan

Dengan CR 1,774 dan P Value  $0,076 < 0,15$ , terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap BM. Pengaruh ini didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan PAD untuk pengembangan infrastruktur dan proyek belanja modal lainnya.

g. Provinsi Bengkulu

Nilai CR 3,261 dan P Value  $0,001 < 0,15$  mengindikasikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap BM. Salah satu faktor pendukungnya berupa peningkatan retribusi daerah dan sumber lain yang sah, yang dialokasikan untuk pembangunan daerah.

h. Provinsi Lampung

Dengan CR 4,969 dan P Value  $0,000 < 0,15$ , terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap BM. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan PAD untuk mendukung proyek-proyek pembangunan daerah. Sumber utama PAD Lampung berasal dari sektor perkebunan dan pariwisata.

i. Provinsi Kep. Bangka Belitung

Ditemukan nilai CR 1,950 dan P Value  $0,051 < 0,15$ , yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan PAD terhadap BM. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi yang baik menjadi faktor utama dalam kontribusi terhadap BM.

j. Provinsi Kep. Riau

Dengan CR 2,126 dan P Value  $0,034 < 0,15$ , terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap BM. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan PAD yang optimal dalam mendukung pengeluaran belanja modal, terutama dari sektor perhubungan dan perdagangan internasional.

Sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap BM, kecuali di Aceh dan Riau. Penyebab utama tidak signifikannya pengaruh PAD terhadap BM di provinsi-provinsi tersebut bisa disebabkan oleh keterbatasan penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi, ketidakefektifan alokasi PAD, di mana lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal, ketergantungan terhadap sumber

pendapatan lain, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana transfer dari pusat, sehingga PAD tidak menjadi faktor dominan dalam pembiayaan belanja modal.

Sebaliknya, provinsi dengan pengaruh signifikan menunjukkan bahwa PAD memiliki peran penting dalam mendukung belanja modal, yang umumnya dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan PAD yang efektif serta keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan dari sektor-sektor terkait.

Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Angreany (2021), yang menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

### **5.3.2 Analisis Pengaruh DBHP Terhadap Belanja Modal**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil uji t pada hubungan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal di berbagai provinsi, sebagian besar provinsi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP dan BM.

#### **a. Provinsi Aceh**

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 0,402 dan P Value  $0,688 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap BM. Hal ini terjadi karena ketergantungan Aceh pada dana transfer pusat yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari DBHP. Selain itu, potensi Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak lainnya yang dikelola dari DBHP belum cukup besar untuk berkontribusi langsung pada peningkatan belanja modal.

#### **b. Provinsi Sumatera Utara**

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 1,561 dan P Value  $0,118 < 0,15$ , sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap BM. Sumatera Utara memiliki basis ekonomi yang cukup kuat, termasuk dari sektor industri dan perkebunan, yang berkontribusi terhadap penerimaan DBHP. Hal ini menjadi peningkatan DBHP berkontribusi pada alokasi belanja modal yang lebih besar.

c. Provinsi Sumatera Barat

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 0,435 dan P Value 0,663 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap BM. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah besarnya ketergantungan Sumatera Barat pada sektor UMKM dan pariwisata yang tidak terlalu bergantung pada DBHP. Selain itu, belanja modal lebih banyak difokuskan pada sumber pendanaan lain seperti dana transfer pusat.

d. Provinsi Riau

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 0,510 dan P Value 0,610 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap BM. Riau merupakan salah satu provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, terutama dari sektor migas dan perkebunan. Oleh karena itu, DBHP bukan faktor utama yang menentukan besaran belanja modal di provinsi ini.

e. Provinsi Jambi

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -0,720 dan P Value 0,471 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap BM. Salah satu penyebabnya adalah alokasi dana DBHP yang lebih banyak diarahkan pada belanja rutin dibandingkan belanja modal. Selain itu, ketergantungan terhadap transfer pusat juga menjadi faktor yang membuat DBHP tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

f. Provinsi Sumatera Selatan

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 2,348 dan P Value 0,019 < 0,15, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap BM. Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang kuat dari sektor pertambangan, perkebunan, dan industri, yang secara langsung berkontribusi terhadap penerimaan DBHP. Oleh karena itu, DBHP berperan dalam meningkatkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur.

g. Provinsi Bengkulu

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -0,785 dan P Value 0,433 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap BM.

Bengkulu memiliki kapasitas fiskal yang terbatas dan bergantung pada dana transfer pusat, sehingga DBHP belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap belanja modal.

h. Provinsi Lampung

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -0,290 dan P Value 0,772 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap BM. Lampung memiliki sektor pertanian dan perdagangan yang berkembang, namun DBHP yang diterima tidak menjadi faktor utama dalam belanja modal karena prioritas alokasi lebih diarahkan pada belanja operasional.

i. Provinsi Kep. Bangka Belitung

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 1,267 dan P Value 0,205 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap BM. Salah satu alasan utamanya adalah kecilnya kontribusi DBHP terhadap total penerimaan daerah, sehingga belanja modal lebih banyak bergantung pada sumber lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

j. Provinsi Kep. Riau

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -0,655 dan P Value 0,512 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap BM. Kepulauan Riau lebih bergantung pada sektor perdagangan dan industri, di mana kontribusi DBHP terhadap penerimaan daerah tidak cukup besar untuk mempengaruhi belanja modal secara signifikan.

Secara keseluruhan, hanya Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara DBHP terhadap belanja modal. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh struktur ekonomi dan kapasitas fiskal daerah yang lebih kuat, serta pemanfaatan DBHP yang lebih efektif dalam mendukung belanja modal. Sementara itu, provinsi lain lebih banyak mengandalkan sumber pendanaan lain dalam pengalokasian belanja modal, sehingga DBHP tidak memiliki peran yang dominan dalam hal ini.

Hasil ini mendukung penelitian oleh Lutpikah & Mahendra (2020) , yang menyatakan bahwa DBHP tidak signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota Karanganyar. Alasan mengapa dana bagi hasil tidak

signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kota kabupaten karanganyar adalah adanya masalah keagenan. Dimana pihak eksekutif yaitu pemerintah daerah mengajukan anggaran untuk disetujui oleh pihak legislatif. Hal ini senantiasa terjadi dalam pengelolaan daerah, khususnya dalam proses penentuan target pendapatan dan pengelolaan sumber daya dalam belanja daerah.

### **5.3.3 Analisis Pengaruh DBHBP terhadap Belanja Modal**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil uji t pada hubungan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal di berbagai provinsi, sebagian besar provinsi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHBP dan BM.

a. Provinsi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 0,568 dan P Value  $0,570 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHBP terhadap BM. Hal ini terjadi karena pendapatan dari DBHBP yang berasal dari sumber daya alam belum cukup besar untuk memberikan kontribusi nyata terhadap belanja modal. Selain itu, sektor utama ekonomi Aceh lebih didominasi oleh pertanian dan perikanan daripada sektor pertambangan atau kehutanan.

b. Provinsi Sumatera Utara

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -1,068 dan P Value  $0,285 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHBP terhadap BM. Meskipun Sumatera Utara memiliki sektor pertambangan dan perkebunan yang besar, distribusi DBHBP yang diterima daerah ini belum cukup untuk mempengaruhi belanja modal secara langsung. Faktor lainnya adalah dominasi sektor industri dan perdagangan sebagai penyumbang utama PDRB.

c. Provinsi Sumatera Barat

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -1,207 dan P Value  $0,228 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHBP terhadap BM. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya penerimaan dari sektor pertambangan dan sumber daya alam lainnya, sehingga belanja modal lebih

bergantung pada sumber dana lainnya seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

d. Provinsi Riau

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 0,136 dan P Value 0,892 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHBP terhadap BM. Riau yang memiliki sektor migas sebagai penyumbang utama DBHBP ternyata lebih mengandalkan PAD dan transfer lainnya untuk belanja modal. Meskipun industri minyak dan gas cukup berkembang, alokasi dana lebih banyak digunakan untuk kebutuhan lain selain belanja modal.

e. Provinsi Jambi

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -0,134 dan P Value 0,894 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHBP terhadap BM. Jambi yang memiliki sektor pertambangan dan kehutanan belum mampu mengoptimalkan penerimaan DBHBP untuk meningkatkan belanja modal. Selain itu, tingkat serapan anggaran belanja modal yang rendah juga menjadi faktor penyebab minimnya dampak DBHBP terhadap BM.

f. Provinsi Sumatera Selatan

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -2,278 dan P Value 0,023 < 0,15, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHBP terhadap BM. Sektor pertambangan dan migas di Sumatera Selatan memberikan kontribusi besar terhadap DBHBP, yang kemudian berdampak pada belanja modal yang lebih tinggi. Penerimaan dari sumber daya alam seperti pertambangan batu bara dan minyak bumi berkontribusi langsung dalam pembangunan infrastruktur dan belanja modal lainnya.

g. Provinsi Bengkulu

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -0,041 dan P Value 0,967 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHBP terhadap BM. Bengkulu yang lebih bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata memiliki penerimaan DBHBP yang kecil, sehingga tidak cukup mempengaruhi belanja modal. Selain itu, aktivitas pertambangan di Bengkulu masih terbatas, menyebabkan DBHBP tidak menjadi sumber pendapatan yang dominan.

h. Provinsi Lampung

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 1,412 dan P Value  $0,158 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHBP terhadap BM. Sektor perikanan dan kehutanan di Lampung belum menjadi sumber utama penerimaan daerah, sehingga DBHBP tidak berperan signifikan dalam belanja modal. Selain itu, belanja modal Lampung lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur pertanian dibandingkan sektor lainnya.

i. Provinsi Kep. Bangka Belitung

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -1,064 dan P Value  $0,287 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHBP terhadap BM. Meskipun memiliki sektor pertambangan timah, distribusi DBHBP masih terbatas dalam meningkatkan belanja modal daerah. Salah satu penyebabnya adalah fluktuasi harga komoditas timah yang berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan daerah.

j. Provinsi Kep. Riau

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 10,939 dan P Value  $0,348 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHBP terhadap BM. Kepulauan Riau lebih mengandalkan sektor perdagangan dan industri, sehingga penerimaan DBHBP tidak menjadi faktor utama dalam belanja modal. Selain itu, wilayah ini memiliki karakteristik ekonomi berbasis maritim yang lebih mengutamakan pengembangan sektor transportasi dan logistik.

Secara keseluruhan, hanya Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara DBHBP terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan oleh besarnya kontribusi sektor pertambangan dan energi terhadap penerimaan DBHBP di provinsi tersebut. Sementara itu, provinsi lain lebih bergantung pada sumber pendanaan lain seperti PAD, DAU, dan DAK, sehingga DBHBP tidak memiliki peran dominan dalam belanja modal di daerah tersebut.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Purba et al. (2020), yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil bukan Pajak pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap APBD dan tidak berkontribusi terhadap APBD, hal

ini membuktikan bahwa DBH bukan pajak yang merupakan bagian dari dana perimbangan mungkin lebih didominasi oleh jenis-jenis sumber lainnya.

#### **5.3.4 Analisis Pengaruh PAD terhadap PDRB**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Berdasarkan hasil uji t pada hubungan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di beberapa provinsi, terdapat beberapa provinsi yang menunjukkan pengaruh signifikan dan beberapa provinsi lainnya yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

a. Provinsi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -1,868 dan P Value  $0,062 < 0,15$ , sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap PDRB. Hal ini terjadi karena sektor pajak daerah dan retribusi daerah di Aceh mengalami peningkatan yang cukup baik, terutama dari sektor pariwisata dan perdagangan. Data dari menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

b. Provinsi Sumatera Utara

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -2,264 dan P Value  $0,024 < 0,15$ , sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap PDRB. Sumatera Utara memiliki sektor ekonomi yang cukup beragam, termasuk industri, perdagangan, dan pariwisata. Peningkatan PAD di Sumatera Utara terutama berasal dari pajak daerah dan retribusi dari sektor perdagangan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara.

c. Provinsi Sumatera Barat

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -1,706 dan P Value  $0,088 < 0,15$ , sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap PDRB. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah peningkatan sektor pariwisata dan UMKM yang menghasilkan pendapatan bagi daerah melalui pajak dan retribusi.

d. Provinsi Riau

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -2,833 dan P Value  $0,005 < 0,15$ , sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap PDRB. Riau sebagai provinsi dengan sektor migas yang kuat memiliki penerimaan PAD yang cukup besar dari pengelolaan kekayaan daerah, yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

e. Provinsi Jambi

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -0,627 dan P Value  $0,531 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap PDRB. Jambi memiliki keterbatasan dalam sumber PAD, dengan sebagian besar ekonomi masih bergantung pada sektor perkebunan dan kehutanan yang kontribusinya terhadap PAD relatif kecil.

f. Provinsi Sumatera Selatan

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -1,534 dan P Value  $0,125 < 0,15$ , sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap PDRB. Pendapatan dari sektor industri dan perdagangan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Selatan.

g. Provinsi Bengkulu

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -0,503 dan P Value  $0,615 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap PDRB. Hal ini disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi di provinsi Bengkulu, yang menyebabkan PAD tidak cukup besar untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

h. Provinsi Lampung

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -0,929 dan P Value  $0,353 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap PDRB. Meskipun Lampung memiliki sektor pertanian yang kuat, kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas karena rendahnya penerimaan pajak dan retribusi.

i. Provinsi Kep. Bangka Belitung

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -1,254 dan P Value  $0,210 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap PDRB.

Ekonomi Kep. Bangka Belitung masih bergantung pada sektor pertambangan timah, yang lebih banyak memberikan kontribusi keuangan kepada pemerintah pusat dibandingkan kepada pemerintah daerah.

j. Provinsi Kep. Riau

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -2,001 dan P Value  $0,045 < 0,15$ , sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap PDRB. Kepulauan Riau sebagai pusat industri dan perdagangan memiliki PAD yang cukup besar dari sektor jasa dan pelabuhan, yang kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagian besar provinsi di Sumatera menunjukkan adanya pengaruh signifikan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah yang memiliki sektor perdagangan, industri, dan jasa yang berkembang pesat. Namun, beberapa provinsi seperti Jambi, Bengkulu, dan Lampung tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang dapat dikaitkan dengan keterbatasan dalam penerimaan PAD dan ketergantungan pada sumber pendanaan lain.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh R. D. Harahap et al., (2019), yang menunjukkan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang signifikan. PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan, mendorong investasi infrastruktur, serta mendukung sektor produktif tanpa bergantung pada transfer pusat. Selain itu, PAD mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang kuat, sehingga berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi.

### **5.3.5 Analisis Pengaruh DBHP terhadap PDRB**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah DBHP memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Berdasarkan hasil uji t terhadap hubungan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di beberapa provinsi, terdapat beberapa provinsi yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan, dan hanya satu provinsi yang menunjukkan pengaruh signifikan.

a. Provinsi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -1,365 dan P Value  $0,172 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap PDRB. Aceh masih sangat bergantung pada Dana Otonomi Khusus dibandingkan dengan DBHP. Rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PDRB di Aceh juga dipengaruhi oleh keterbatasan sektor ekonomi yang berkembang serta dampak konflik masa lalu yang masih mempengaruhi investasi dan perekonomian daerah.

b. Provinsi Sumatera Utara

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -0,717 dan P Value  $0,474 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap PDRB. Meskipun Sumatera Utara memiliki pusat perdagangan yang besar seperti Medan, distribusi DBHP masih lebih kecil dibandingkan dengan PAD dan transfer dari pemerintah pusat, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kurang signifikan.

c. Provinsi Sumatera Barat

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -0,195 dan P Value  $0,846 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap PDRB. Hal ini terjadi karena sektor ekonomi utama Sumatera Barat lebih didominasi oleh perdagangan dan pariwisata, sementara penerimaan DBHP dari sektor pajak seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi Bangunan relatif kecil.

d. Provinsi Riau

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 2,675 dan P Value  $0,007 < 0,15$ , sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap PDRB. Riau merupakan provinsi dengan penerimaan DBHP yang cukup tinggi, terutama dari sektor perkebunan dan migas. Besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penghasilan dalam DBHP turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

e. Provinsi Jambi

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 0,200 dan P Value  $0,842 > 0,15$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap

PDRB. Penerimaan DBHP di Jambi lebih kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan lain seperti Dana Alokasi Umum. Selain itu, struktur ekonomi yang masih berkembang menyebabkan dampak DBHP terhadap PDRB menjadi terbatas.

f. Provinsi Sumatera Selatan

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR -0,936 dan P Value 0,349 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap PDRB. Meskipun memiliki sektor pertambangan dan perkebunan yang besar, DBHP di Sumatera Selatan belum cukup berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, karena lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dibandingkan dengan investasi produktif.

g. Provinsi Bengkulu

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 1,035 dan P Value 0,301 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap PDRB. Bengkulu memiliki penerimaan DBHP yang kecil karena struktur ekonominya yang lebih mengandalkan pertanian dan perikanan dibandingkan dengan industri atau pertambangan yang menghasilkan pajak lebih besar.

h. Provinsi Lampung

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 0,085 dan P Value 0,932 > 0,15, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap PDRB. Lampung lebih bergantung pada sektor pertanian dan industri manufaktur dibandingkan dengan penerimaan pajak dari DBHP. Hal ini menyebabkan kontribusi DBHP terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak terlalu dominan.

i. Provinsi Kep. Bangka Belitung

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 1,775 dan P Value 0,076 < 0,15, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap PDRB. Kep. Bangka Belitung memiliki penerimaan DBHP yang cukup tinggi, terutama dari Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penghasilan dari sektor pertambangan timah yang masih menjadi andalan ekonomi daerah.

j. Provinsi Kep. Riau

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai CR 1,824 dan P Value  $0,068 < 0,15$ , sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara DBHP terhadap PDRB. Kep. Riau memiliki basis ekonomi yang kuat dalam sektor industri, perdagangan, dan pariwisata, sehingga penerimaan DBHP dari Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan cukup besar dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, hanya Provinsi Riau, Kep. Bangka Belitung, dan Kep. Riau yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara DBHP terhadap PDRB. Hal ini disebabkan oleh besarnya penerimaan DBHP dari sektor unggulan di masing-masing provinsi tersebut. Sementara itu, provinsi lain menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan, karena struktur ekonomi yang lebih bergantung pada sektor-sektor lain yang tidak terlalu terkait dengan penerimaan DBHP.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Sulaiman & Murtala (2021), yang menyatakan bahwa DBHP tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di daerah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dikarenakan penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah di daerah yang salah satunya didapatkan melalui dana bagi hasil pajak ini tidak dialokasikan secara efektif dan juga efisien guna mendukung adanya peningkatan perekonomian di daerah melalui peningkatan PDRB itu sendiri.

### **5.3.6 Analisis Pengaruh DBHBP terhadap PDRB**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan hasil uji t terhadap hubungan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), sebagian besar provinsi menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kedua variabel ini.

#### **a. Provinsi Aceh**

Berdasarkan hasil uji t, nilai CR -1,708 dan P Value  $0,088 < 0,15$ , sehingga terdapat pengaruh yang signifikan DBHBP terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. Aceh memiliki sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor minyak dan gas bumi, Aceh memperoleh DBHBP dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi, yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Selain

itu, sektor perikanan juga menjadi sumber utama DBHBP Aceh, mendukung industri pengolahan hasil laut dan meningkatkan PDRB.

b. Provinsi Sumatera Utara

Nilai CR sebesar 1,093 dengan P Value  $0,274 > 0,15$  menunjukkan bahwa DBHBP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini dapat disebabkan oleh dominasi sektor industri dan perdagangan dalam PDRB Sumatera Utara, di mana sektor yang berkaitan dengan DBHBP seperti kehutanan dan pertambangan hanya memberikan kontribusi kecil terhadap perekonomian. Data menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur tetap menjadi penyumbang utama PDRB provinsi ini, sehingga dampak DBHBP menjadi kurang signifikan.

c. Provinsi Sumatera Barat

Dengan nilai CR sebesar 0,905 dan P Value  $0,366 > 0,15$ , dapat disimpulkan bahwa DBHBP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Sumatera Barat. Penyebab utama karena struktur ekonomi Sumatera Barat lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata daripada sektor yang berhubungan dengan DBHBP. Kontribusi sektor pertambangan dalam PDRB Sumatera Barat relatif kecil dibandingkan sektor perdagangan dan jasa.

d. Provinsi Riau

Nilai CR sebesar 0,848 dengan P Value  $0,396 > 0,15$  menunjukkan bahwa DBHBP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Riau. Meskipun Riau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia, kontribusi utama pertumbuhannya berasal dari sektor perkebunan, terutama kelapa sawit. DBHBP yang berasal dari sektor pertambangan belum cukup besar untuk secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi ini.

e. Provinsi Jambi

Dengan nilai CR sebesar 1,470 dan P Value  $0,142 < 0,15$ , dapat disimpulkan bahwa DBHBP berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Sumber daya alam Jambi yang cukup besar, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan, membuat DBHBP menjadi salah satu sumber pendapatan

daerah yang penting. DBHBP dari sektor pertambangan batu bara dan hasil hutan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah yang mendorong PDRB.

f. Provinsi Sumatera Selatan

Dengan nilai CR sebesar 1,704 dan P Value  $0,088 < 0,15$ , DBHBP berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Provinsi ini merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia, DBHBP yang diterima Sumatera Selatan dari sektor pertambangan cukup besar, sehingga mampu meningkatkan belanja daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya.

g. Provinsi Bengkulu

Nilai CR sebesar  $-0,438$  dan P Value  $0,661 > 0,15$  menunjukkan bahwa DBHBP tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Ekonomi Bengkulu lebih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan dibandingkan sektor pertambangan atau kehutanan yang merupakan sumber utama DBHBP. Oleh karena itu, penerimaan DBHBP tidak cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

h. Provinsi Lampung

Dengan nilai CR sebesar 0,444 dan P Value  $0,657 > 0,15$ , dapat disimpulkan bahwa DBHBP tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung. Lampung lebih mengandalkan sektor pertanian dan industri pengolahan dibandingkan sektor pertambangan atau kehutanan, sektor perkebunan terutama kopi dan tebu merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB, sehingga DBHBP tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

i. Provinsi Kep. Bangka Belitung

Nilai CR sebesar  $-0,474$  dan P Value  $0,635 > 0,15$  menunjukkan bahwa DBHBP tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kep. Bangka Belitung. Meskipun Kep. Bangka Belitung terkenal dengan industri pertambangan timah, DBHBP dari sektor ini belum cukup besar untuk secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, hasil dari pertambangan

timah lebih banyak diekspor, sehingga efek langsung terhadap PDRB lokal menjadi terbatas.

j. Provinsi Kep. Riau

Nilai CR sebesar 2,370 dengan P Value  $0,018 < 0,05$  menunjukkan bahwa DBHBP berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kep. Riau.

Kep. Riau memiliki sektor perikanan dan pertambangan yang cukup berkembang, terutama terkait dengan eksploitasi minyak dan gas bumi lepas pantai. Kep. Riau menerima DBHBP yang cukup besar dari migas, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan daerah yang berkontribusi pada peningkatan PDRB.

Terdapat perbedaan dampak DBHBP terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi. Provinsi yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan dan kehutanan seperti Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau menunjukkan pengaruh signifikan dari DBHBP terhadap PDRB. Sementara itu, provinsi yang lebih bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Lampung tidak mengalami pengaruh yang signifikan dari DBHBP terhadap pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini sesuai dengan penelitian oleh Azis (2016), yang menyatakan bahwa DBHBP kurang berkontribusi maksimal bagi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Malinau, seperti pembangunan fasilitas sarana publik (bidang infrastruktur, irigasi, pelatihanpelatihan teknis, penelitian dan sebagainya) yang langsung menyentuh atau dinikmati masyarakat dalam jangka waktu pendek. Selain itu, besarnya kuantitas realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam bagi Penerimaan Daerah Kabupaten Malinau dalam 10 tahun ini tidak merespon secara menyeluruh (akumulasi) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dimana proses multiplier effect secara nyata pada sumber daya manusia Kabupaten Malinau yang bergerak diberbagai sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

### **5.3.7 Analisis Pengaruh BM terhadap PDRB**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan hasil

uji t terhadap hubungan Belanja Modal (BM) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), sebagian besar provinsi menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

a. Provinsi Aceh

Hasil uji t menunjukkan nilai CR 0,323 dan P Value  $0,747 > 0,15$ , tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi Aceh. Aceh merupakan provinsi yang mendapatkan dana Otonomi Khusus sejak 2008, yang seharusnya mampu meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan sektor produktif. Namun, masih rendahnya efektivitas penggunaan belanja modal disebabkan oleh tingginya tingkat ketergantungan terhadap Dana Otonomi Khusus serta rendahnya realisasi belanja infrastruktur yang berkualitas. Selain itu, sektor utama Aceh masih didominasi oleh industri ekstraktif seperti minyak dan gas yang cenderung kurang bergantung pada belanja modal daerah.

b. Provinsi Sumatera Utara

Hasil uji t menunjukkan nilai CR 0,596 dan P Value  $0,551 > 0,15$ , tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di Sumatera, Sumatera Utara memiliki sektor pertanian dan industri pengolahan yang dominan. Namun, lemahnya korelasi antara belanja modal dan PDRB dapat disebabkan oleh keterbatasan dalam efektivitas proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh belanja modal. Selain itu, sebagian besar pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara masih ditopang oleh investasi swasta dan perdagangan, sehingga belanja modal pemerintah daerah kurang memberikan dampak signifikan.

c. Provinsi Sumatera Barat

Hasil uji t menunjukkan nilai CR 0,749 dan P Value  $0,454 > 0,15$ , tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki perekonomian yang berbasis pada perdagangan, pariwisata, dan pertanian. Namun, alokasi belanja modal sering kali belum optimal dalam mendukung sektor-sektor

unggulan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah belum maksimalnya pembangunan infrastruktur yang mendorong investasi sektor produktif, serta lambatnya realisasi belanja daerah yang berdampak pada keterlambatan proyek-proyek pembangunan.

d. Provinsi Riau

Hasil uji t menunjukkan nilai CR -1,365 dan P Value 0,172 > 0,15, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau. Sebagai provinsi penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia, Riau memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada sektor ekstraktif. Ini menyebabkan belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, namun belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di luar sektor migas. Selain itu, banyaknya dana investasi swasta dalam sektor industri pengolahan dan perkebunan kelapa sawit juga membuat pengaruh belanja modal daerah terhadap PDRB menjadi lebih kecil.

e. Provinsi Jambi

Hasil uji t menunjukkan nilai CR -1,235 dan P Value 0,217 > 0,15, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. Jambi memiliki sektor utama berupa perkebunan dan pertambangan, namun realisasi belanja modal yang kurang terarah dalam mendukung infrastruktur pendukung industri tersebut menyebabkan efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas. Selain itu, ketergantungan terhadap sektor komoditas yang fluktuatif seperti karet dan batu bara membuat belanja modal tidak cukup mampu memberikan dampak langsung terhadap PDRB.

f. Provinsi Sumatera Selatan

Hasil uji t menunjukkan nilai CR 1,718 dan P Value 0,086 < 0,15, terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan investasi infrastruktur yang cukup masif dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan kawasan

industri. Hal ini berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor perdagangan dan industri pengolahan, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi andalan provinsi ini juga mendapat manfaat dari infrastruktur yang lebih baik.

g. Provinsi Bengkulu

Hasil uji t menunjukkan nilai CR -0,570 dan P Value 0,569 > 0,15, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. Sebagai salah satu provinsi dengan PDRB terendah di Sumatera, Bengkulu menghadapi tantangan dalam efektivitas penggunaan belanja modal. Infrastruktur dasar yang belum memadai, serta kurangnya investasi dalam sektor unggulan, menyebabkan belanja modal tidak mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

h. Provinsi Lampung

Hasil uji t menunjukkan nilai CR -0,451 dan P Value 0,652 > 0,15, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Lampung merupakan salah satu pusat pertanian dan industri manufaktur di Sumatera, namun ketidakefektifan belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat investasi infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor utama, serta tingginya ketergantungan terhadap sektor swasta dalam mendorong perekonomian daerah.

i. Provinsi Kep. Bangka Belitung

Hasil uji t menunjukkan nilai CR -0,463 dan P Value 0,643 > 0,15, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Kep. Bangka Belitung memiliki ekonomi yang bergantung pada sektor pertambangan timah dan pariwisata, namun, pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung rendah karena banyaknya proyek infrastruktur yang belum mendukung diversifikasi ekonomi di luar sektor tambang.

j. Provinsi Kep. Riau

Hasil uji t menunjukkan nilai CR 1,294 dan P Value 0,196 > 0,15, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kep. Riau. Kep. Riau merupakan pusat industri dan perdagangan, terutama di Batam, Bintan, dan Karimun. Namun, pertumbuhan ekonomi di provinsi ini lebih banyak ditentukan oleh investasi swasta dan perdagangan internasional dibandingkan belanja modal pemerintah daerah.

Dengan demikian, efektivitas belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada alokasi yang tepat, realisasi yang efektif, serta kondisi ekonomi makro yang mendukung.

Temuan ini mendukung penelitian oleh Dewi dan Suputra (2017), yang menemukan pengaruh negatif Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah akibat masalah inefisiensi dan perencanaan yang kurang baik. Untuk meningkatkan efektivitas belanja modal, diperlukan perencanaan yang lebih matang, penerapan prinsip value for money, serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan proyek agar manfaatnya dapat dirasakan lebih optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **5.4 Implikasi Kebijakan Hasil Penelitian**

##### **1) PAD terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil analisis pengaruh PAD terhadap BM provinsi di Pulau Sumatera, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa provinsi memiliki hubungan yang signifikan antara PAD dan BM. Hal ini mengindikasikan bahwa optimalisasi penerimaan PAD dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai belanja modal. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak, transparansi retribusi, dan perluasan basis pajak dan retribusi yang berkelanjutan. Kedua Provinsi yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan antara PAD dan BM cenderung mengalokasikan PAD lebih banyak untuk belanja operasional daripada belanja modal. Pemerintah daerah perlu meninjau ulang kebijakan anggaran agar peningkatan PAD mendukung belanja modal, termasuk melalui regulasi batas minimal alokasinya. Ketiga beberapa provinsi masih

bergantung pada DBH dan transfer pusat, sehingga perlu mendorong PAD melalui sektor potensial dan diversifikasi pendapatan. Pengelolaan keuangan yang baik, transparansi, serta peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat perlu diperkuat. Infrastruktur di provinsi dengan korelasi positif PAD dan BM harus dikembangkan melalui skema PPP. Selain itu, investasi daerah perlu didorong dengan insentif pajak, kemudahan perizinan, dan ekosistem usaha yang kondusif untuk meningkatkan PAD dan belanja modal.

2) Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal

DBHP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan perlunya strategi yang lebih efektif dalam mengelola DBHP agar lebih berkontribusi terhadap belanja modal. Optimalisasi pemanfaatan DBHP, diversifikasi sumber pendapatan, reformasi kebijakan fiskal, peningkatan efektivitas pengelolaan pajak daerah, serta penguatan peran pemerintah daerah menjadi langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di setiap provinsi. Dengan penerapan kebijakan yang tepat, diharapkan DBHP dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di Pulau Sumatera.

3) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal

DBHBP juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan DBHBP di provinsi-provinsi Sumatera masih belum optimal dalam mendukung belanja modal, kecuali di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti optimalisasi alokasi DBHBP, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada DBHBP. Selain itu, reformasi kebijakan fiskal, dorongan investasi infrastruktur, serta penguatan akuntabilitas dan pengawasan juga perlu diterapkan. Dengan kebijakan yang lebih efektif, DBHBP dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan belanja modal,

mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera.

4) Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi di Sumatera, terutama yang memiliki sektor perdagangan, industri, dan jasa yang berkembang. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan PAD, diperlukan strategi seperti peningkatan efisiensi pemungutan pajak, penguatan sektor ekonomi unggulan, serta reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan dan sinergi dengan pemerintah pusat juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan langkah-langkah ini, PAD dapat lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

5) Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

DBHP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan DBHP dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi Sumatera masih belum merata, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih optimal. Langkah-langkah seperti peningkatan alokasi untuk belanja modal, penguatan kapasitas fiskal daerah, transparansi penggunaan dana, serta pengembangan sektor unggulan di tiap daerah menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas DBHP. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat agar skema pembagian pajak lebih tepat sasaran. Dengan kebijakan yang tepat, DBHP dapat berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi Sumatera.

6) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

DBHBP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan DBHBP dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera masih belum optimal dan perlu kebijakan yang lebih tepat sasaran. Optimalisasi alokasi dana

untuk infrastruktur dan sektor produktif, diversifikasi sumber pendapatan daerah, serta reformasi kebijakan distribusi DBHBP menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dana ini. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan efisiensi penggunaan DBHBP, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan manfaat ekonomi yang lebih merata. Dengan kebijakan yang tepat, DBHBP dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

#### 7) Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa belanja modal belum secara merata memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Untuk meningkatkan dampaknya, diperlukan perencanaan dan realisasi belanja modal yang lebih tepat sasaran, terutama dengan mengarahkan investasi ke sektor unggulan setiap daerah. Peningkatan kualitas infrastruktur, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif, serta optimalisasi kemitraan dengan sektor swasta juga menjadi strategi penting. Selain itu, reformasi tata kelola dan pengawasan anggaran harus diperkuat agar belanja modal benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi daerah.

Dengan memperhatikan kondisi diatas serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dimaksud, diharapkan adanya perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah Provinsi di Sumatera dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis serta interpretasi yang sudah dijalankan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu seperti berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Sumatera. Dibuktikan dengan sebagian besar daerah menunjukkan hasil yang signifikan dengan P Value  $< 0,15$ . Hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD, semakin besar alokasi belanja modal yang dialokasikan. Sebaliknya, DBHP dan DBHBP tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dimana, hasil analisis dari pengaruh keduanya (DBHP dan DBHBP) terhadap Belanja Modal yang menunjukkan P Value  $> 0,15$ . Artinya, hubungan antara DBHP dan BM tidak signifikan begitu juga hubungan DBHBP dengan BM. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada sumber pendanaan lain atau pengelolaan anggaran yang kurang efektif. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan PAD yang efektif dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendorong belanja modal. Sementara DBHP dan DBHBP perlu dioptimalkan secara strategis untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana dan memaksimalkan potensi pendanaan yang ada.
2. Berdasarkan hasil analisis, Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Sumatera. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan dan alokasi BM yang tidak efektif dalam mendukung sektor-sektor produktif. Selain itu, ketidakefektifan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran juga membuat BM tidak cukup berdampak terhadap PDRB. Sementara itu, PAD berpengaruh positif terhadap PDRB, meskipun kontribusinya masih terbatas, sedangkan DBHP dan DBHBP tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PDRB secara langsung. Melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening, DBHP memiliki dampak yang lebih besar terhadap PDRB dibandingkan PAD dan DBHBP. Oleh karena

itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu memfokuskan pengalokasian DBHP dan DBHBP pada proyek-proyek produktif yang mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3. Berdasarkan hasil uji Sobel yang dilakukan terhadap seluruh provinsi di Pulau Sumatera dengan tiga jalur analisis yaitu  $PAD \rightarrow BM \rightarrow PDRB$ ,  $DBHP \rightarrow BM \rightarrow PDRB$ , dan  $DBHBP \rightarrow BM \rightarrow PDRB$ , dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari PAD, DBHP, maupun DBHBP terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun variabel-variabel tersebut mempengaruhi belanja modal secara langsung, mereka tidak berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam proses pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut.

## 6.2 Saran

Berdasarkan pemaparan hasil analisa dan kesimpulan yang telah di berikan, maka berikut beberapa saran yang diajukan:

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak, transparansi retribusi, dan perluasan basis pajak. Selain itu, perlu ada regulasi yang memastikan alokasi PAD lebih difokuskan pada belanja modal daripada belanja operasional untuk meningkatkan pembangunan daerah.
2. Strategi pengelolaan DBHP harus lebih optimal agar berkontribusi pada belanja modal. Langkah yang perlu dilakukan meliputi diversifikasi sumber pendapatan, reformasi kebijakan fiskal, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah secara efektif.
3. DBHBP perlu dikelola dengan lebih efisien melalui optimalisasi alokasi anggaran, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas. Reformasi kebijakan fiskal serta dorongan investasi infrastruktur menjadi langkah penting agar DBHBP lebih berkontribusi terhadap belanja modal di daerah.

4. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan PAD dengan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, mendukung sektor ekonomi unggulan, dan melakukan diversifikasi sumber pendapatan. Penguatan sinergi dengan pemerintah pusat juga diperlukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Agar DBHP lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi dana untuk belanja modal, memperkuat kapasitas fiskal, serta memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana, pengembangan sektor unggulan juga harus menjadi prioritas dalam setiap daerah.
6. DBHP perlu dikelola dengan kebijakan yang lebih strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti mengalokasikan dana untuk infrastruktur dan sektor produktif, melakukan diversifikasi sumber pendapatan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Reformasi kebijakan distribusi DBHP juga perlu dilakukan untuk hasil yang lebih optimal.
7. Perencanaan dan alokasi belanja modal harus lebih fokus pada sektor produktif yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas infrastruktur, optimalisasi kemitraan dengan sektor swasta, serta reformasi tata kelola anggaran menjadi kunci dalam memaksimalkan manfaat belanja modal bagi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angreany, O. O. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Pembangunan Dan Pemerataan*, 10(1), 65–73.
- Azis, M. (2016). Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 12(1), 49–63.
- Boediono, P. D. (2017). *Ekonomi Indonesia* (1st ed.). Mizan.
- Brata, A. G. (2004). Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Darise. Nurlan (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Devi, A. A., & Tjahjono, A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020. *Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 3(3), 1104–1126.
- Fuady, H., & Weriantoni. (2023). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana Bagi Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2006-2021. *Economic Development*, 1(1), 80–91.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ke-4. Jakarta: Salemba Empat*.
- Harahap, R. D., Harahap, M. I., & Syari, M. E. (2019). *PENGARUH DAU DAN PAD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA DAERAH SEBAGAI*. 5, 247–260.
- Harahap, R. U. (2011). *Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan*

*dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kab./kota propinsi sumatera utara. 11(1), 47–58.*

Harris, D. J., & Harris, D. J. (2007). *The Classical Theory Of Economic Growth.*

Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*

Indonesia, R. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*

Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang.* Erlangga.

Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2), 147–158.*

Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru.* Andi Offset. [https://books.google.co.id/books?id=6\\_BBEAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=6_BBEAAAQBAJ)

Masloman, I. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi serta Sektor yang Potensial dan Bardaya Saing di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berskala Ilmiah Efisiensi, 18(01), 46–56.*

Menteri, P., Negeri, D., Pedoman, T., Keuangan, P., Dengan, D., Tuhan, R., Maha, Y., Negeri, M. D., Nomor, P. P., Daerah, P. K., Menteri, P., Negeri, D., Pengelolaan, P., Daerah, K., Nomor, U., Negara, P., Negara, L., Indonesia, R., Lembaran, T., ... Perimbangan, D. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Muzakki, D., Kurniawan, I., Ichwan, M., Rifki, M., Pratama, S., Putri, V. S., & Zulkarnain, M. (2025). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. *Journal Of Economic, Accounting and Management, 3(1), 1–7.*

- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS - STATA - Eviews. 1 ed.* Madenatera.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 4.
- Purba, D. M., Siahaan, Y., & Fauzi, R. A. (2020). Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2010 – 2017 1,3. *Jurnal Akuntansi*, 6, 36–47.
- Putri, Z. E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 173–186.
- Rahmadi, S., Hastuti, D., & Parkhurst, H. (2024). *Studi komparative faktor penentu kemiskinan provinsi di Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. 19(1)*, 96–113.
- Rahmadi, S., & Nurjanah, R. (2022). *Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa. 17(3)*, 617–636.
- Raviyanti, A. A., Rahayu, S., & Krishna, P. (2017). *Pengaruh PAD , DAU , DAK Terhadap IPM Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening ( Studi Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Papua Tahun 2009 -2013 ). XXII(02)*, 243–256.
- Sidik, M., & dan Masyarakat, L. P. E. (2002). Dana alokasi umum: konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah. *Jakarta: Penerbit Buku Kompas*.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48–61.
- Suhadak, T. N. (2007). *Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan APBD di era otonomi*. Kerjasama Lembaga Penerbitan & Dokumentasi, FIA Unibraw dengan Bayumedia Pub.

- Sulaiman, & Murtala. (2021). Analisis Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Dan Pengaruh Bagi Hasil Pajak Terhadap Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) effect on GRDP in North Aceh District . The contribution of the. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 04(April), 1–15.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen keuangan pemerintahan*. Graha Ilmu.
- Talangamin, O. B., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. M. (2018). *Olvy Beatriks Talangamin 1 , Paulus Kindangen 2 , Rosalina A.M. Koleangan 3*. 19(3).
- Thach, N. N., Duong, M. B., Thi, T., & Oanh, K. (2017). *Effects of Corruption on Economic Growth - Empirical Study of Asia Countries*. June.
- Vanesha, V. T., & Rahmadi, S. (2019). *Pengaruh pendapatan asli daerah , dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten / kota di Provinsi Jambi*. 14(1), 27–36.
- Wardani, W., Zulaili, Suriana, Abdullah, U., & Subaktiar. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akselerasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Lisdayani (ed.)). Widina Media Utama.
- Williantara, G. ., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ) , Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ) , Bali , Indonesia ABSTRAK Sejak dirubahnya sistem pemerintahan di Indonesia yang pad*. 16, 2044–2070.

## LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Data Penelitian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Sumatera Tahun 2006-2023 (Miliar Rupiah)**

Provinsi	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)																	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	476.9	587.48	716.29	795.87	796.94	802.84	901.72	902.77	1,731.13	1,985.83	2,057.48	2,276.31	2,359.39	2,698.91	2,570.78	2,505.89	2,917.15	2,987.19
Sumatera Utara	1502.6	1693.84	2002	1946.44	403.52	379.38	451.84	691.14	4,416.81	4,883.88	4,630.46	5,287.47	5,638.96	5,761.27	5,531.24	6,402.71	7,258.02	7,225.69
Sumatera Barat	494.92	571.6	790.08	723.75	1006.82	1147.3	1225.46	1303.62	1,729.22	1,876.73	1,894.69	2,134.01	2,275.09	2,328.43	2,255.07	2,551.90	2,851.97	2,471.22
Riau	964.66	1257.06	1477.57	1276.25	1339.26	2210.13	2588.68	2401.14	3,245.08	3,476.96	3,495.54	3,360.01	3,639.00	3,558.21	3,333.18	4,050.47	4,696.77	5,866.45
Jambi	385.04	372.44	626.11	526.44	686.62	984.23	996	804.41	1,281.23	1,241.23	1,273.89	1,580.30	1,656.57	1,651.09	1,535.18	1,843.43	2,163.59	1,900.66
Sumatera Selatan	741.95	847.95	1139.86	1171.65	1371.08	1849.11	2001.73	2287.01	2,407.90	2,534.52	2,733.32	3,031.63	3,528.01	3,494.51	3,375.10	3,865.46	4,930.95	5,199.84
Bengkulu	165.1	209.76	289.07	421.73	351.09	440.92	483.76	507.99	672.06	701.30	745.38	804.58	872.26	826.67	712.35	984.42	1,088.42	1,033.85
Lampung	631.98	674.69	891.78	812.08	1118.34	1395.67	1687.7	2183.41	2,274.68	2,247.34	2,446.04	2,750.60	2,864.24	3,018.07	2,842.29	3,249.67	3,678.30	3,766.19
Kep. Bangka Belitung	198.17	203.54	294.18	255.26	328.12	459.2	438.37	465.93	562.92	571.80	567.63	709.83	850.44	826.7	683.43	895.76	1,090.48	949.85
Kep. Riau	281.83	324.99	406.28	424.68	522	620.9	723.05	632.81	1,070.20	1,012.14	1,109.05	1,094.79	1,220.77	1,311.70	1,195.64	1,375.77	1,675.73	1,806.97

**Lampiran 2 : Data Penelitian Realisasi DBHP Provinsi di Sumatera Tahun 2006-2023 (Miliar Rupiah)**

Provinsi	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak (Miliar Rupiah)																	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	120.08	139.14	272.36	184.9	201.97	224.63	251.12	238.11	77.43	205.97	225.93	219.96	159.6	113.61	206.21	200.32	170.78	150.01
Sumatera Utara	240.83	291.47	306.25	316	403.52	379.38	451.84	691.14	380.46	313.79	485.32	446.15	455.53	322.41	394.67	691.3	631.46	506.37
Sumatera Barat	71.45	84.26	85.86	89.2	103.32	90.61	183.06	159.05	132.67	94.44	164	168.66	131.76	107.5	146.66	161.97	166.04	137.79
Riau	328.54	388.94	395.71	395.07	555.97	465.18	502.49	559.66	668.49	756.11	877.34	139.09	116.23	79.69	108.08	1,495.83	1,127.90	863.25
Jambi	128.28	146.94	130.38	129.18	157.83	165.26	217.35	172.94	194.97	179.89	198.81	188.91	170.44	152.85	149.03	273.81	220.65	192.72
Sumatera Selatan	253.33	312.84	294.43	344.72	431	379.63	490.24	558.07	548.89	578.42	788.75	637.87	707.05	763.86	966.31	1,219.27	958.92	773.49
Bengkulu	7.48	38.93	37.6	40.84	52.02	18.51	61.84	55.25	50.653	36	82.57	43,70	40.96	22.61	36.97	62.01	57.87	49.81
Lampung	78.28	94.24	91.33	105.93	130.17	126.73	164.92	170.26	142.64	105.18	156.58	148.41	122.49	87.41	148.36	186.59	167.26	124.67
Kep. Bangka Belitung	24.46	33.01	41.57	40.34	52.05	55.99	63.59	65	52.83	47.46	62.47	39.04	53.51	43.36	39.42	95.39	87.63	72.49
Kep. Riau	124.79	159.81	174.67	185.87	234.37	217.46	1110.42	220.77	203.98	167.1	266.73	197.99	157.69	103.44	151.74	233.32	201.89	290.27

**Lampiran 3 : Data Penelitian Realisasi DBHBP Provinsi di Sumatera Tahun 2006-2023 (Miliar Rupiah)**

Provinsi	Jumlah Realisasi DBHBP (Miliar Rupiah)																	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	1731.8	1177.84	1765.01	1465.27	118.2	1270.15	122.17	101.04	1,199.68	47.04	25.65	33.44	32.28	98.33	0	31.41	257.08	311.59
Sumatera Utara	2.29	2.25	4.88	1.36	2.31	7.16	8.31	19.39	23.31	20.45	30.59	14.7	58.31	58.89	31.4	112.33	177.69	75
Sumatera Barat	5.75	3.26	1.98	1.29	5.42	1.6	9.76	8	16.38	12.57	10.7	13.34	15.53	26.42	18.94	25.75	34	42.24
Riau	2068.36	1469.34	2093.27	1793.77	2349.31	2324.77	2564.67	2212.41	2,698.59	1,074.93	1,015.82	749.54	864.95	865.86	1002.45	446.59	752.07	752.26
Jambi	122.43	124.59	130.38	129.18	265.59	301.32	350.16	239.37	321.85	172.07	126	201.6	236.36	243.68	221.3	214.53	450.81	315.24
Sumatera Selatan	449.53	457.85	584.35	648.53	862.16	933.82	1127	1191.06	1,385.67	749.98	694.57	869.85	936.9	931.59	1018.17	717.56	1693.67	1706.75
Bengkulu	5.62	0.859	2.08	1.57	2.74	49.73	17.21	9.92	44.9	63	81.9	17.61	25.4	23.64	24.43	28.73	66.6	84.36
Lampung	123.78	82.88	133.03	58.76	107.29	124.36	145.69	130.7	144.94	66.91	57.31	100.92	93.54	51.12	40.78	42.39	109.16	85.31
Kep. Bangka Belitung	35.84	53.95	93.49	65.56	45.51	145.04	98.68	107.44	122.11	140.69	163.68	81.79	162.03	161.04	101.48	149.2	441.79	252.64
Kep. Riau	546.67	169.19	480.93	295.37	761.69	611.76	0	722.33	721.28	340.54	354.68	328.67	379.76	633.99	375.26	233.56	531.38	403

**Lampiran 4 : Data Penelitian Realisasi Belanja Modal Provinsi di Sumatera Tahun 2006-2023 (Miliar Rupiah)**

Provinsi	Realisasi Belanja Modal (Miliar Rupiah)																	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	570,3	775,17	2609,72	5015,63	3267,91	1473,98	815,33	1855,44	2.397,50	2.025,10	2.582,41	2.168,30	2.503,94	3.162,09	1.755,47	2.199,33	2.868,71	1.676,03
Sumatera Utara	622,82	686,13	579,74	713,51	716,8	1063,23	803,6	913,4	1.145,97	932,24	1.243,29	1.919,45	1.564,90	1.249,60	1.497,94	1.141,20	1.776,12	2.629,55
Sumatera Barat	248,37	259,26	362,1	431,32	583,06	594,23	645,61	700,4	785,88	788,14	1.164,09	832,18	1.099,70	1.062,23	736,89	666,35	941,07	952,72
Riau	1407,65	1508,72	1195,26	1206,07	1421,08	1342,18	1961,66	2687,86	623,64	2.014,48	2.532,12	1.941,22	1.046,85	1.161,04	919,25	1.018,46	1.508,53	2.082,95
Jambi	416,79	422,44	560,25	483,92	465,86	518,75	678,74	716,1	818,05	791,3	1.087,37	895,65	784,72	866,5	642,7	449,69	906,8	1.031,00
Sumatera Selatan	846,99	984,27	891,58	636,55	1033,27	1139,12	1017,13	1099,13	731,61	1.041,02	1.241,87	1.377,38	1.537,28	1.606,22	1.664,70	1.836,83	1.536,37	1.239,94
Bengkulu	125,966	189,71	388,31	134,92	165,06	220,88	290,26	300,14	305,05	479,18	588,69	711,07	618,48	741,82	417,1	324,34	417,02	586,89
Lampung	326,5	269,8	208,83	236,71	425,8	631,25	831,95	970,16	925,45	868,99	1.067,23	1.451,48	1.729,33	1.014,04	752,53	849,69	1.025,33	1.207,38
Kep. Bangka Belitung	153,95	194,5	235,19	347,21	313,36	487,55	290,78	482,35	305,55	233,71	340,78	368,21	315,4	441,2	436,5	428,65	354,01	566,22
Kep. Riau	193,65	434,98	289,2	636,86	651,56	259,9	262,34	382,69	717,99	341,28	407,98	495,73	620,06	633,11	586,61	338,33	552,16	618,88

**Lampiran 5 : Data Penelitian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Tahun 2006-2023 (Persen)**

Provinsi	Laju PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)																	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	21.77	2.51	3.43	-3.77	43.51	6.57	5.83	6.50	6.95	-1.04	6.00	6.55	6.93	5.32	1.32	11.18	13.75	7.93
SUMATERA UTARA	14.87	13.37	17.66	10.48	40.08	13.88	10.63	12.73	11.39	9.15	9.50	9.36	8.34	8.09	1.18	6.01	11.08	10.03
SUMATERA BARAT	18.70	12.76	18.09	8.05	37.65	13.00	10.75	11.75	13.72	7.73	8.97	9.07	7.80	6.87	-1.84	4.63	12.75	9.60
RIAU	20.18	25.70	31.62	15.60	21.62	24.98	15.00	8.77	11.88	-3.96	4.43	3.37	7.20	1.29	-4.91	15.31	18.19	3.52
JAMBI	15.90	23.08	27.99	4.29	111.65	14.24	11.15	14.73	16.54	0.79	10.40	10.86	9.79	4.48	-5.80	13.27	19.12	6.15
SUMATERA SELATAN	17.66	14.56	21.32	2.42	42.07	16.83	11.73	11.34	9.37	7.57	6.66	8.20	9.62	8.46	-0.14	8.59	19.53	6.62
BENGKULU	12.46	12.96	12.65	7.10	82.53	13.57	12.45	11.74	11.80	11.27	10.03	9.52	9.49	8.63	1.61	8.59	13.20	7.15
LAMPUNG	20.07	24.03	22.27	18.57	70.47	12.94	10.17	9.10	13.02	9.47	10.49	9.76	8.79	8.09	-2.12	5.15	11.57	8.39
KEP. BANGKA BELITUNG	12.34	12.40	20.27	5.07	57.26	14.87	11.14	11.00	11.90	8.15	6.66	7.41	4.66	3.70	-0.41	13.83	10.86	7.70
KEP. RIAU	12.76	12.14	14.24	7.91	74.08	14.11	14.13	12.61	12.14	9.10	8.24	5.42	9.38	7.63	-5.22	8.47	12.05	7.46

**Lampiran 6 : Data Jumlah Penduduk Provinsi di Sumatera Tahun 2006-2023 (Ribuan Jiwa)**

Provinsi	Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Sumatera Sumatera (Ribuan Jiwa)																		Rata-Rata
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	4,153	4,223	4,293	4,363	4,486	4,619	4,715	4,811	4,907	5,002	5,096	5,190	5,281	5,372	5,275	5,334	5,408	5,483	4,890
Pertumbuhan (%)		1.69	1.66	1.63	2.82	2.96	2.08	2.04	2.00	1.94	1.88	1.84	1.75	1.72	-1.81	1.12	1.39	1.39	1.65
Sumatera Utara	12,643	12,834	13,042	13,248	12,985	13,221	13,408	13,590	13,767	13,938	14,103	14,262	14,415	14,563	14,799	14,936	15,115	15,387	13,903
Pertumbuhan (%)		1.51	1.62	1.58	-1.99	1.82	1.41	1.36	1.30	1.24	1.18	1.13	1.07	1.03	1.62	0.93	1.20	1.80	1.17
Sumatera Barat	4,661	4,731	4,801	4,869	4,845	4,933	5,000	5,067	5,132	5,196	5,260	5,322	5,382	5,441	5,534	5,580	5,641	5,757	5,175
Pertumbuhan (%)		1.50	1.48	1.42	-0.49	1.82	1.36	1.34	1.28	1.25	1.23	1.18	1.13	1.10	1.71	0.83	1.09	2.06	1.25
Riau	4,762	5,071	5,189	5,306	5,543	5,726	5,879	6,033	6,188	6,344	6,501	6,658	6,815	6,972	6,394	6,494	6,614	6,643	6,063
Pertumbuhan (%)		6.49	2.33	2.25	4.47	3.30	2.67	2.62	2.57	2.52	2.47	2.42	2.36	2.30	-8.29	1.56	1.85	0.44	2.02
Jambi	2,727	2,818	2,909	3,001	3,088	3,168	3,227	3,286	3,344	3,402	3,459	3,515	3,570	3,625	3,548	3,585	3,631	3,679	3,310
Pertumbuhan (%)		3.34	3.23	3.16	2.90	2.59	1.86	1.83	1.77	1.73	1.68	1.62	1.56	1.54	-2.12	1.04	1.28	1.32	1.78
Sumatera Selatan	6,775	7,019	7,121	7,222	7,446	7,599	7,714	7,829	7,942	8,052	8,161	8,267	8,370	8,471	8,467	8,551	8,657	8,744	7,912
Pertumbuhan (%)		3.60	1.45	1.42	3.10	2.05	1.51	1.49	1.44	1.39	1.35	1.30	1.25	1.21	-0.05	0.99	1.24	1.00	1.52
Bengkulu	1,568	1,616	1,640	1,670	1,713	1,753	1,784	1,814	1,845	1,876	1,905	1,934	1,963	1,992	2,011	2,033	2,060	2,086	1,848
Pertumbuhan (%)		3.06	1.49	1.83	2.57	2.34	1.77	1.68	1.71	1.68	1.55	1.52	1.50	1.48	0.95	1.09	1.33	1.26	1.69
Lampung	7,211	7,289	7,391	7,491	7,596	7,736	7,835	7,936	8,026	8,117	8,205	8,290	8,371	8,448	9,008	9,082	9,177	9,314	8,140
Pertumbuhan (%)		1.08	1.40	1.35	1.40	1.84	1.28	1.29	1.13	1.13	1.08	1.04	0.98	0.92	6.63	0.82	1.05	1.49	1.52
Kep. Bangka Belitung	1,074	1,106	1,122	1,138	1,223	1,258	1,287	1,315	1,344	1,373	1,402	1,431	1,460	1,489	1,456	1,473	1,495	1,512	1,331
Pertumbuhan (%)		2.98	1.45	1.43	7.47	2.86	2.31	2.18	2.21	2.16	2.11	2.07	2.03	1.99	-2.22	1.17	1.49	1.14	2.05
Kep. Riau	1,337	1,392	1,453	1,514	1,685	1,749	1,805	1,861	1,917	1,973	2,028	2,083	2,137	2,190	2,183	2,065	2,118	2,153	1,869
Pertumbuhan (%)		4.11	4.38	4.20	11.29	3.80	3.20	3.10	3.01	2.92	2.79	2.71	2.59	2.48	-0.32	-5.41	2.57	1.65	2.89

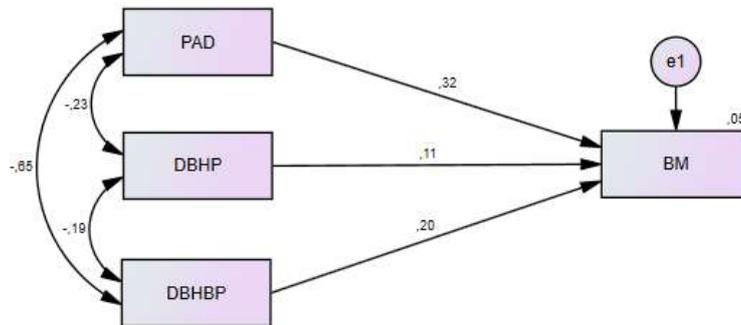
## Lampiran 7 : Data Realisasi Pedapatn Daerah Provinsi di Sumatera Tahun 2006-2023

Provinsi	Realisasi Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah)																		Rata-Rata
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	4067.19	3012.37	6911.76	6732.21	6967.81	7089.65	9180.14	10671.82	11606.32	11694.1	12364.5	14350.9	14622.4	15753	13976	13948.4	13353	10186.8	<b>10360.441</b>
Pertumbuhan (%)		-25.93	129.45	-2.60	3.50	1.75	29.49	16.25	8.76	0.76	5.73	16.07	1.89	7.73	-11.28	-0.20	-4.27	-23.71	<b>9.02</b>
Sumatera Utara	2299.46	2685.78	3225.85	3248.99	3885.63	4480.78	7201.84	7397.98	7772.02	8480.75	10440.6	12234.8	13037.5	13080	13881	14034	12011.6	13458.5	<b>8492.0306</b>
Pertumbuhan (%)		16.80	20.11	0.72	19.60	15.32	60.73	2.72	5.06	9.12	23.11	17.18	6.56	0.32	6.13	1.10	-14.41	12.05	<b>11.89</b>
Sumatera Barat	1058.66	1231.39	1723.76	1523.89	1920.97	1986.57	2922.58	3147.83	3635.83	4052.24	4624.67	6066.82	6431.89	6390.3	6987.6	6076.05	5924.28	6459.26	<b>4009.1456</b>
Pertumbuhan (%)		16.32	39.98	-11.60	26.06	3.41	47.12	7.71	15.50	11.45	14.13	31.18	6.02	-0.65	9.35	-13.05	-2.50	9.03	<b>12.32</b>
Riau	3579.68	3413	4164.94	3663.1	4346.84	4275.9	6847.31	6994.64	8132.41	6911.04	6942.92	7902.47	9236.88	8703.2	8420.4	9383	8656.84	9481.27	<b>6725.3267</b>
Pertumbuhan (%)		-4.66	22.03	-12.05	18.67	-1.63	60.14	2.15	16.27	-15.02	0.46	13.82	16.89	-5.78	-3.25	11.43	-7.74	9.52	<b>7.13</b>
Jambi	1010.11	1155.35	1436.38	1292.67	1640.18	1399.12	2654.69	2886.3	3165.05	3129.71	3203.97	4305.26	4218.02	4575.2	4694	4725.72	4215.3	4909.07	<b>3034.2267</b>
Pertumbuhan (%)		14.38	24.32	-10.01	26.88	-14.70	89.74	8.72	9.66	-1.12	2.37	34.37	-2.03	8.47	2.60	0.68	-10.80	16.46	<b>11.77</b>
Sumatera Selatan	1866.21	2135.81	2574.42	2681.67	3224.15	3435.48	5223.88	5468.14	6237.36	5990.42	6582.78	8195.96	6865.58	9273.1	10345	9611.29	9902.57	10744.5	<b>6131.0017</b>
Pertumbuhan (%)		14.45	20.54	4.17	20.23	6.55	52.06	4.68	14.07	-3.96	9.89	24.51	-16.23	35.07	11.56	-7.09	3.03	8.50	<b>11.88</b>
Bengkulu	556.3	765.4	1082.51	1007.09	1000.86	1145.96	1562.52	1696.37	1986.23	2180.67	2355.56	2804.57	2992.59	2934.1	3368.9	3051.75	2760.07	2897.37	<b>2008.2633</b>
Pertumbuhan (%)		37.59	41.43	-6.97	-0.62	14.50	36.35	8.57	17.09	9.79	8.02	19.06	6.70	-1.96	14.82	-9.41	-9.56	4.97	<b>11.20</b>
Lampung	1341.05	1515.26	1711.01	1890.12	2004.89	2181.16	3834.73	3884.53	4454.18	4781.2	5476.92	6948.83	8112.69	7058.3	7024.8	7097.65	7011.69	7381.76	<b>4650.5978</b>
Pertumbuhan (%)		12.99	12.92	10.47	6.07	8.79	75.81	1.30	14.66	7.34	14.55	26.87	16.75	-13.00	-0.47	1.04	-1.21	5.28	<b>11.77</b>
Kep. Bangka Belitung	463.38	593.77	775.34	1001.91	862.71	1067.05	1332.03	1609.66	1596.08	1869.95	2069.86	2359.07	2874.91	2776.1	2489.6	2465.81	2079.66	2962.29	<b>1736.0661</b>
Pertumbuhan (%)		28.14	30.58	29.22	-13.89	23.69	24.83	20.84	-0.84	17.16	10.69	13.97	21.87	-3.44	-10.32	-0.96	-15.66	42.44	<b>12.84</b>
Kep. Riau	912.3	1277.57	1148.93	1636	1723.57	1978.76	2249.82	2715.83	3312.45	2605.39	2782.11	3037.64	3594.25	3655.1	4141.7	3703.81	3870.32	4151.64	<b>2694.2906</b>
Pertumbuhan (%)		40.04	-10.07	42.39	5.35	14.81	13.70	20.71	21.97	-21.35	6.78	9.18	18.32	1.69	13.31	-10.57	4.50	7.27	<b>10.47</b>

### Lampiran 8 : Data Realisasi Belanja Daerah Provinsi di Sumatera Tahun 2006-20023

Provinsi	Realisasi Belanja Daerah (Miliar Rupiah)																		Rata-Rata
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	2442.72	3342.66	5715.62	9791.34	7528.51	8077.91	8757.32	11220.42	12045.84	12149.4	12119.7	13832.8	15084	14672	15798	13683.6	16170.7	11093.9	10751.477
Pertumbuhan (%)		36.84	70.99	71.31	-23.11	7.30	8.41	28.13	7.36	0.86	-0.24	14.14	9.04	-2.73	7.67	-13.38	18.18	-31.40	12.32
Sumatera Utara	2184.67	2553.27	2967.35	3615.97	3666.7	4677.86	7633.63	7260.46	7808.55	7959.16	9476.42	12518.8	13867.5	13440	14081	13225.4	12649.6	14273.5	8547.7817
Pertumbuhan (%)		16.87	16.22	21.86	1.40	27.58	63.19	-4.89	7.55	1.93	19.06	32.10	10.77	-3.08	4.77	-6.08	-4.35	12.84	12.81
Sumatera Barat	960.09	1241.37	1637.7	1707.69	2239.75	2123.68	2962.29	3113.31	3483.67	4022.25	4504.03	5759.81	6642.45	6551.3	7271.6	6468.9	6204.28	6789.26	4093.5222
Pertumbuhan (%)		29.30	31.93	4.27	31.16	-5.18	39.49	5.10	11.90	15.46	11.98	27.88	15.32	-1.37	11.00	-11.04	-4.09	9.43	13.09
Riau	3171.1	3726.76	3657.88	4006.11	4267.43	4468.25	6670.76	7525.28	5602.07	7760.97	8731.93	9188.74	10326.4	8690.4	8486.3	8931.7	8656.84	10142.5	6889.5211
Pertumbuhan (%)		17.52	-1.85	9.52	6.52	4.71	49.29	12.81	-25.56	38.54	12.51	5.23	12.38	-15.84	-2.35	5.25	-3.08	17.16	8.40
Jambi	963.24	1105.38	1404.98	1670.04	1488.13	1498.75	2531.59	3010.74	3204.63	3425.56	3294.48	4132.94	4515.14	4824.4	5244.8	4388.29	4795.84	5501.68	3166.7
Pertumbuhan (%)		14.76	27.10	18.87	-10.89	0.71	68.91	18.93	6.44	6.89	-3.83	25.45	9.25	6.85	8.72	-16.33	9.29	14.72	12.11
Sumatera Selatan	1741.58	2319.23	2386.78	2751.67	3108.03	3565.88	5060.92	5678.7	5770.73	5190.19	4962.57	6409.38	5806.8	9654.7	10541	10060.7	9766.47	10511.8	5849.2839
Pertumbuhan (%)		33.17	2.91	15.29	12.95	14.73	41.93	12.21	1.62	-10.06	-4.39	29.15	-9.40	66.27	9.18	-4.56	-2.92	7.63	12.69
Bengkulu	504.87	664.76	1249.66	857.59	971.19	1155.76	1518.45	1727	1934.72	2282.34	2029.69	2867.21	3424.71	3118.3	3475.8	2880.22	2838.77	2977.76	2026.5972
Pertumbuhan (%)		31.67	87.99	-31.37	13.25	19.00	31.38	13.73	12.03	17.97	-11.07	41.26	19.44	-8.95	11.46	-17.13	-1.44	4.90	13.77
Lampung	1341.05	1515.26	1711.01	1890.12	2004.89	2181.16	3834.73	3884.53	4454.18	4781.2	5476.92	6948.83	8112.69	7058.3	7024.8	7097.65	7011.69	7381.76	4650.5978
Pertumbuhan (%)		12.99	12.92	10.47	6.07	8.79	75.81	1.30	14.66	7.34	14.55	26.87	16.75	-13.00	-0.47	1.04	-1.21	5.28	11.77
Kep. Bangka Belitung	463.38	593.77	775.34	1001.91	862.71	1067.05	1332.03	1609.66	1596.08	1869.95	2069.86	2359.07	2874.91	2776.1	2489.6	2465.81	2079.66	2962.29	1736.0661
Pertumbuhan (%)		28.14	30.58	29.22	-13.89	23.69	24.83	20.84	-0.84	17.16	10.69	13.97	21.87	-3.44	-10.32	-0.96	-15.66	42.44	12.84
Kep. Riau	912.3	1277.57	1148.93	1636	1723.57	1978.76	2249.82	2715.83	3312.45	2605.39	2782.11	3037.64	3594.25	3655.1	4141.7	3703.81	3870.32	4151.64	2694.2906
Pertumbuhan (%)		40.04	-10.07	42.39	5.35	14.81	13.70	20.71	21.97	-21.35	6.78	9.18	18.32	1.69	13.31	-10.57	4.50	7.27	10.47

**Lampiran 9 : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Provinsi di Sumatera  
PROVINSI ACEH**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	,000	1765,010	,813	1,409	-1,085	-,940
DBHP	77,430	272,360	-,425	-,736	-,564	-,488
PAD	476,900	2987,190	,042	,074	-1,630	-1,412
BM	570,300	5015,630	,737	1,276	1,152	,998
Multivariate					2,417	,740

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,372	,409	,909	,363	
BM <--- DBHP	2,219	5,525	,402	,688	
BM <--- DBHBP	,312	,549	,568	,570	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- PAD	,322
BM <--- DBHP	,110
BM <--- DBHBP	,199

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD <--> DBHBP	-371565,142	165277,891	-2,248	,025	
DBHP <--> DBHBP	-6213,662	8081,308	-,769	,442	
PAD <--> DBHP	-10147,107	11024,691	-,920	,357	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
PAD <--> DBHBP	-,650
DBHP <--> DBHBP	-,190
PAD <--> DBHP	-,229

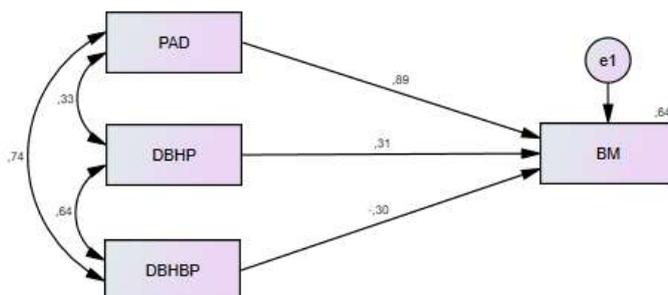
**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	773207,477	265207,977	2,915	,004	
DBHP	2539,139	870,917	2,915	,004	
DBHBP	422040,186	144758,589	2,915	,004	
e1	986448,357	338348,995	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,047

**PROVINSI SUMATERA UTARA**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	1,360	177,690	1,865	3,230	2,925	2,534
DBHP	240,830	691,300	,769	1,331	-,328	-,284
PAD	379,380	7258,020	-,065	-,113	-1,526	-1,322
BM	579,740	2629,550	1,168	2,023	,981	,850
Multivariate					6,176	1,891

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,192	,049	3,938	***	
BM <--- DBHP	1,238	,793	1,561	,118	
BM <--- DBHBP	-3,435	3,215	-1,068	,285	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- PAD	,891
BM <--- DBHP	,308
BM <--- DBHBP	-,298

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD <--> DBHBP	81432,382	33076,360	2,462	,014	
DBHP <--> DBHBP	3766,494	1690,145	2,229	,026	
PAD <--> DBHP	103376,878	80105,053	1,291	,197	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
PAD <--> DBHBP	,744
DBHP <--> DBHBP	,642
PAD <--> DBHP	,330

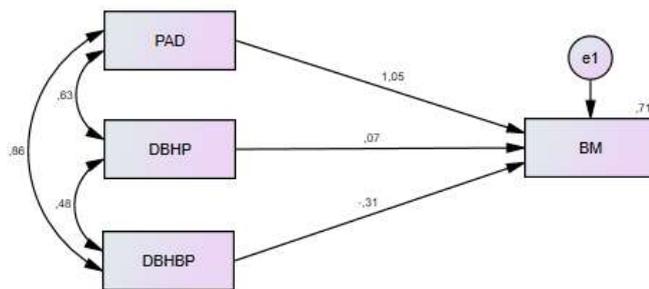
**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	5852927,510	2007537,574	2,915	,004	
DBHP	16811,955	5766,453	2,915	,004	
DBHBP	2044,710	701,330	2,915	,004	
e1	96638,078	33146,587	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,645

**PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	1,290	42,240	,972	1,684	,147	,127
DBHP	71,450	183,060	-,006	-,011	-1,471	-1,274
PAD	494,920	2851,970	-,098	-,171	-1,337	-1,158
BM	248,370	1164,090	-,140	-,242	-,820	-,710
Multivariate					1,053	,322

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)****Maximum Likelihood Estimates****Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,382	,108	3,550	***	
BM <--- DBHP	,566	1,301	,435	,663	
BM <--- DBHBP	-7,347	6,090	-1,207	,228	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- PAD	1,047
BM <--- DBHP	,074
BM <--- DBHBP	-,313

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD <--> DBHBP	7099,501	2639,865	2,689	,007	
DBHP <--> DBHBP	188,119	106,144	1,772	,076	
PAD <--> DBHP	16138,309	7307,653	2,208	,027	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
PAD <--> DBHBP	,861
DBHP <--> DBHBP	,476
PAD <--> DBHP	,634

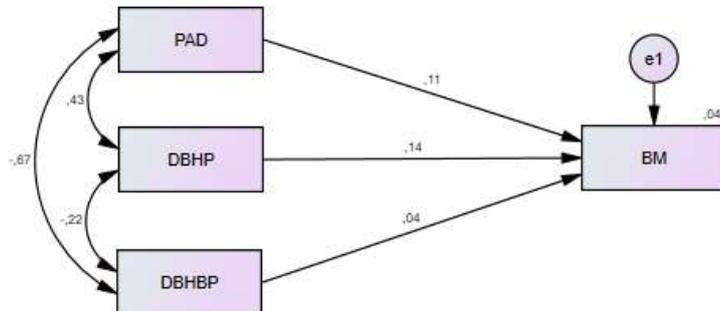
**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	531244,142	182215,238	2,915	,004	
DBHP	1218,621	417,984	2,915	,004	
DBHBP	128,130	43,948	2,915	,004	
e1	20306,174	6964,960	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,713

**PROVINSI RIAU**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	446,590	2698,590	,213	,369	-1,517	-1,313
DBHP	79,690	1495,830	,894	1,548	,459	,398
PAD	964,660	5866,450	,297	,514	-,404	-,350
BM	623,640	2687,860	,551	,955	-,491	-,425
Multivariate					,950	,291

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,047	,147	,318	,750	
BM <--- DBHP	,202	,396	,510	,610	
BM <--- DBHBP	,033	,242	,136	,892	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- PAD	,111
BM <--- DBHP	,135
BM <--- DBHBP	,044

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD <--> DBHBP	-627412,019	273362,385	-2,295	,022	
DBHP <--> DBHBP	-57282,072	65768,933	-,871	,384	
PAD <--> DBHP	201305,031	124054,326	1,623	,105	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
PAD <--> DBHBP	-,670
DBHP <--> DBHBP	-,216
PAD <--> DBHP	,428

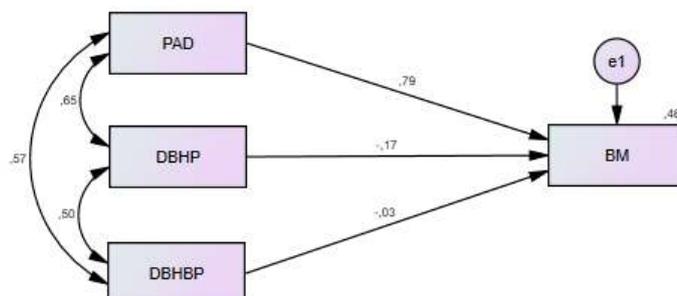
**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	1661068,739	569741,877	2,915	,004	
DBHP	133105,494	45654,808	2,915	,004	
DBHBP	527800,580	181034,105	2,915	,004	
e1	286253,178	98184,030	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,036

**PROVINSI JAMBI**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	122,430	450,810	,616	1,067	-,139	-,121
DBHP	128,280	273,810	,860	1,489	,653	,566
PAD	372,440	2163,590	,017	,029	-1,161	-1,006
BM	416,790	1087,370	,217	,376	-1,135	-,983
Multivariate					6,909	2,115

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,308	,099	3,116	,002	
BM <--- DBHP	-,993	1,379	-,720	,471	
BM <--- DBHBP	-,069	,518	-,134	,894	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- PAD	,793
BM <--- DBHP	-,174
BM <--- DBHBP	-,030

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD <--> DBHBP	27416,574	13365,291	2,051	,040	
DBHP <--> DBHBP	1634,307	881,145	1,855	,064	
PAD <--> DBHP	12723,825	5635,652	2,258	,024	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
PAD <--> DBHBP	,574
DBHP <--> DBHBP	,504
PAD <--> DBHP	,654

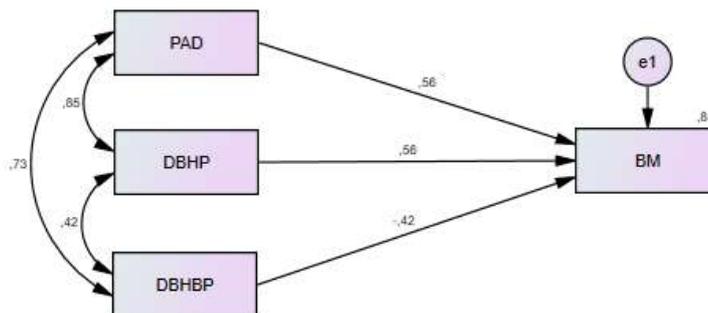
**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	286443,318	98249,248	2,915	,004	
DBHP	1319,752	452,671	2,915	,004	
DBHBP	7977,349	2736,208	2,915	,004	
e1	23353,415	8010,155	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,458

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	449,530	1706,750	,781	1,353	-,108	-,094
DBHP	253,330	1219,270	,582	1,008	-,359	-,311
PAD	741,950	5199,840	,407	,705	-,660	-,572
BM	636,550	1836,830	,268	,464	-,881	-,763
Multivariate					,069	,021

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)****Maximum Likelihood Estimates****Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,145	,081	1,774	,076	
BM <--- DBHP	,718	,306	2,348	,019	
BM <--- DBHBP	-,387	,170	-2,278	,023	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- PAD	,563
BM <--- DBHP	,564
BM <--- DBHBP	-,420

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD <--> DBHBP	332493,484	137222,516	2,423	,015	
DBHP <--> DBHBP	38868,310	24329,900	1,598	,110	
PAD <--> DBHP	281513,359	105446,275	2,670	,008	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
PAD <--> DBHBP	,726
DBHP <--> DBHBP	,420
PAD <--> DBHP	,850

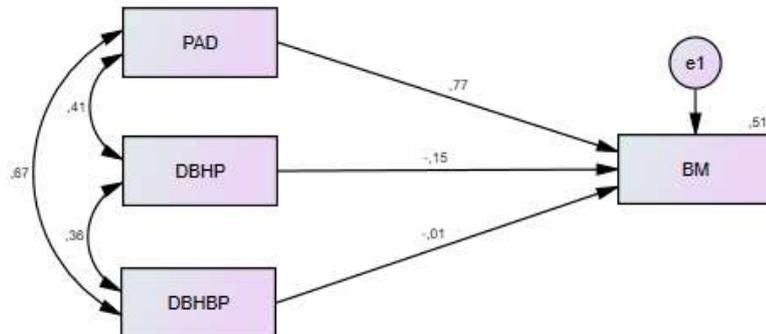
**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	1640047,463	562531,639	2,915	,004	
DBHP	66932,096	22957,520	2,915	,004	
DBHBP	127775,816	43826,743	2,915	,004	
e1	20831,547	7145,162	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,808

**PROVINSI BENGKULU**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	,859	84,360	,712	1,234	-,787	-,681
DBHP	7,480	82,570	-,062	-,107	,225	,195
PAD	165,100	1088,420	-,037	-,064	-1,102	-,954
BM	125,966	741,820	,360	,624	-1,031	-,893
Multivariate					,952	,292

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,531	,163	3,261	,001	
BM <--- DBHP	-1,639	2,089	-,785	,433	
BM <--- DBHBP	-,066	1,609	-,041	,967	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- PAD	,767
BM <--- DBHP	-,147
BM <--- DBHBP	-,009

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD <--> DBHBP	4971,791	2172,733	2,288	,022	
DBHP <--> DBHBP	164,408	119,141	1,380	,168	
PAD <--> DBHP	1901,603	1224,884	1,552	,121	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
PAD <--> DBHBP	,667
DBHP <--> DBHBP	,355
PAD <--> DBHP	,406

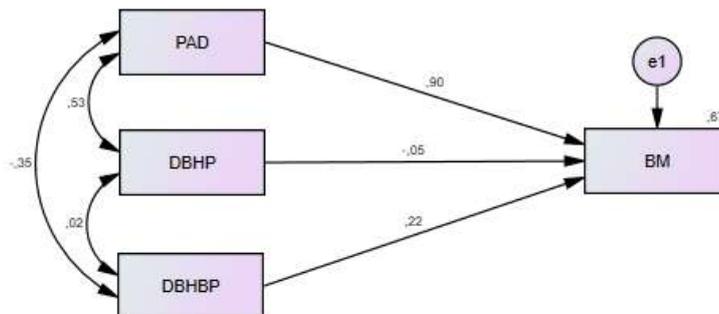
**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	75320,084	25834,576	2,915	,004	
DBHP	290,623	99,683	2,915	,004	
DBHBP	737,311	252,896	2,915	,004	
e1	17725,929	6079,943	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,509

**PROVINSI LAMPUNG**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	40,780	145,690	-,091	-,158	-1,317	-1,141
DBHP	78,280	186,590	-,015	-,027	-1,120	-,970
PAD	631,980	3766,190	-,083	-,144	-1,230	-1,065
BM	208,830	1729,330	,243	,422	-,411	-,356
Multivariate					-1,831	-,561

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)****Maximum Likelihood Estimates****Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,366	,074	4,969	***	
BM <--- DBHP	-,644	2,221	-,290	,772	
BM <--- DBHBP	2,572	1,822	1,412	,158	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- PAD	,897
BM <--- DBHP	-,049
BM <--- DBHBP	,216

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD <--> DBHBP	-11944,214	8839,269	-1,351	,177	
DBHP <--> DBHBP	21,618	260,058	,083	,934	
PAD <--> DBHP	16597,160	8584,534	1,933	,053	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
PAD <--> DBHBP	-,347
DBHP <--> DBHBP	,020
PAD <--> DBHP	,531

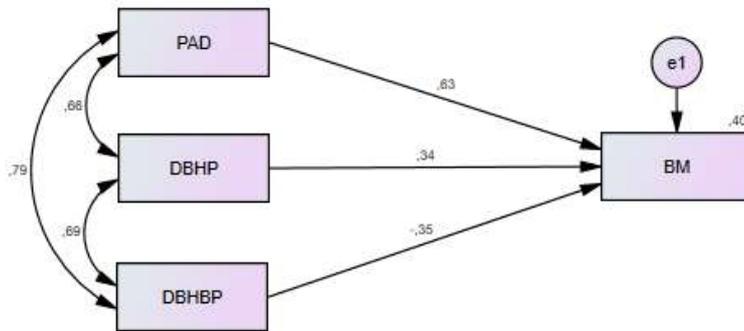
**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	1004115,135	344408,650	2,915	,004	
DBHP	973,331	333,850	2,915	,004	
DBHBP	1180,732	404,988	2,915	,004	
e1	54718,625	18768,333	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,673

**PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	35,840	441,790	2,084	3,610	4,712	4,080
DBHP	24,460	95,390	,714	1,237	,031	,027
PAD	198,170	1090,480	,253	,438	-1,008	-,873
BM	153,950	566,220	,108	,187	-,616	-,534
Multivariate					5,399	1,653

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,252	,129	1,950	,051	
BM <--- DBHP	2,022	1,595	1,267	,205	
BM <--- DBHBP	-,413	,388	-1,064	,287	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- PAD	,625
BM <--- DBHP	,340
BM <--- DBHBP	-,352

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD <--> DBHBP	18896,970	7373,731	2,563	,010	
DBHP <--> DBHBP	1107,353	475,041	2,331	,020	
PAD <--> DBHP	3090,684	1362,253	2,269	,023	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
PAD <--> DBHBP	,793
DBHP <--> DBHBP	,685
PAD <--> DBHP	,659

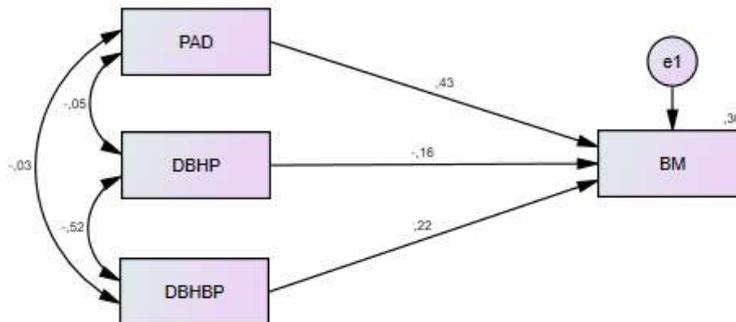
**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	69138,099	23714,172	2,915	,004	
DBHP	318,133	109,119	2,915	,004	
DBHBP	8204,262	2814,039	2,915	,004	
e1	6804,864	2334,049	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,396

**PROVINSI KEP. RIAU**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	,000	761,690	-,169	-,293	-,532	-,461
DBHP	103,440	1110,420	3,589	6,217	11,659	10,097
PAD	281,830	1806,970	,215	,373	-,983	-,851
BM	193,650	717,990	-,120	-,208	-1,378	-1,193
Multivariate					6,697	2,050

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)****Maximum Likelihood Estimates****Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,154	,072	2,126	,034	
BM <--- DBHP	-,116	,176	-,655	,512	
BM <--- DBHBP	,178	,190	,939	,348	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- PAD	,433
BM <--- DBHP	-,156
BM <--- DBHBP	,223

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD <--> DBHBP	-2781,893	21761,149	-,128	,898	
DBHP <--> DBHBP	-22202,508	11733,740	-1,892	,058	
PAD <--> DBHP	-4483,492	23397,578	-,192	,848	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
PAD <--> DBHBP	-,031
DBHP <--> DBHBP	-,517
PAD <--> DBHP	-,047

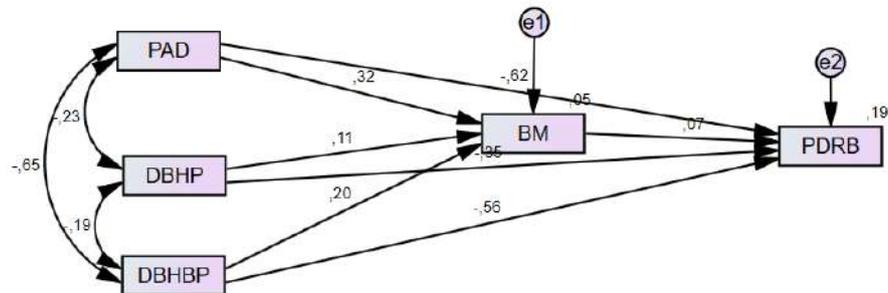
**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	201055,970	68961,629	2,915	,004	
DBHP	46188,590	15842,556	2,915	,004	
DBHBP	40001,647	13720,452	2,915	,004	
e1	17835,735	6117,607	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,298

**Lampiran 10 : Hasil Analisis Jalur Provinsi di Sumatera  
PROVINSI ACEH**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DBHBP	,000	1765,010	,813	1,409	-1,085	-,940
DBHP	77,430	272,360	-,425	-,736	-,564	-,488
PAD	476,900	2987,190	,042	,074	-1,630	-1,412
BM	570,300	5015,630	,737	1,276	1,152	,998
PDRB	-3,770	43,510	2,297	3,978	5,515	4,776
Multivariate					8,404	2,131

**Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	,372	,409	,909	,363	par_1
BM <--- DBHP	2,219	5,525	,402	,688	par_2
BM <--- DBHBP	,312	,549	,568	,570	par_3
PDRB <--- BM	,001	,002	,323	,747	par_4
PDRB <--- DBHBP	-,009	,005	-1,708	,088	par_5
PDRB <--- DBHP	-,069	,051	-1,365	,172	par_6
PDRB <--- PAD	-,007	,004	-1,868	,062	par_7

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- PAD	,322
BM <--- DBHP	,110
BM <--- DBHBP	,199

	Estimate
PDRB <--- BM	,072
PDRB <--- DBHBP	-,558
PDRB <--- DBHP	-,346
PDRB <--- PAD	-,624

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD <--> DBHP	-10147,107	11024,691	-,920	,357	par_8
DBHP <--> DBHBP	-6213,662	8081,308	-,769	,442	par_9
PAD <--> DBHBP	-371565,142	165277,891	-2,248	,025	par_10

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
PAD <--> DBHP	-,229
DBHP <--> DBHBP	-,190
PAD <--> DBHBP	-,650

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	773207,477	265207,977	2,915	,004	par_11
DBHP	2539,139	870,917	2,915	,004	par_12
DBHBP	422040,186	144758,589	2,915	,004	par_13
e1	986448,357	338348,995	2,915	,004	par_14
e2	82,580	28,325	2,915	,004	par_15

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,047
PDRB	,188

**Matrices (Group number 1 - Default model)**

**Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	DBHBP	DBHP	PAD	BM
BM	,312	2,219	,372	,000
PDRB	-,008	-,068	-,007	,001

**Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	DBHBP	DBHP	PAD	BM
BM	,199	,110	,322	,000
PDRB	-,544	-,339	-,601	,072

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	DBHBP	DBHP	PAD	BM
BM	,312	2,219	,372	,000
PDRB	-,009	-,069	-,007	,001

**Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	DBHBP	DBHP	PAD	BM
BM	,199	,110	,322	,000
PDRB	-,558	-,346	-,624	,072

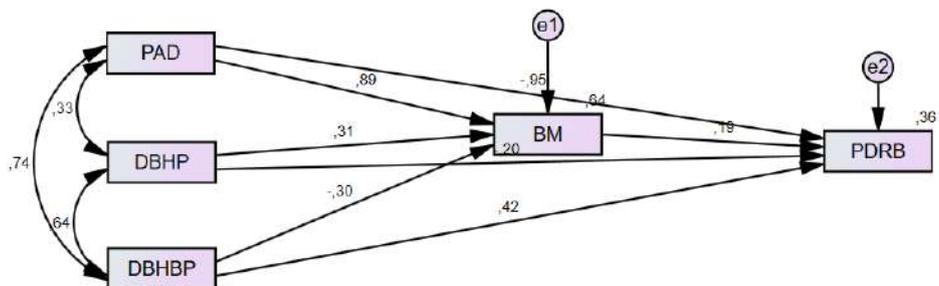
**Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	DBHBP	DBHP	PAD	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,000	,002	,000	,000

**Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	DBHBP	DBHP	PAD	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,014	,008	,023	,000

**PROVINSI SUMATERA UTARA**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	379,380	7258,020	-,065	-,113	-1,526	-1,322
DBHBP	1,360	177,690	1,865	3,230	2,925	2,534
DBHP	240,830	691,300	,769	1,331	-,328	-,284
BM	579,740	2629,550	1,168	2,023	,981	,850
PDRB	1,180	40,080	2,552	4,421	7,350	6,365
Multivariate					10,026	2,542

**Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- DBHP	1,238	,793	1,561	,118	
BM <--- DBHBP	-3,435	3,215	-1,068	,285	
BM <--- PAD	,192	,049	3,938	***	
PDRB <--- PAD	-,003	,001	-2,264	,024	
PDRB <--- DBHP	-,012	,017	-,717	,474	
PDRB <--- DBHBP	,071	,065	1,093	,274	
PDRB <--- BM	,003	,005	,596	,551	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- DBHP	,308
BM <--- DBHBP	-,298
BM <--- PAD	,891
PDRB <--- PAD	-,953
PDRB <--- DBHP	-,203
PDRB <--- DBHBP	,423
PDRB <--- BM	,194

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP <--> PAD	103376,878	80105,053	1,291	,197	
DBHP <--> DBHBP	3766,494	1690,145	2,229	,026	
DBHBP <--> PAD	81432,382	33076,360	2,462	,014	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
DBHP <--> PAD	,330
DBHP <--> DBHBP	,642
DBHBP <--> PAD	,744

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP	16811,955	5766,453	2,915	,004	
DBHBP	2044,710	701,330	2,915	,004	
PAD	5852927,510	2007537,574	2,915	,004	
e1	96638,078	33146,587	2,915	,004	
e2	37,372	12,819	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,645
PDRB	,357

**Matrices (Group number 1 - Default model)**

**Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,192	-3,435	1,238	,000
PDRB	-,002	,062	-,008	,003

**Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,891	-,298	,308	,000
PDRB	-,779	,365	-,143	,194

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,192	-3,435	1,238	,000
PDRB	-,003	,071	-,012	,003

**Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,891	-,298	,308	,000
PDRB	-,953	,423	-,203	,194

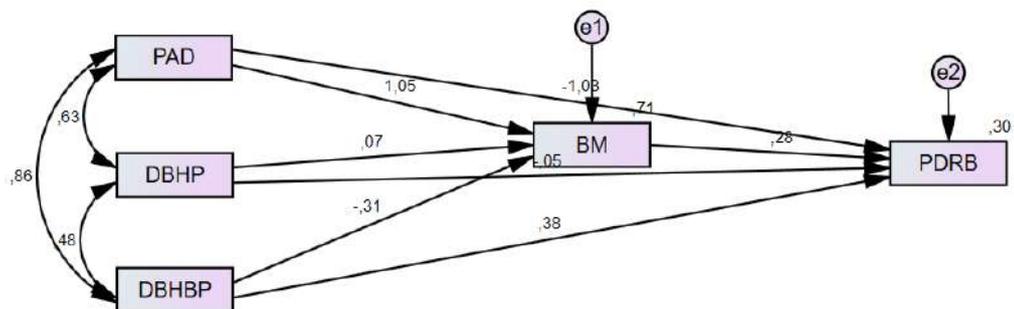
**Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,001	-,010	,004	,000

**Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,173	-,058	,060	,000

**PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	494,920	2851,970	-,098	-,171	-1,337	-1,158
DBHBP	1,290	42,240	,972	1,684	,147	,127
DBHP	71,450	183,060	-,006	-,011	-1,471	-1,274
BM	248,370	1164,090	-,140	-,242	-,820	-,710
PDRB	-1,840	37,650	1,767	3,060	4,502	3,899
Multivariate					2,522	,639

**Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- DBHP	,566	1,301	,435	,663	
BM <--- DBHBP	-7,347	6,090	-1,207	,228	
BM <--- PAD	,382	,108	3,550	***	
PDRB <--- PAD	-,011	,006	-1,706	,088	
PDRB <--- DBHP	-,012	,060	-,195	,846	
PDRB <--- DBHBP	,262	,289	,905	,366	
PDRB <--- BM	,008	,011	,749	,454	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- DBHP	,074
BM <--- DBHBP	-,313
BM <--- PAD	1,047
PDRB <--- PAD	-1,034
PDRB <--- DBHP	-,052
PDRB <--- DBHBP	,381
PDRB <--- BM	,283

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP <--> PAD	16138,309	7307,653	2,208	,027	
DBHP <--> DBHBP	188,119	106,144	1,772	,076	
DBHBP <--> PAD	7099,501	2639,865	2,689	,007	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
DBHP <--> PAD	,634
DBHP <--> DBHBP	,476
DBHBP <--> PAD	,861

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP	1218,621	417,984	2,915	,004	
DBHBP	128,130	43,948	2,915	,004	
PAD	531244,142	182215,238	2,915	,004	
e1	20306,174	6964,960	2,915	,004	
e2	42,262	14,496	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,713
PDRB	,303

**Matrices (Group number 1 - Default model)**

**Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,382	-7,347	,566	,000
PDRB	-,008	,201	-,007	,008

**Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	1,047	-,313	,074	,000
PDRB	-,738	,292	-,031	,283

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,382	-7,347	,566	,000
PDRB	-,011	,262	-,012	,008

**Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	1,047	-,313	,074	,000
PDRB	-1,034	,381	-,052	,283

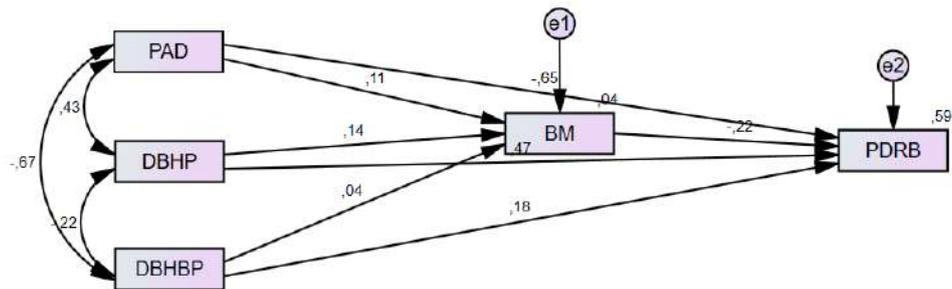
**Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,003	-,061	,005	,000

**Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,296	-,088	,021	,000

**PROVINSI RIAU**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	964,660	5866,450	,297	,514	-,404	-,350
DBHBP	446,590	2698,590	,213	,369	-1,517	-1,313
DBHP	79,690	1495,830	,894	1,548	,459	,398
BM	623,640	2687,860	,551	,955	-,491	-,425
PDRB	-4,910	31,620	,051	,088	-,928	-,803
Multivariate					-,464	-,118

**Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- DBHP	,202	,396	,510	,610	
BM <--- DBHBP	,033	,242	,136	,892	
BM <--- PAD	,047	,147	,318	,750	
PDRB <--- PAD	-,005	,002	-2,833	,005	
PDRB <--- DBHP	,013	,005	2,675	,007	
PDRB <--- DBHBP	,003	,003	,848	,396	
PDRB <--- BM	-,004	,003	-1,365	,172	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- DBHP	,135
BM <--- DBHBP	,044
BM <--- PAD	,111
PDRB <--- PAD	-,648
PDRB <--- DBHP	,468
PDRB <--- DBHBP	,179
PDRB <--- BM	-,217

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP <--> PAD	201305,031	124054,327	1,623	,105	
DBHP <--> DBHBP	-57282,072	65768,933	-,871	,384	
DBHBP <--> PAD	-627412,020	273362,385	-2,295	,022	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
DBHP <--> PAD	,428
DBHP <--> DBHBP	-,216
DBHBP <--> PAD	-,670

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP	133105,494	45654,808	2,915	,004	
DBHBP	527800,581	181034,106	2,915	,004	
PAD	1661068,741	569741,878	2,915	,004	
e1	286253,178	98184,030	2,915	,004	
e2	42,782	14,674	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,036
PDRB	,587

**Matrices (Group number 1 - Default model)****Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,047	,033	,202	,000
PDRB	-,005	,002	,012	-,004

**Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,111	,044	,135	,000
PDRB	-,672	,170	,438	-,217

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,047	,033	,202	,000
PDRB	-,005	,003	,013	-,004

**Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,111	,044	,135	,000
PDRB	-,648	,179	,468	-,217

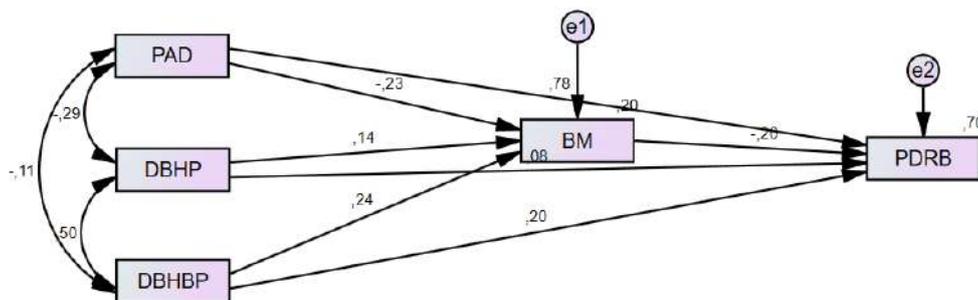
**Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,000	,000	-,001	,000

**Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	-,024	-,009	-,029	,000

**PROVINSI JAMBI**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	122,430	450,810	,616	1,067	-,139	-,121
DBHBP	128,280	273,810	,860	1,489	,653	,566
DBHP	372,440	2163,590	,017	,029	-1,161	-1,006
BM	416,790	1087,370	,217	,376	-1,135	-,983
PDRB	-5,800	111,650	3,226	5,588	10,008	8,667
Multivariate					12,664	3,211

**Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- DBHP	,308	,099	3,116	,002	
BM <--- DBHBP	-,993	1,379	-,720	,471	
BM <--- PAD	-,069	,518	-,134	,894	
PDRB <--- PAD	-,021	,033	-,627	,531	
PDRB <--- DBHP	,039	,193	,200	,842	
PDRB <--- DBHBP	,105	,071	1,470	,142	
PDRB <--- BM	-,021	,017	-1,235	,217	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- DBHP	,793
BM <--- DBHBP	-,174
BM <--- PAD	-,030
PDRB <--- PAD	-,180
PDRB <--- DBHP	,058
PDRB <--- DBHBP	,388
PDRB <--- BM	-,467

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP <--> PAD	1634,307	881,145	1,855	,064	
DBHP <--> DBHBP	12723,825	5635,652	2,258	,024	
DBHBP <--> PAD	27416,574	13365,291	2,051	,040	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
DBHP <--> PAD	,504
DBHP <--> DBHBP	,654
DBHBP <--> PAD	,574

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP	286443,318	98249,248	2,915	,004	
DBHBP	1319,752	452,671	2,915	,004	
PAD	7977,349	2736,208	2,915	,004	
e1	23353,415	8010,155	2,915	,004	
e2	444,379	152,421	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,458
PDRB	,241

**Matrices (Group number 1 - Default model)****Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	-,069	-,993	,308	,000
PDRB	,106	,059	-,028	-,021

**Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	-,030	-,174	,793	,000
PDRB	,393	,089	-,609	-,180

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	-,069	-,993	,308	,000
PDRB	,105	,039	-,021	-,021

**Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	-,030	-,174	,793	,000
PDRB	,388	,058	-,467	-,180

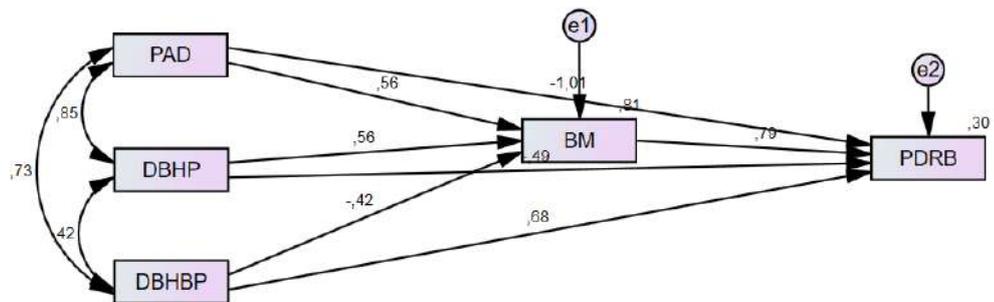
**Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,001	,021	-,006	,000

**Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,005	,031	-,143	,000

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	741,950	5199,840	,407	,705	-,660	-,572
DBHBP	449,530	1706,750	,781	1,353	-,108	-,094
DBHP	253,330	1219,270	,582	1,008	-,359	-,311
BM	636,550	1836,830	,268	,464	-,881	-,763
PDRB	-,140	42,070	1,791	3,103	3,843	3,328
Multivariate					2,165	,549

**Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- DBHP	,718	,306	2,348	,019	
BM <--- DBHBP	-,387	,170	-2,278	,023	
BM <--- PAD	,145	,081	1,774	,076	
PDRB <--- PAD	-,007	,005	-1,534	,125	
PDRB <--- DBHP	-,017	,018	-,936	,349	
PDRB <--- DBHBP	,017	,010	1,704	,088	
PDRB <--- BM	,022	,013	1,718	,086	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- DBHP	,564
BM <--- DBHBP	-,420
BM <--- PAD	,563
PDRB <--- PAD	-1,007
PDRB <--- DBHP	-,492
PDRB <--- DBHBP	,682
PDRB <--- BM	,792

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP <--> PAD	281513,260	105446,241	2,670	,008	
DBHP <--> DBHBP	38868,287	24329,893	1,598	,110	
DBHBP <--> PAD	332493,358	137222,473	2,423	,015	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
DBHP <--> PAD	,850
DBHP <--> DBHBP	,420
DBHBP <--> PAD	,726

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP	66932,078	22957,513	2,915	,004	
DBHBP	127775,786	43826,733	2,915	,004	
PAD	1640046,935	562531,458	2,915	,004	
e1	20831,547	7145,162	2,915	,004	
e2	56,996	19,549	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,808
PDRB	,305

**Matrices (Group number 1 - Default model)**

**Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,145	-,387	,718	,000
PDRB	-,004	,009	-,002	,022

**Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,563	-,420	,564	,000
PDRB	-,561	,349	-,045	,792

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,145	-,387	,718	,000
PDRB	-,007	,017	-,017	,022

**Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,563	-,420	,564	,000
PDRB	-1,007	,682	-,492	,792

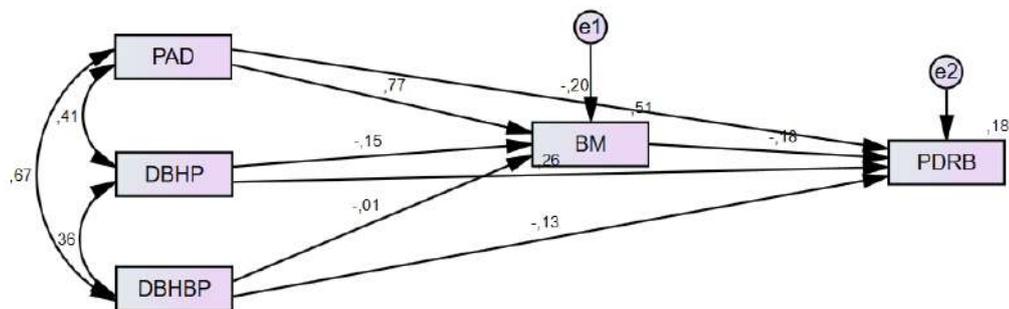
**Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,003	-,008	,016	,000

**Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,446	-,333	,447	,000

**PROVINSI BENGKULU**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	165,100	1088,420	-,037	-,064	-1,102	-,954
DBHBP	,859	84,360	,712	1,234	-,787	-,681
DBHP	7,480	82,570	-,062	-,107	,225	,195
BM	125,966	741,820	,360	,624	-1,031	-,893
PDRB	1,610	82,530	3,683	6,380	12,152	10,524
Multivariate					7,523	1,907

**Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- DBHP	-1,639	2,089	-,785	,433	
BM <--- DBHBP	-,066	1,609	-,041	,967	
BM <--- PAD	,531	,163	3,261	,001	
PDRB <--- PAD	-,012	,024	-,503	,615	
PDRB <--- DBHP	,252	,243	1,035	,301	
PDRB <--- DBHBP	-,081	,184	-,438	,661	
PDRB <--- BM	-,016	,028	-,570	,569	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- DBHP	-,147
BM <--- DBHBP	-,009
BM <--- PAD	,767
PDRB <--- PAD	-,195
PDRB <--- DBHP	,256
PDRB <--- DBHBP	-,130
PDRB <--- BM	-,179

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP <--> PAD	1901,603	1224,884	1,552	,121	
DBHP <--> DBHBP	164,408	119,141	1,380	,168	
DBHBP <--> PAD	4971,791	2172,733	2,288	,022	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
DBHP <--> PAD	,406
DBHP <--> DBHBP	,355
DBHBP <--> PAD	,667

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP	290,623	99,683	2,915	,004	
DBHBP	737,311	252,896	2,915	,004	
PAD	75320,084	25834,576	2,915	,004	
e1	17725,929	6079,943	2,915	,004	
e2	232,300	79,678	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,509
PDRB	,177

**Matrices (Group number 1 - Default model)**

**Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,531	-,066	-1,639	,000
PDRB	-,020	-,080	,278	-,016

**Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,767	-,009	-,147	,000
PDRB	-,333	-,129	,282	-,179

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,531	-,066	-1,639	,000
PDRB	-,012	-,081	,252	-,016

**Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,767	-,009	-,147	,000
PDRB	-,195	-,130	,256	-,179

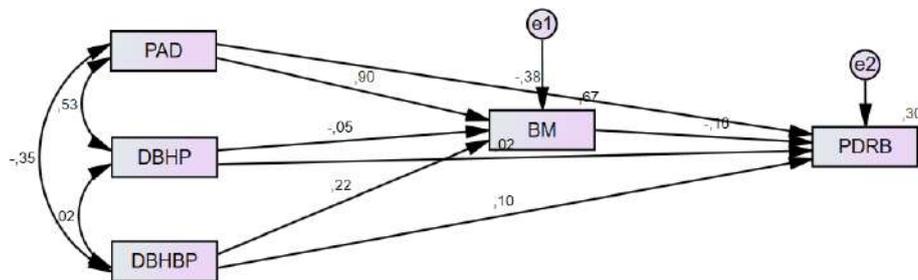
**Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	-,008	,001	,026	,000

**Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	-,137	,002	,026	,000

**LAMPUNG**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	631,980	3766,190	-,083	-,144	-1,230	-1,065
DBHBP	40,780	145,690	-,091	-,158	-1,317	-1,141
DBHP	78,280	186,590	-,015	-,027	-1,120	-,970
BM	208,830	1729,330	,243	,422	-,411	-,356
PDRB	-2,120	70,470	2,832	4,905	8,179	7,083
Multivariate					3,756	,952

**Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- DBHP	-,644	2,221	-,290	,772	
BM <--- DBHBP	2,572	1,822	1,412	,158	
BM <--- PAD	,366	,074	4,969	***	
PDRB <--- PAD	-,006	,006	-,929	,353	
PDRB <--- DBHP	,010	,117	,085	,932	
PDRB <--- DBHBP	,045	,102	,444	,657	
PDRB <--- BM	-,006	,013	-,451	,652	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- DBHP	-,049
BM <--- DBHBP	,216
BM <--- PAD	,897
PDRB <--- PAD	-,384
PDRB <--- DBHP	,021
PDRB <--- DBHBP	,105
PDRB <--- BM	-,160

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP <--> PAD	16597,160	8584,534	1,933	,053	
DBHP <--> DBHBP	21,618	260,058	,083	,934	
DBHBP <--> PAD	-11944,214	8839,269	-1,351	,177	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
DBHP <--> PAD	,531
DBHP <--> DBHBP	,020
DBHBP <--> PAD	-,347

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP	973,331	333,850	2,915	,004	
DBHBP	1180,732	404,988	2,915	,004	
PAD	1004115,135	344408,650	2,915	,004	
e1	54718,625	18768,333	2,915	,004	
e2	152,287	52,234	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,673
PDRB	,302

**Matrices (Group number 1 - Default model)**

**Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,366	2,572	-,644	,000
PDRB	-,008	,030	,014	-,006

**Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,897	,216	-,049	,000
PDRB	-,527	,070	,029	-,160

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,366	2,572	-,644	,000
PDRB	-,006	,045	,010	-,006

**Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,897	,216	-,049	,000
PDRB	-,384	,105	,021	-,160

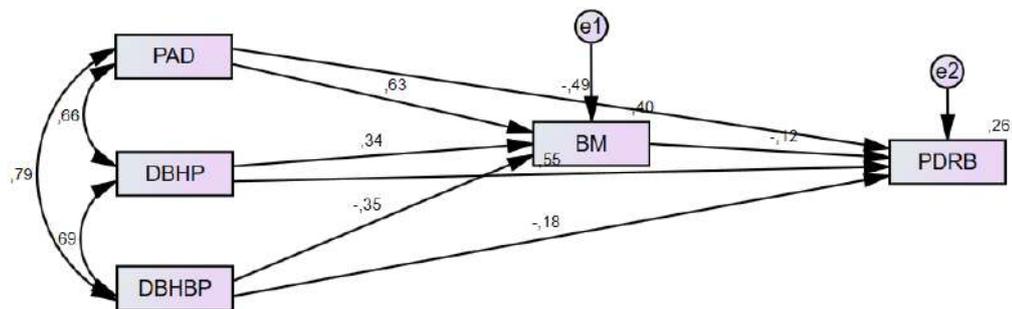
**Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	-,002	-,015	,004	,000

**Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	-,143	-,035	,008	,000

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	198,170	1090,480	,253	,438	-1,008	-,873
DBHBP	35,840	441,790	2,084	3,610	4,712	4,080
DBHP	24,460	95,390	,714	1,237	,031	,027
BM	153,950	566,220	,108	,187	-,616	-,534
PDRB	-,410	57,260	2,935	5,084	8,673	7,511
Multivariate					10,430	2,644

**Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- DBHP	2,022	1,595	1,267	,205	
BM <--- DBHBP	-,413	,388	-1,064	,287	
BM <--- PAD	,252	,129	1,950	,051	
PDRB <--- PAD	-,022	,018	-1,254	,210	
PDRB <--- DBHP	,367	,207	1,775	,076	
PDRB <--- DBHBP	-,024	,050	-,474	,635	
PDRB <--- BM	-,014	,030	-,463	,643	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- DBHP	,340
BM <--- DBHBP	-,352
BM <--- PAD	,625
PDRB <--- PAD	-,493
PDRB <--- DBHP	,552
PDRB <--- DBHBP	-,180
PDRB <--- BM	-,125

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP <--> PAD	3090,684	1362,253	2,269	,023	
DBHP <--> DBHBP	1107,353	475,041	2,331	,020	
DBHBP <--> PAD	18896,970	7373,731	2,563	,010	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
DBHP <--> PAD	,659
DBHP <--> DBHBP	,685
DBHBP <--> PAD	,793

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP	318,133	109,119	2,915	,004	
DBHBP	8204,262	2814,039	2,915	,004	
PAD	69138,099	23714,172	2,915	,004	
e1	6804,864	2334,049	2,915	,004	
e2	104,627	35,887	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,396
PDRB	,258

**Matrices (Group number 1 - Default model)****Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,252	-,413	2,022	,000
PDRB	-,026	-,018	,339	-,014

**Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,625	-,352	,340	,000
PDRB	-,571	-,136	,509	-,125

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,252	-,413	2,022	,000
PDRB	-,022	-,024	,367	-,014

**Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,625	-,352	,340	,000
PDRB	-,493	-,180	,552	-,125

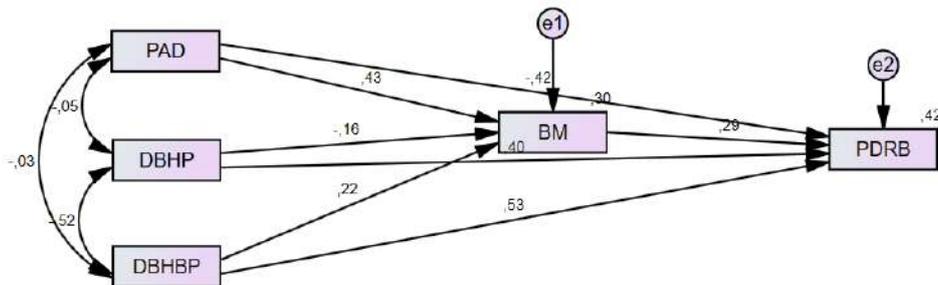
**Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	-,004	,006	-,028	,000

**Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	-,078	,044	-,042	,000

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	281,830	1806,970	,215	,373	-,983	-,851
DBHBP	,000	761,690	-,169	-,293	-,532	-,461
DBHP	103,440	1110,420	3,589	6,217	11,659	10,097
BM	193,650	717,990	-,120	-,208	-1,378	-1,193
PDRB	-5,220	74,080	3,310	5,734	10,643	9,217
Multivariate					12,957	3,285

**Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- DBHP	-,116	,176	-,655	,512	
BM <--- DBHBP	,178	,190	,939	,348	
BM <--- PAD	,154	,072	2,126	,034	
PDRB <--- PAD	-,014	,007	-2,001	,045	
PDRB <--- DBHP	,029	,016	1,824	,068	
PDRB <--- DBHBP	,041	,017	2,370	,018	
PDRB <--- BM	,028	,021	1,294	,196	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM <--- DBHP	-,156
BM <--- DBHBP	,223
BM <--- PAD	,433
PDRB <--- PAD	-,417
PDRB <--- DBHP	,399
PDRB <--- DBHBP	,525
PDRB <--- BM	,285

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP <--> PAD	-4483,492	23397,578	-,192	,848	
DBHP <--> DBHBP	-22202,508	11733,740	-1,892	,058	
DBHBP <--> PAD	-2781,893	21761,149	-,128	,898	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
DBHP <--> PAD	-,047
DBHP <--> DBHBP	-,517
DBHBP <--> PAD	-,031

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
DBHP	46188,590	15842,556	2,915	,004	
DBHBP	40001,647	13720,452	2,915	,004	
PAD	201055,970	68961,629	2,915	,004	
e1	17835,735	6117,607	2,915	,004	
e2	137,893	47,297	2,915	,004	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
BM	,298
PDRB	,421

**Matrices (Group number 1 - Default model)****Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,154	,178	-,116	,000
PDRB	-,010	,045	,025	,028

**Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,433	,223	-,156	,000
PDRB	-,293	,589	,355	,285

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,154	,178	-,116	,000
PDRB	-,014	,041	,029	,028

**Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,433	,223	-,156	,000
PDRB	-,417	,525	,399	,285

**Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,004	,005	-,003	,000

**Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	PAD	DBHBP	DBHP	BM
BM	,000	,000	,000	,000
PDRB	,124	,064	-,044	,000